

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE-2
(NUSP-2) DI GEDONG PAKUON KECAMATAN TELUK BETUNG
SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**



Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438/2016**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE-2
(NUSP-2) DI GEDONG PAKUON KECAMATAN TELUK BETUNG
SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Dakwah

Oleh

Rahmawati
NPM 1241020064

Jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I : Prof. Dr.H.MA. Achlami. HS, MA.
Pembimbing II : H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I.

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438/2016**

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE-2 (NUSP-2) DI GEDONG PAKUON KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Rahmawati**

Program NUSP-2 adalah program peningkatan kualitas kawasan/ lingkungan tempat tinggal dengan tujuan untuk menuntaskan permasalahan kumuh di perkotaan melalui pembangunan infrastruktur seperti drainase, perbaikan jalan, persampahan, sumur, dll, oleh Kementrian PU dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan *Asian Development Bank* (ADB).

Pemberian peranan yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan akan berdampak positif bagi keberlanjutan pembangunan. Hal ini menurut Rukminto jika masyarakat pasif dalam pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah akan menjadikan masyarakat tergantung pada program pemerintah. Sehingga, menurut Soetomo, masyarakat yang tergantung pada program pemerintah hanya akan melakukan pembangunan ketika ada program saja. Oleh karena itu, semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin rendah ketergantungannya pada program pemerintah. Pada kenyataannya, partisipasi masyarakat tersebut tidak menjamin keberlanjutan pembangunan sebagaimana teori yang ada. Pembangunan terhenti ketika dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) belum sampai kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah penyebab ketidakberlanjutan program, bagaimana implementasinya dan bagaimana partisipasi masyarakatnya. Sehingga, tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Subjek penelitian berjumlah 15 sampel terdiri dari 13 warga Gedong Pakuon dan 2 Pendamping Masyarakat. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara *semi-structure* sebagai metode utama dan menggunakan teknik dokumentasi serta observasi non partisipan. Metode analisa data menggunakan metode tematik analisis.

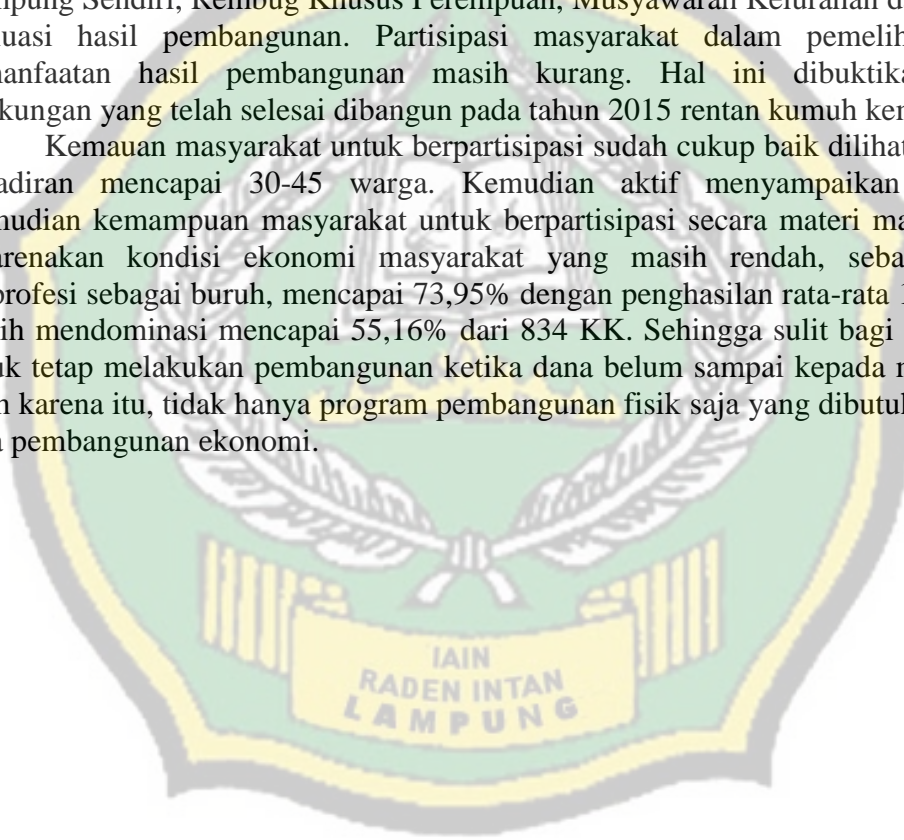
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, penyebab ketidakberlanjutan program dikarenakan kurangnya rasa memiliki, budaya masyarakat yang masih kumuh dan kondisi ekonomi. Dalam implementasinya didampingi oleh pendamping masyarakat dengan menerapkan tiga basis utama, pertama, Basis kebutuhan masyarakat yang dilaksanakan dengan Survey Kampung Sendiri, Rembug Khusus Perempuan dan

Musyawarah Kelurahan untuk menggali kebutuhan masyarakat. Kedua, Basis partisipasi yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan dan pelaksanaan kegiatan fisik. Ketiga basis pengelolaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LKM Sakai Sambayan sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui program NUSP-2.

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan fisik, tidak jauh berbeda dari pengalihan pekerjaan sementara. Masyarakat yang awalnya buruh menjadi tukang selama pengerjaan proyek NUSP-2. Begitu proyek selesai maka kembali lagi menjadi buruh. Tidak ada keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat buruh.

Partisipasi masyarakat dilaksanakan secara sukarela ketika kegiatan Survey Kampung Sendiri, Rembug Khusus Perempuan, Musyawarah Kelurahan dan kegiatan evaluasi hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pemanfaatan hasil pembangunan masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan lingkungan yang telah selesai dibangun pada tahun 2015 rentan kumuh kembali.

Kemauan masyarakat untuk berpartisipasi sudah cukup baik dilihat dari tingkat kehadiran mencapai 30-45 warga. Kemudian aktif menyampaikan pendapat. Kemudian kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara materi masih kurang dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah, sebagian besar berprofesi sebagai buruh, mencapai 73,95% dengan penghasilan rata-rata 1 juta/bulan masih mendominasi mencapai 55,16% dari 834 KK. Sehingga sulit bagi masyarakat untuk tetap melakukan pembangunan ketika dana belum sampai kepada masyarakat. Oleh karena itu, tidak hanya program pembangunan fisik saja yang dibutuhkan, tetapi juga pembangunan ekonomi.



PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM
NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER
PROJECT PHASE-2 (NUSP-2) DI GEDONG PAKUON
KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: RAHMAWATI

NPM

: 1241020064

Jurusan

: Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas

: Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas
Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung**

Bandar Lampung, 21 Oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr.H.MA. Achlami, HS, MA.
NIP. 195501141987031001**

**H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I.
NIP. 197306012003121002**

Mengetahui

Ketua Jurusan PMI

**H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I.
NIP. 197306012003121002**



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (0721)-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE-2 (NUSP-2) DI GEDONG PAKUON KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG", disusun oleh Nama: Rahmawati NPM. 1241020064, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada hari/tanggal: Rabu, 23 November 2016

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Jasmadi, M.Ag.

Sekretaris : M. Husaini, MT.

Penguji I : Dr. M. Mawardi J, M.Si.

Penguji II : Prof. Dr.H.MA. Achlami. HS, MA.

Dekan

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.

NIP. 196104091990031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”
(QS. Ar-Ra’du:11)

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ... ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu”
(QS. At-Taubah: 105)

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, hasil karya ini tidak lepas dari dukungan dan do'a orang-orang tercinta yang selalu menanti keberhasilanku.

1. Kedua orang tuaku yang selalu mengajarkan tentang kesederhanaan, Bapak Suroso dan Ibu Lestari. Terimakasih tak terhingga atas segala dukungan baik moril maupun materil. Semoga kelak Allah meninggikan derajatmu di akhirat dengan syurga-Nya
2. Adik-adikku tercinta, Ismail, Nonik, Arbain dan Annisa semoga semakin banyak prestasi dan keberkahan yang kita dapatkan. *Let's reach our dreams.*
3. Sahabatku sejak SMP Yuli Rahayu Safarina. Terimakasih atas kebersamaan dalam suka dan duka. *Countless memorable stories with you. You're My Best friend forever.*
4. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Rani, Deti, Mb Odi. Saudara-saudaraku dalam dakwah di UKMF Rabbani, UKM Bapinda, UKM I Al-Ittihad, Formasi Muslimah, yang kucintai karena Allah. Keluarga baruku Leni, Teh Rena, Nur, A'ah, Ihda, Diah, bahagia pernah tinggal bersama kalian layaknya keluarga.
5. Teman-teman seperjuangan di jurusan PMI angkatan 2012
6. Almamater tercinta IAIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Rahmawati adalah putri pertama dari pasangan suami istri Bapak Suroso dan Ibu Lestari, dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1994 di Purworejo, Jawa Tengah. Kemudian tahun 2000 penulis bersama ayah, ibu dan 2 adik, pindah dan menetap di Tanjung Bintang, Lampung Selatan hingga sekarang. Saat ini penulis adalah kakak dari 2 adik laki-laki dan 2 adik perempuan.

Penulis menempuh pendidikan di TK Pertiwi, Ngombol tahun 1999, TK Assyafi'iyah, Jati Indah tahun 2000. SDN 1 Jati Indah lulus tahun 2006, SMPN 1 Tanjung Bintang lulus tahun 2009, SMAN 1 Tanjung Bintang lulus tahun 2012. Kemudian menjadi mahasiswi Jurusan PMI di FDIK IAIN Raden Intan Lampung angkatan tahun 2012, sekarang UIN Raden Intan Lampung. Walaupun awalnya berfikir "IAIN bukan duniaku", karena kecondongan hati pada salah satu bidang sains murni. *Qadarullah*, Dia Allah *Muqalibal Qulub* yang menggerakkan hati untuk memilih kampus tercinta ini dan menguatkannya hingga di penghujung perjuangan menempuh Strata 1. *It's the best for me.*

Ketika SMA, penulis pernah menjadi Kabid Kerohanian OSIS'10'11, anggota KIR, Ketua Rohis'10'11. Ketika mahasiswi pernah menjadi Staf Bidang Keputrian UKMF Ababil'13, Bendahara UKMF Ababil'14 (sekarang UKMF Rabbani), Staf Divisi Keputrian UKM Bapinda'15, Anggota UKMI Al-Ittihad, Formasi Muslimah, Kawan Tani dan Pengajar di Rumah Qur'an & Dakwah Al-Falaah Lampung.

Bandar Lampung, 23 November 2016
Penulis

Rahmawati
NPM. 1241020064

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, atas berkat semua nikmat-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir pendidikan Strata Satu (S1) dengan judul skripsi “Partisipasi Masyarakat dalam Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2) di Gedong Pakuon Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad *Shalallahu'alaihi wa sallam*, beserta keluarganya, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in* serta orang-orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya.

Skripsi ini merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan program S1 di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.). Atas terselesaikannya skripsi ini, secara rinci penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I. selaku Ketua Jurusan PMI sekaligus pembimbing II yang telah membimbing agar skripsi ini sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang benar.
3. Dr. M. Mawardi J, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan PMI sekaligus Penguji I yang telah memberikan kritik dan saran agar skripsi ini lebih sempurna.
4. Prof. Dr. H. MA. Achlami HS, MA. selaku pembimbing I yang telah mengarahkan, berdiskusi dan membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.

5. Dr. Jasmasi, M.Ag. selaku Ketua Sidang yang memberikan saran-saran serta nasehat agar menjadi pemberdaya masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam.
6. M.Husaini, MT. selaku Sekretaris Sidang, serta segenap Dosen yang mengajar di jurusan PMI terutama Bpk.Taufik, M.TI. dan Bpk.Bambang Budiwiranto, Ph.D. sebagai inspirator dan *problem solver* sehingga dengannya Allah memudahkan ide-ide dalam penulisan skripsi ini.
7. Ir. Adi Barcon, Koordinator Kota Program NUSP-2, serta Jantuahman Saragih, ST, Wildan Kesai, SE. selaku Fasilitator Kelurahan Gedong Pakuon.
8. Anton Idward, S.Sos. selaku Lurah Gedong Pakuon, Muhammad Natsir, S.Pd. selaku koordinator LKM Sakai Sambayan. Serta segenap masyarakat Gedong Pakuon yang terlibat dalam proses penelitian ini.
9. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan FDIK IAIN Raden Intan Lampung serta seluruh civitas akademika yang telah menyediakan referensi, melayani urusan administrasi, dan lain-lain.

Hanya Allah pemberi balasan yang terbaik. Akhirnya Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna, karena karya yang sempurna hanyalah ciptaan-Nya, untuk itu kritik dan saran dari para pembaca akan penulis persilakan. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Bandar Lampung, 23 November 2016
Penulis,

Rahmawati
NPM. 1241020064

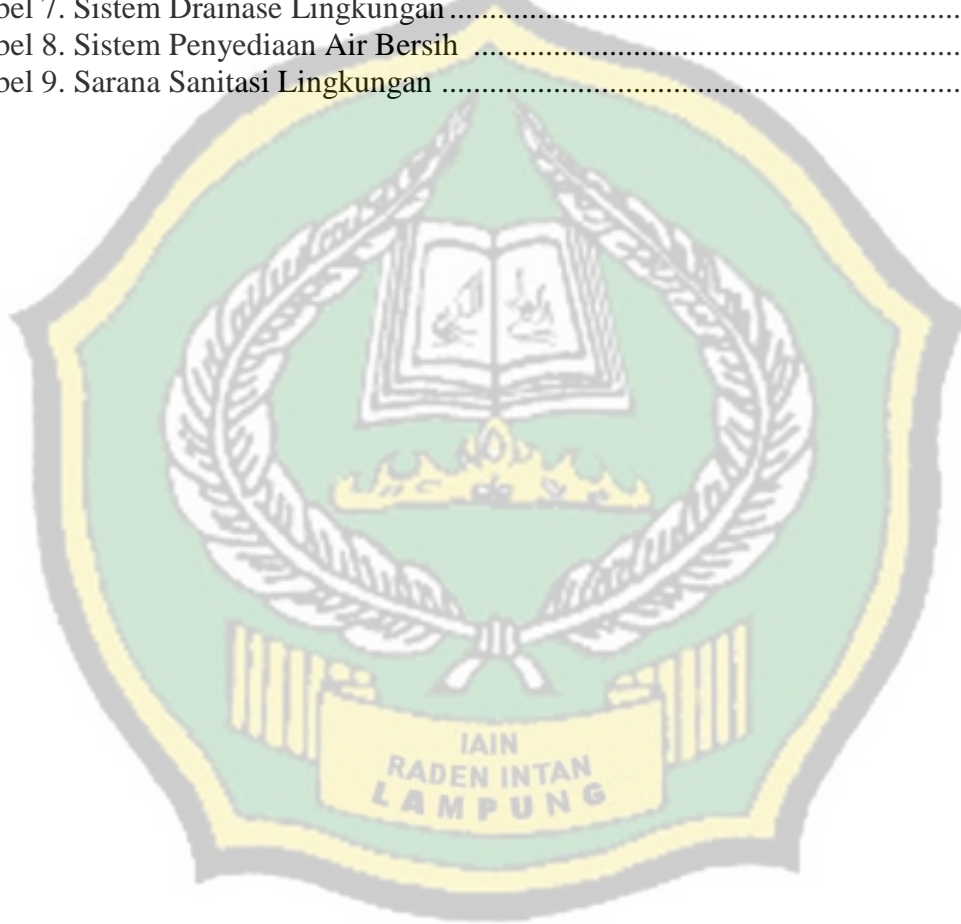
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Metodologi Penelitian	12
H. Metode Pengumpulan Data	15
I. Metode Analisa Data	18
 BAB II PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	 23
A. Konsep Partisipasi	23
1. Urgensi Partisipasi Masyarakat	23
2. Unsur- Unsur Pokok Partisipasi Masyarakat	27
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	30
4. Peran Pelaku Perubahan	32
B. Konsep Pembangunan dalam Islam	35
1. Karakter Islami dalam Pembangunan	36
2. Membangun Fasilitas Umum	46
3. Memperhatikan Sumber Air	47
4. Membangun Kota Hijau	49

BAB III PROGRAM NUSP-2 DI GEDONG PAKUON	51
A. Program (Neighborhood Upgrading and Shelter Project	
Phase-2 (NUSP-2)	51
1. Pengertian NUSP-2	51
2. Konsep Dasar	52
3. Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP)	54
4. Tahap Kegiatan NUSP-2 Tingkat Kelurahan	57
B. Gambaran Umum Wilayah Sasaran Program	59
1. Monografi	59
2. Demografi	61
3. Kondisi Sosial Keagamaan	65
4. Kondisi Infrastruktur	67
C. Implementasi Program dan Partisipasi Masyarakat	74
1. Tahap Persiapan dan Perencanaan	74
2. Tahap Survey	77
3. Tahap Perencanaan	79
4. Pelaksanaan Kegiatan Fisik	83
5. Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan	88
D. Keberlanjutan Pembangunan	91
 BAB IV PARTISPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NUSP-2	 96
A. Implementasi Program NUSP-2	96
B. Partisipasi Masyarakat	101
C. Stagnasi Program NUSP-2	107
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
 DAFTAR PUSTAKA	 115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Sebaran Luas Wilayah	60
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Usia	62
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	63
Tabel 4. Data Penghasilan Rata-Rata Rumah Tangga	64
Tabel 5. Data Tingkat Kesehatan Penduduk	65
Tabel 6. Jumlah Penduduk menurut Agama	66
Tabel 7. Sistem Drainase Lingkungan	69
Tabel 8. Sistem Penyediaan Air Bersih	71
Tabel 9. Sarana Sanitasi Lingkungan	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Analisis Data Penelitian Kualitatif	20
Gambar 2. Unsur-Unsur Pokok Partisipasi Masyarakat	27
Gambar 3. Faktor-Faktor Pengaruh Partisipasi	31
Gambar 4. Siklus Kegiatan NUSP-2 Tingkat Kelurahan/Masyarakat	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Sampel
- Lampiran II : Alat Pengumpul Data
- Lampiran III : Pedoman Wawancara
- Lampiran IV : Pedoman Observasi
- Lampiran V : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran VI : Jenis Kontruksi yang dapat Diusulkan
- Lampiran VII : Pedoman Umum NUSP-2
- Lampiran VIII : Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Target Penanganan Kawasan Kumuh Penerima Program NUSP-2 Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2017
- Lampiran IX : Kondisi Bangunan Rumah Tinggal
- Lampiran X : Sarana Persampahan
- Lampiran XI : Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran XII : Surat Keputusan Dekan FDIK tentang Penetapan dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran XIII : Surat Keputusan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran XIV : Surat Rekomendasi Penelitian/Survey dari Kesbangpol Provinsi
- Lampiran XV : Surat Rekomendasi Penelitian/Survey dari Kesbangpol Kota
- Lampiran XVI : Surat Rekomendasi Penelitian/Survey dari Dinas PU
- Lampiran XVII : Surat Keterangan Penelitian/Survey dari Kelurahan
- Lampiran XVIII: Surat Keterangan Penelitian/Survey dari Kecamatan
- Lampiran XIX :Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran XX :Kartu Bukti Hadir Munaqosah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE-2 (NUSP-2) DI GEDONG PAKUON KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG”. Untuk menegaskan makna dalam judul tersebut, maka terlebih dahulu diuraikan definisi dan batasan masalah setiap variabel. Adapun variabel pertama adalah partisipasi masyarakat.

Menurut Mikkelsen, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat (*Participation is the voluntary involvement of people in self-determined change*).¹ Menurut Isbandi Rukminto, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²

Berdasarkan pengertian di atas, maksud partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam proses pembangunan, meliputi indentifikasi masalah dan potensi yang dimiliki, perencanaan pembangunan melalui musyawarah, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

¹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.107

² *Ibid*, h.111

Kemudian variabel kedua adalah Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2, disingkat menjadi program NUSP-2. Diartikan sebagai program peningkatan kualitas kawasan/lingkungan pemukiman tahap ke-2. Program NUSP-2 termasuk dalam program pembangunan, yaitu pembangunan lingkungan. Pengertian lebih lanjut dijelaskan pada paragraf berikut.

Program NUSP-2 adalah salah satu program nasional penanganan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam rangka mewujudkan “Kota Tanpa Permukiman Kumuh” pada tahun 2019. Program NUSP-2 merupakan program pengembangan dari program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) yang telah dilaksanakan pada tahun 2005-2010 di 32 kota/kabupaten.³

Oleh karena itu maksud *Phase-2* dalam program NUSP-2 adalah tahap kedua setelah program NUSSP berakhir di tahun 2010.

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi NUSP-2 dan keterlibatan masyarakat dalam program tersebut sejak identifikasi masalah yang disebut Survey Kampung Sendiri (SKS), perencanaan prioritas pembangunan melalui Rembug Khusus Perempuan (RKP) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel), kemudian pelaksanaan kegiatan fisik, evaluasi hasil pembangunan dan pemanfaatan serta pemeliharaan pasca pembangunan. Penulis tidak membahas secara detil mengenai proyek pembangunan berupa kuantitas maupun kualitas hasil pembangunan.

Selanjutnya Gedong Pakuon adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung yang menjadi sasaran program NUSP-2 tahun

³ Pedoman Umum, *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2)*, (Kemen PU dan Perumahan Rakyat :2015), h.1-2

2015-2017, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 1036/IV.32/HK/2014 tanggal 29 Desember 2014. Prioritas pembangunan berupa infrastruktur jalan (*paving block*, *plat duicker*, dll), drainase, persampahan, penyediaan air bersih, penerang jalan dan sanitasi.

Oleh karena itu, makna dalam judul penelitian ini adalah meneliti secara mendalam terkait implementasi/pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Gedong Pakuon tahun 2015, serta keterlibatan masyarakatnya dalam kegiatan SKS, RKP, Muskel, pelaksanaan kegiatan fisik, evaluasi, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan yang difasilitasi oleh program tersebut.

B. Alasan Memilih Judul

Penulis tertarik untuk meneliti partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan melalui Program NUSP-2 di Kelurahan Gedong Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dengan alasan sebagai berikut.

1. Partisipasi erat kaitannya dengan keberdayaan suatu masyarakat, karena masyarakat yang berdaya akan mampu berperan serta untuk menentukan pilihan dan perubahan dalam kehidupannya sendiri. Sehingga partisipasi masyarakat berbanding lurus dengan keberdayaan suatu masyarakat. Sedangkan program pembangunan seringkali dibuat atau direncanakan oleh pemerintah sedangkan rakyat hanya menerima atau menyesuaikan kebutuhan dengan rencana pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah.

2. Program NUSP-2 mengklaim dalam pelaksanaannya berbasis pemberdayaan masyarakat dan menjamin partisipasi/peran aktif masyarakat terutama kaum perempuan dan pemangku kepentingan daerah. Hal ini selaras dengan program studi yang ditempuh penulis yaitu Pengembangan Masyarakat Islam.
3. Ketersediaan data, informan serta referensi dalam penulisan skripsi dan penulis optimis penelitian ini dapat diselesaikan.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan memiliki tujuan utama untuk merubah kondisi yang kurang baik atau buruk menjadi kondisi yang lebih baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soetomo, “pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik”.⁴ Perubahan tersebut merupakan usaha manusia, karena mengeluhkan kerusakan-kerusakan yang terjadi dan hanya berdo’a agar diperbaiki mutu hidupnya tetapi manusianya tidak pernah berusaha untuk memperbaikinya adalah harapan kosong. Dalam Al-Qur’an surat Ar-Ra’du ayat 11, Allah *Subhanahu wa ta’ala* telah berfirman.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

...sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS.Ar-Ra’du:11)⁵

Berdasarkan ayat di atas, bahwa perubahan dalam suatu kaum atau masyarakat tidak akan terjadi jika masyarakat itu sendiri tidak mau merubahnya.

⁴ Soetomo, *Op.Cit*, h.328

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya, Special for Women*, (Bandung:Syaamil Al-Qur’an), h.250

Walaupun semua sudah ditakdirkan oleh Allah, akan tetapi untuk hal-hal yang manusia diberi kebebasan untuk memilih dan berbuat maka di situlah manusia harus berusaha sebaik-baiknya, karena Allah tidak akan menurunkan keajaiban bagi yang tidak mau melakukan perubahan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu usaha untuk perubahan yang lebih baik. Partisipasi menjadi jalan bagi masyarakat untuk mengenali kebutuhan dan permasalahannya kemudian diselesaikan bersama-sama. Sehingga partisipasi dalam pembangunan merupakan wujud nyata dari harapan untuk hidup di lingkungan yang lebih baik.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga merupakan hak bagi masyarakat untuk memperoleh pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih relevan karena berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih tahu permasalahan dan kebutuhannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soetomo berikut.

Secara normatif, masyarakat lokal harus memperoleh proyek dan program pembangunan yang mereka tentukan sendiri. Asumsi normatif ini didasari oleh asumsi deduktif bahwa masyarakat lokal yang paling tahu apa yang menjadi masalah dan kebutuhannya, dan mereka memiliki hak dan kemampuan untuk menyatakan pikiran dan kehendaknya tadi. Dengan demikian apabila program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan ditingkat lokal didasari oleh keputusan yang diambil oleh masyarakat sendiri maka program tersebut akan relevan dan lebih menyentuh permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, program pembangunan dalam setiap tahapnya harus melibatkan masyarakat terutama masyarakat yang lemah, karena partisipasi erat

⁶ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.448

kaitannya dengan pemberdayaan. Menurut Edi Suharto, pemberdayaan menunjuk pada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁷ Menurut Hasim dan Remiswal, ukuran tinggi rendahnya partisipasi ditentukan oleh kemauan rakyat untuk menanggung biaya berupa uang maupun tenaga.⁸

Oleh karena itu, pemberdayaan dan partisipasi dapat saling mempengaruhi, karena hanya masyarakat yang mampu saja yang dapat berpartisipasi dalam pembangunan, baik mampu secara fisik, pemikiran maupun materi. Maka, penting untuk menguatkan masyarakat lemah agar mampu terlibat dalam pembangunan, walaupun keterlibatannya hanya mampu mengungkapkan permasalahan dan kebutuhan yang sebenarnya. Hal ini akan mempengaruhi keputusan terkait kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan akan mengakibatkan ketergantungan masyarakat pada program pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam pernyataan berikut.

Jika masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahap dan hanya bersifat pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan oleh pelaku perubahan (misalnya, pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta), masyarakat cenderung akan menjadi *dependent* (tergantungan) pada pelaku perubahan.⁹ Masyarakat yang bersifat tergantung hanya akan melakukan aktivitas

⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 58

⁸ Hasim dan Remiswal, *Community Development Berbasis Ekosistem (Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat)*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), h.24

⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Op.Cit*, h.110-111

pembangunan selama ada program dari pemerintah dan ada instruksi dari atas, begitu program berhenti, kegiatan juga akan berhenti.¹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, berlaku perbandingan terbalik, semakin tinggi partisipasi, semakin rendah ketergantungan masyarakatnya. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, semakin menjauhkan masyarakat dari ketergantungan. Sehingga partisipasi masyarakat akan berdampak positif bagi keberlanjutan program pembangunan, karena ketidak bergantung masyarakat pada program dapat diartikan bahwa masyarakat secara mandiri akan melakukan pembangunan dengan ada atau tidaknya program dari pemerintah.

Adapun penelitian terkait partisipasi masyarakat adalah penelitian yang dilakukan oleh Irma Septiany dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan di Kaliabang Tengah, Kota Bekasi tahun 2012. Fokus penelitian pada program kegiatan yang ditawarkan PNPM yang kurang menarik dan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Suhendar dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri di Desa Karyasari, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang tahun 2012. Fokus penelitian pada rendahnya keaktifan masyarakat untuk menyampaikan pendapat/ usulan program yang menjadi kebutuhannya. Jurnal yang ditulis oleh Ishak Kadir, dosen Fakultas Teknik Universitas Haluoleo tentang dampak program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh kota Kendari tahun 2009.

¹⁰ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.356

Kemudian, salah satu program pembangunan yang selaras dengan penelitian di atas adalah program NUSP-2 yang dilaksanakan berbasis gerakan masyarakat.

Pembangunan berbasis/digerakkan oleh masyarakat atau *Community Driven Development* (CDD) merupakan bagian mendasar dari program NUSP-2 dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk membuat keputusan sendiri tentang kebutuhan investasi dan prioritas mereka dalam rangka penanganan permukiman kumuh yang ada di lingkungan mereka. Manfaatnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesetaraan dan inklusivitas, efisiensi dan tata kelola pemerintahan lokal yang lebih baik.¹¹

Sebagai upaya untuk mewujudkan CDD maka perencanaan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan dilaksanakan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dibentuk secara partisipatif oleh masyarakat dengan pendampingan dari Koordinator Kota dan Tim Pendamping Masyarakat. Melalui LKM, masyarakat didampingi untuk menyalurkan aspirasi, ide-ide dan kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu menentukan keputusannya sendiri. Kemudian pendataan profil permukiman kumuh dilakukan secara partisipatif melalui Survey Kampung Sendiri.

Fokus utama dari pendekatan partisipatif Survey Kampung Sendiri ini adalah masyarakat belajar mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang dimilikinya secara bersama, dengan demikian hasil dari Survey Kampung Sendiri masyarakat dapat melihat gambaran kondisi permasalahan dan potensi kelurahan/desanya secara keseluruhan.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, program NUSP-2 berupaya untuk melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemudian dalam implementasi program di Kelurahan Gedong Pakuon melalui LKM Sakai Sambayan dengan prioritas pembangunan pada tahun 2015

¹¹ Petunjuk Teknis, Penyusunan *Neighborhood Upgrading and Action Plan (NUAP)*, Kemen PU dan Perumahan Rakyat, h.2

¹² *Ibid*, h.2

berupa infrastruktur *paving block*, *plat duicker* dan drainase. Kemudian untuk jenis infrastruktur yang lain akan menyusul di tahun 2016 dan 2017 seperti persampahan, pengadaan motor sampah, sumur bor, penerang jalan, dll. Adapun partisipasi masyarakat cukup antusias dalam setiap kegiatan oleh program NUSP-2 sebagaimana yang diungkapkan oleh Pendamping Masyarakat (*Community Advisor*) Gedong Pakuon berikut.

Partisipasi masyarakat di Gedong Pakuon cukup aktif, baik warga miskin maupun perempuan, dalam setiap rembug atau musyawarah aktif memenuhi undangan, aktif bertanya dan mengemukakan pendapat. Rata-rata tingkat kehadiran masyarakat dalam rembug 30 orang, 40% perempuan, musyawarah 45 orang, 40% perempuan. Untuk pelaksana kegiatan fisik dilakukan oleh warga atau masyarakat, 65% warga miskin dan 30% perempuan.¹³

Berdasarkan pernyataan di atas, berarti sudah ada kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, sebagaimana dalam pernyataan berikut.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu-hidupnya.¹⁴

Maka seharusnya masyarakat secara mandiri akan tetap melakukan pembangunan dengan ada atau tidaknya program dari pemerintah, akan tetapi pada realitanya di Kelurahan Gedong Pakuon, partisipasi masyarakat yang cukup aktif sejak identifikasi masalah sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan ternyata tidak memberikan efek keberlanjutan ketika input/dana dari pemerintah belum sampai

¹³ Wildan, *Community Advisor* NUSP-2 Gedong Pakuon, Wawancara 14 April 2016

¹⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfa Beta, 2015), h.82

kepada masyarakat. Selain itu, lingkungan yang sudah diperbaiki pada tahun 2015 rentan kumuh kembali.

Maka penelitian ini memfokuskan pada konsep NUSP-2 yang menjamin partisipasi aktif masyarakat, kemudian dalam implementasinya partisipasi masyarakat cukup baik, namun keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam pembangunan terhenti ketika dana belum sampai. Permasalahan tersebut terjadi tentu ada sebab yang perlu dikaji kembali. Oleh karena itu diperlukan penelitian secara mendalam terkait ketidakberlanjutan implementasi program NUSP-2 di Kelurahan Gedong Pakuon serta terkait tingkat partisipasi masyarakatnya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan tiga rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi program NUSP-2 di Kelurahan Gedong Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program NUSP-2 di Kelurahan Gedong Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung?
3. Apakah penyebab ketidakberlanjutan pembangunan melalui NUSP-2 di Gedong Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program NUSP-2 di Kelurahan Gedong Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program NUSP-2 di Kelurahan Gedong Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung
3. Untuk mengetahui penyebab ketidakberlanjutan pembangunan melalui NUSP-2 di Gedong Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung

F. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis: Pada tataran teoritis, dengan melakukan pengujian kembali terkait teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah/ lingkungan tempat tinggal, diharapkan mampu memperkaya teori tentang upaya membangun partisipasi masyarakat dan tentang upaya membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal.
2. Praktis: penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis sebagai bentuk pengalaman nyata terkait aktivitas pembagunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah sebagai perencana program agar program-program pembangunan di masa

mendatang semakin tepat sasaran, juga kepada para fasilitator dan penerima manfaat program yakni masyarakat secara umum.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis, penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.¹⁵ Menurut Creswell pendekatan kualitatif yaitu metode - metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang –oleh sejumlah individu atau sekelompok orang- dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹⁶ Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam penelitian terkait implementasi dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.

1. Desain Penelitian

Pendekatan kualitatif terdapat beberapa desain, maka penelitian ini menggunakan desain studi kasus yang dianggap paling tepat untuk digunakan. Desain studi kasus yaitu tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.¹⁷

Menurut Creswell Studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas,

¹⁵ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitan Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.4

¹⁶ John W.Creswell, *Research Design Kualitatif, Quantitatif, and Mixed Methods Approaches.3th Edition*, diterjemahkan oleh Ahmad Fawaid, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), h.4

¹⁷ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.22

dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.¹⁸

Menggunakan desain studi kasus diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang menyeluruh dan mendalam terkait implementasi dan partisipasi masyarakat dalam program NUSP-2 di Gedong Pakuon.

Penulis memilih lokasi Kelurahan Gedong Pakuon dibanding 17 lokasi lain di Kota Bandar Lampung yang menjadi sasaran NUSP-2 (lihat Lampiran VII tentang penetapan lokasi NUSP-2), dikarenakan keaktifan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui NUSP-2, akan tetapi keberlanjutan pembangunan terhenti ketika program terhenti beberapa waktu.

Oleh karena itu, kasus yang diteliti adalah implementasi program NUSP-2 dan partisipasi masyarakatnya di Kelurahan Gedong Pakuon meliputi kegiatan Survey Kampung Sendiri, Rembug Khusus Perempuan, Musyawarah Kelurahan, pelaksanaan kegiatan fisik, evaluasi hasil pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pasca pembangunan. Serta bagaimana kemandegan implementasi program dapat terjadi.

2. Subjek Penelitian

Istilah “Subjek Penelitian” menunjuk pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (kasus) yang diteliti.¹⁹ Karena studi kasus berkepentingan dengan upaya “merekonstruksi” bagaimana seseorang atau kelompok itu sebagai keseluruhan. Racangan studi kasus, menggambarkan “tipologis” dari

¹⁸ John W. Creswell, *Op.Cit*, h.20

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Op.Cit*, h.109

subjek penelitian berkaitan dengan siapa mereka, dalam kategori apa mereka itu, ciri-ciri umum dan unik mereka dibandingkan dengan subjek-subjek lain yang serupa.²⁰ Oleh karena itu, penting untuk menentukan kriteria subjek penelitian yang menjadi sampel dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang memahami pelaksanaan program NUSP-2 di Kelurahan Gedong Pakuon. Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.
2. Masyarakat yang menempati sekitar lingkungan kumuh yang telah dibangun infrastruktur maupun yang masih diencanakan akan dibangun dari NUSP-2 serta aktif dalam pelaksanaan program NUSP-2 di wilayahnya sejak survey, rembug atau musyawarah, pelaksanaan kegiatan fisik, evaluasi dan pemeliharaan hasil pembangunan..
3. Pendamping Masyarakat yang menangani wilayah Gedong Pakuon pada tahun 2015, dikarenakan terjadi pergantian pendamping masyarakat pada pertengahan tahun 2016.

Berdasarkan kriteria di atas, sampel penelitian terdiri dari Lurah Gedong Pakuon, Koordinator LKM Sakai Sambayan sebagai pihak yang memahami pelaksanaan NUSP-2 di Gedong Pakuon serta Koordinator Kota NUSP-2 di Bandar Lampung yang memahami implementasi program NUSP-2. Kemudian 12 masyarakat Gedong Pakuon dari beberapa RT dan 2 pendamping masyarakat yang bertugas di wilayah tersebut terdiri dari CA (*Community Advisor*) teknik dan CA pemberdayaan.

²⁰ *Ibid*, h.110

Maka diperoleh jumlah yaitu 16 subjek penelitian yang dianggap dapat memberikan informasi yang mendalam dan menyeluruh untuk penelitian dengan desain studi kasus di wilayah tersebut.

H. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Interview

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).²¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe *open-ended*.

Wawancara studi kasus bertipe *open-ended*, dimana peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Pada beberapa situasi, peneliti bahkan bisa meminta responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap peristiwa tertentu dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.²²

Untuk memudahkan melakukan wawancara dengan metode tersebut disusun pedoman wawancara (lihat Lampiran III), sehingga wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui *open-ended semi structure*. Informasi yang digali meliputi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang difasilitasi oleh program NUSP-2 dengan kata kunci partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan dan kesukarelaan. Serta untuk menggali data dan informasi terkait pelaksanaan survey,

²¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. cet. ke-8 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 67-68

²² Robert K. Yin, *Studi Kasus, Desain dan Metode*, diterjemahkan oleh Djauzi Mudzakir, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 108-109

rembug atau musyawarah yang dilaksanakan, kegiatan pembangunan infrastruktur, evaluasi serta pemanfaatan dan pemeliharaan pasca pembangunan. Sehingga Informasi diperlukan oleh penulis untuk menarik kesimpulan terkait kemauan, kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui program NUSP-2 serta penyebab ketidakberlanjutan pembangunan.

Selanjutnya untuk menggali informasi mengenai implementasi program NUSP-2 ditujukan kepada pendamping masyarakat atau *Community Advisor* yang menangani Kelurahan Gedong Pakuon. Informasi ini diperlukan oleh penulis untuk memperoleh informasi yang akurat tentang pelaksanaan program NUSP-2, mekanisme pelaksanaan kegiatan dan upaya pendampingan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Gedong Pakuon. Data dan informasi ini diperlukan oleh penulis untuk menarik kesimpulan terkait peran fasilitator atau pendamping masyarakat (mereka menyebutnya *CA/Community Advisors*) dalam pelaksanaan program NUSP-2 di Gedong Pakuon.

2. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.²³ Peneliti sebagai observer menggunakan tipe observasi non partisipan. Observasi non partisipan yaitu pengamat berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, pengamat akan lebih mudah mengamati

²³ Irawan Soehartono, *Op.Cit*, h.69

kemunculan tingkah laku yang diharapkan.²⁴ Observasi tersebut bisa begitu berharga sehingga peneliti bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Paling kurang, foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat.²⁵

Metode observasi dalam penelitian ini dianggap penting untuk mengamati kondisi lingkungan Kelurahan Gedong Pakuon, bangunan apa saja yang telah dibangun serta bagaimana kondisinya setelah itu, pemanfaatan hasil pembangunan dan upaya pemeliharannya dan penulis juga mengamati Pendamping Masyarakat dalam proses pendampingan masyarakat, tentang bagaimana cara mereka berinteraksi dengan masyarakat.

Penulis tidak melakukan observasi terkait pelaksanaan tahap perencanaan seperti survey, rembug maupun musyawarah dikarenakan kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2015, sehingga penulis memfokuskan penggalan informasi tersebut dengan metode wawancara.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, laporan dan surat-surat resmi.²⁶ Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis. Dalam penelitian studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah untuk

²⁴ *Ibid*, h.70

²⁵ Robert K.Yin,*Op.Cit*, h.112

²⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h.73

mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Adapun fungsi dokumen dalam penelitian studi kasus adalah sebagai berikut:

Pertama, Dokumen membantu pemverifikasian ejaan dan judul atau nama yang benar dari organisasi-organisasi yang telah disinggung dalam wawancara. *Kedua*, Dokumen dapat menambah rincian spesifik lainnya guna mendukung informasi dari sumber-sumber lain; jika bukti dokumenter bertentangan dan bukannya mendukung, peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh topik yang bersangkutan.²⁷

Adapun dokumen yang akan dikumpulkan oleh penulis adalah dokumen tentang profil kelurahan meliputi data monografi dan demografi wilayah sasaran program, absensi kehadiran masyarakat dalam rembug maupun dalam musyawarah kelurahan, petunjuk teknis pelaksanaan program NUSP-2, pedoman umum NUSP-2, dokumen Rencana Perbaikan Lingkungan, Rencana Kerja Masyarakat, data laporan akhir kegiatan tahun 2015, foto-foto dokumentasi kegiatan, serta data-data lainnya yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam analisis data.

I. Metode Analisa Data

Menurut Emzir analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan anda menyajikan yang sudah anda temukan kepada orang lain.²⁸

²⁷ Robert K.Yin, *Op.Cit*, h.104

²⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.85

Berdasarkan pengertian di atas, maka analisis data merupakan usaha yang sistematis atau melalui tahap demi tahap untuk mencari, mengatur maupun mengelompokkan data-data hasil penelitian untuk dipahami dan ditemukan makna yang sebenarnya kemudian disajikan dengan bahasa yang lebih sederhana, sehingga orang lain yang membaca hasil penelitian tersebut mudah memahami. Penelitian ini menggunakan teknik tematik analisis untuk menganalisis data hasil dari penelitian.

Menurut Boyatzis, analisis tematik adalah cara mengidentifikasi tema-tema yang terpola dalam suatu fenomena. Tema-tema ini dapat diidentifikasi, dikodekan secara induktif (*data driven*) dari data kualitatif mentah (transkrip wawancara, biografi, rekaman video, dan sebagainya) maupun secara deduktif (*theory driven*) berdasarkan teori maupun hasil penelitian terdahulu.²⁹

Selanjutnya Creswell mengilustrasikan analisis data penelitian kualitatif dengan pendekatan linear dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas, namun kemudian beliau menyatakan dalam prakteknya pendekatan tersebut lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan.³⁰ Susunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. Analisis Data Penelitian Kualitatif dan dijabarkan dalam langkah-langkah analisis berikut.

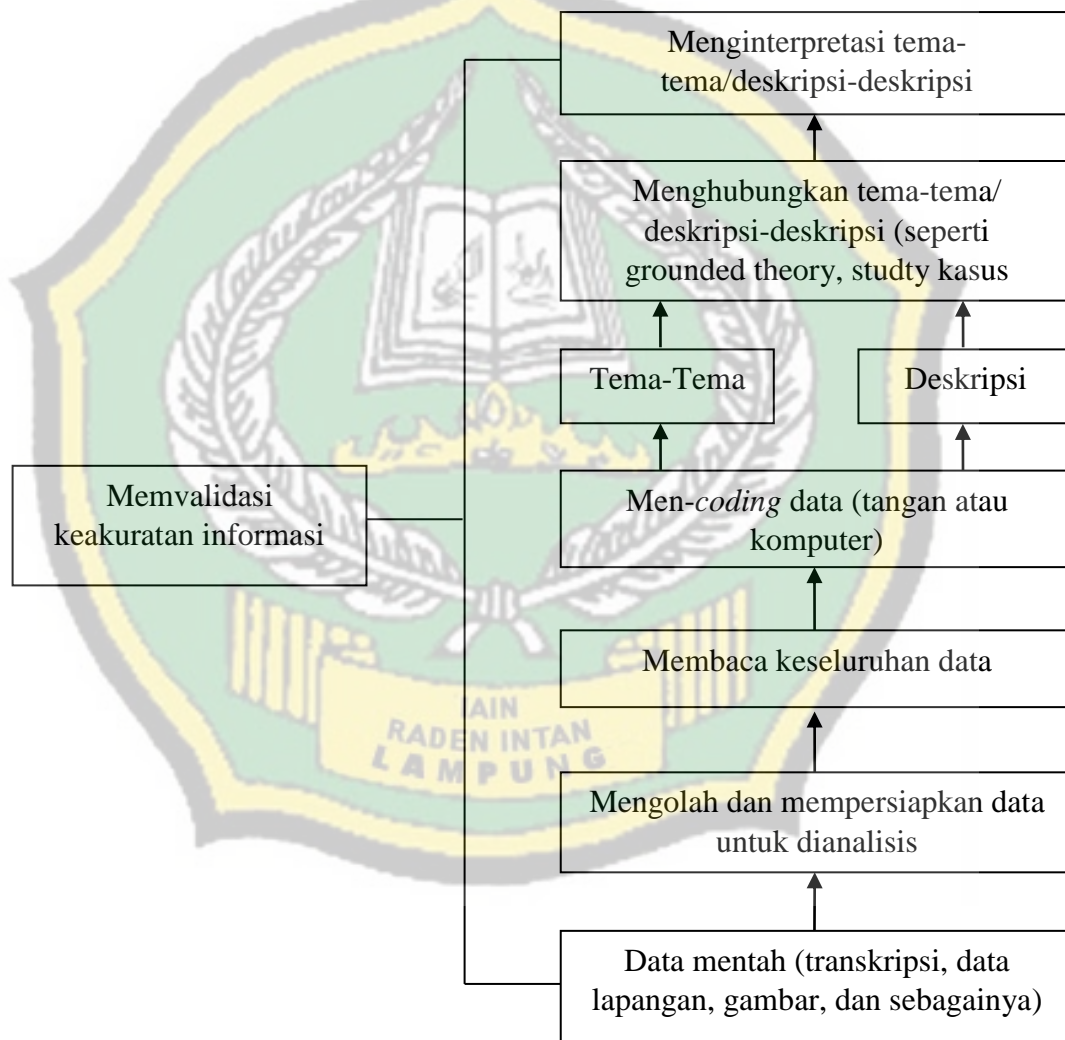
Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Pada langkah ini penulis mentranskripsi data mentah yang diperoleh selama penelitian seperti catatan dan rekaman hasil wawancara, menulis kembali hasil wawancara yang tidak terekam dan tidak tercatat, menulis kembali catatan observasi, memilih data-data

²⁹Wiwin Hendriani, Dua Langkah Analisis Tematik (Boyatzis, 1998), (<https://wiwinhendriani.com/2012/12/17/dua-langkah-analisis-tematik-boyatzis-1998/>), diakses 10 April 2016

³⁰ John W. Creswell, *Op.Cit*, h.276

yang diperoleh melalui buku pedoman umum NUSP-2, Petunjuk Teknis NUAP, Dokumen NUAP yang dibuat oleh masyarakat melalui LKM Sakai Sambayan, serta mempersiapkan foto-foto dokumentasi.

Gambar 1
Analisis Data Penelitian Kualitatif



Sumber Data: John W. Creswell ³¹

³¹ *Ibid*, h.277

Langkah 2. Membaca Keseluruhan Data. Langkah ini membangun *general sense*, gagasan umum yang diperoleh berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Menurut Creswell pada langkah ini peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang diperoleh.³² Dalam hal ini penulis membuat coretan-coretan mengenai hal tersebut pada data yang diperoleh.

Langkah 3. Menganalisis lebih detil dengan meng-*coding* data. Sejumlah peneliti melihat pentingnya meng-*coding* transkrip-transkrip atau informasi kualitatif dengan memakai tangan, atau meng-*coding* skema-skema dengan warna-warna, lalu menuliskan segmen-segmen teksnya ke dalam kartu-kartu kecil.³³

Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraph-paragraf) atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.³⁴

Dalam penelitian ini penulis tidak menguraikan secara detil dan membiakan kode-kode tersebut muncul selama analisis data berdasarkan teori-teori yang ada.

Langkah 4. Merapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian secara detil mengenai peristiwa-peristiwa, lokasi-lokasi dalam *setting* tertentu dikarenakan desain penelitian ini adalah studi kasus. Peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan program NUSP-2 seperti

³² *Ibid*, h.276

³³ *Ibid*, h.281

³⁴ *Ibid*, h.276-278

Survey Kampung Sendiri, Musyawarah Kelurahan, Rembug Khusus Perempuan, Pelaksanaan kegiatan fisik, evaluasi hasil pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Langkah 5. Menyajikan kembali deskripsi dan tema-tema dalam bentuk narasi/ laporan kualitatif untuk menyampaikan hasil analisis. Kemudian untuk data-data yang dapat disajikan dalam tabel atau grafik maka akan disajikan pula dalam bentuk tersebut.

Menurut Creswell, langkah ini meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap dengan subtema-subtema, ilustrasi-ilustrasi khusus, perspektif-perspektif dan kutipan-kutipan), atau hubungan antartema. Para peneliti kualitatif juga dapat menggunakan visual-visual, gambar-gambar, atau tabel-tabel untuk membantu menyajikan pembahasan ini.³⁵

Langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data yaitu menginterpretasi atau memaknai data. Biasanya peneliti kualitatif mengajukan pertanyaan untuk memaknai data dengan pertanyaan, “Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya.³⁶ Hal ini memudahkan penulis untuk memahami makna data yang sebenarnya dan memperoleh kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan.

³⁵ *Ibid*, h. 283

³⁶ *Ibid*, h.284

BAB II

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

A. Konsep Partisipasi Masyarakat

1. Urgensi Partisipasi Masyarakat

Kunci pertama keberhasilan program eksternal atau program dari pemerintah maupun lembaga pemberdayaan lainnya adalah adanya partisipasi masyarakat. Soetomo menyatakan bahwa sebagaimana diketahui, pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan perilaku tersebut.¹ Perubahan dalam hal ini berubah menjadi sikap dan perilaku yang lebih peduli dengan pembangunan.

Lebih lanjut Soetomo menyebutnya sebagai “aktivitas lokal”, yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adanya partisipasi atau aktivitas lokal bertujuan untuk keberlanjutan program pembangunan, tidak hanya ketika ada program saja, melainkan berkelanjutan walaupun program sudah berhenti. Sebagaimana dalam pernyataan berikut.

Pada umumnya memang disadari, bahwa melaksanakan program dari pihak eksternal yang berorientasi pemberdayaan, sehingga akan berdampak pada proses yang berkelanjutan tersebut merupakan hal yang tidak mudah. Yang banyak dijumpai adalah suatu program dari pihak eksternal baik pemerintah maupun non

¹ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, cet.ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.437

pemerintah memang dapat mendorong tumbuhnya aktivitas lokal, tetapi aktivitas lokal tersebut kembali berhenti setelah program dari luar itu dihentikan.²

Berdasarkan pernyataan di atas, jika yang diharapkan adalah keberlanjutan program maka aktivitas lokal tersebut harus mendorong aktivitas lokal berikutnya. Dengan syarat yang diungkapkan oleh Soetomo selanjutnya adalah perlu adanya manfaat yang dirasakan baik pada tingkat warga masyarakat maupun tingkat komunitas, sehingga secara kumulatif akan memperkuat institusi yang mendorong kesinambungan aktivitas tersebut.³

Menurut Isbandi Rukminto bahwa melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan akan menghilangkan dependensi (ketergantungan) masyarakat pada program pembangunan dari pemerintah. Sebagaimana dalam pernyataan berikut.

Jika masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahap dan hanya bersifat pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan oleh pelaku perubahan (misalnya, pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta), masyarakat cenderung akan menjadi *dependent* (tergantung) pada pelaku perubahan.⁴ Masyarakat yang bersifat tergantung hanya akan melakukan aktivitas pembangunan selama ada program dari pemerintah dan ada instruksi dari atas, begitu program berhenti, kegiatan juga akan berhenti.⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa semakin tinggi partisipasi, semakin rendah ketergantungan masyarakatnya. Sehingga semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, semakin menjadikan masyarakat mandiri terhadap pembangunan.

² *Ibid*, h.422-423

³ *Ibid*, h.424

⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas, Pengembangan MPemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. h.110-111

⁵ Soetomo, *Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.356

Apabila partisipasi masyarakat sudah terwujud, kemudian aktivitas lokal mampu mendorong aktivitas lokal berikutnya, maka ada atau tidaknya program dan bantuan dari luar, proses dan aktivitas pembangunan tetap berjalan. Keterlibatan pihak eksternal tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari proses membina dan mengembangkan kemampuan dan potensi masyarakat, sehingga sifatnya bukan merupakan faktor dominan tetapi sekedar mendorong, memberi stimulan, memfasilitasi dan ikut memberikan iklim yang kondusif bagi berkembangnya potensi dari dalam.⁶ Dalam hal ini, bantuan atau program dari luar dapat dianalogikan sebagai *dynamo starter* sebuah mesin mobil. Perannya hanya membantu untuk menghidupkan mesin mobil, setelah mesin hidup, *dynamo starter* tidak diperlukan lagi.

Dengan perkataan lain, tujuan program dari pemerintah atau pihak eksternal adalah terciptanya kondisi yang menggambarkan masyarakat memiliki kemampuan untuk membangun dirinya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan. Apabila program dari luar tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat lokal, pendekatan dan misi yang diemban adalah menolong masyarakat agar kemudian masyarakat tersebut mampu menolong dirinya sendiri.

Selanjutnya, Isbandi Rukminto mengungkapkan bahwa partisipasi tersebut merupakan proses pemberdayaan sebagaimana dalam pernyataan berikut.

Partisipasi digunakan untuk menggambarkan proses pemberdayaan (*empowering proses*). Dalam hal ini, partisipasi dimaknai sebagai suatu proses yang memungkinkan (*enable*) masyarakat lokal untuk melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya

⁶ Soetomo, *Op.Cit*, h.422

diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah yang ingin mereka pilih.⁷

Oleh karena itu, partisipasi erat kaitannya dengan proses pemberdayaan masyarakat, karena dengan partisipasi maka masyarakat bersama-sama untuk turut serta dalam pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan alternatif pemecahan masalah serta pelaksanaan kegiatan. Hal ini karena program yang tidak berorientasi pada pemberdayaan masyarakat tidak akan menghasilkan keberlanjutan, tetapi justru menimbulkan ketergantungan yang justru mencerminkan ketidakberdayaan.⁸

Dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai tindakan bersama melalui aktivitas lokal, telah menjadi proses belajar sosial yang kemudian dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik dalam tindakan bersama dan aktivitas lokal berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat berkedudukan sebagai input sekaligus output.⁹

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan, di lain pihak, juga dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil jika dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan, bahwa pembangunan yang dilakukan memberikan fokus perhatian pada masyarakat bukan semata-mata hasil fisik materiil.

⁷ Isbandi Rukminto Adi, *Op.Cit*, h.108

⁸ Soetomo, *Op.Cit*, h.422

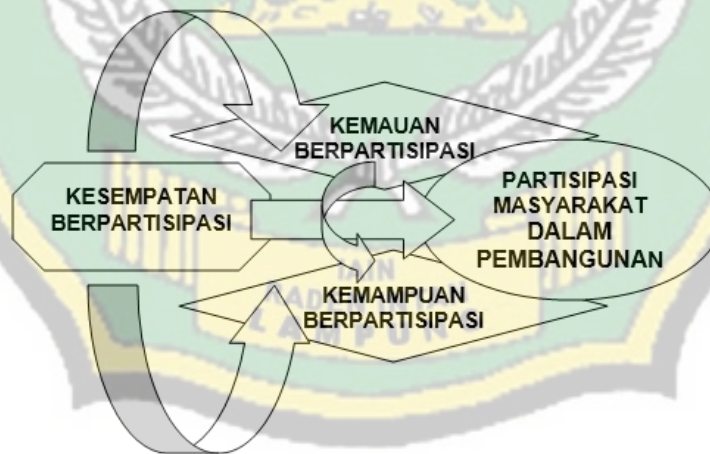
⁹ *Ibid*, h.441

2. Unsur- Unsur Pokok Partisipasi Masyarakat

Slamet menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tentukan oleh tiga unsur pokok yaitu: a) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, b) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, c) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.¹⁰

Hubungan ketiga unsur tersebut yaitu kesempatan, kemauan dan kemampuan agar lebih mudah dipahami maka disajikan pada Gambar 2 tentang Unsur-unsur pokok partisipasi masyarakat berikut.

Gambar 2
Unsur-Unsur Pokok Partisipasi Masyarakat



Sumber Data: Mardikanto dan Poerwoko¹¹

¹⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfa Beta, 2015), h.91

¹¹ *Ibid*, h.91

a. Kesempatan untuk Berpartisipasi

Beberapa kesempatan yang dimaksud di sini adalah:

- 1) Kemauan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan, sejak di tingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah;
- 2) Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan;
- 3) Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan;
- 4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat termasuk peralatan/perlengkapan penunjangnya;
- 5) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan;
- 6) Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.¹²

Berdasarkan keenam point di atas, beberapa kesempatan yang dimaksud agar masyarakat dapat belajar untuk berani mengungkapkan kebutuhannya. Sehingga dengan adanya kesempatan yang diberikan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

b. Kemampuan untuk Berpartisipasi

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan yang dimaksud adalah:

¹² *Ibid*, h.92

- 1) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya);
- 2) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki;
- 3) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.¹³

Berdasarkan ketiga point di atas, kemampuan memahami, melaksanakan dan memecahkan masalah menjadi modal utama bagi partisipasi masyarakat. Kemampuan melaksanakan kegiatan saja tidak cukup tanpa adanya kemampuan memahami peluang yang terbuka. Bagaimana akan berpartisipasi jika tidak tahu ada program pembangunan. Kemudian ada kemampuan memecahkan permasalahan karena kemampuan melaksanakan kegiatan saja tidak cukup. Kemampuan memecahkan masalah diperlukan agar bekerja pada masalah dengan solusi yang tepat, sehingga permasalahan terselesaikan.

c. Kemauan untuk Berpartisipasi

Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental masyarakat, sikap tersebut meliputi;

- 1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan;
- 2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya;
- 3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri;
- 4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah dan tercapainya tujuan pembangunan;
- 5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.¹⁴

¹³ *Ibid*, h.92-93

¹⁴ *Ibid*, h.94

Berdasarkan kelima point di atas, sikap mental yang mempengaruhi kemauan dalam berpartisipasi dapat disimpulkan yaitu didasari oleh sikap untuk terus memperbaiki, mengubah cara berpikir atau cara pandang dan menjunjung kebersamaan dan kemandirian.

Ketiga unsur pokok tersebut di atas, yaitu kesempatan, kemampuan dan kemauan adalah hal mendasar yang harus terpenuhi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah rencana pembangunan yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Tjokroamidjojo keterlibatan masyarakat dapat lebih terlaksana apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan masyarakat terutama yang oleh para cendekiawan akhir-akhir ini dikemukakan perlunya diberikan perhatian terhadap aspek keadilan dan pemerataan pembangunan.¹⁵

Berikut ini diuraikan lebih lanjut terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilihat dari berbagai pendekatan disiplin ilmu, sebagai berikut:

- a) Dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, sangat ditentukan oleh motivasi yang melatar-belakanginya yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan, dan harapan-harapan yang dirasakan;
- b) Secara sosiologis, sikap merupakan fungsi dari kepentingan;

¹⁵ Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta:Gunung Agung, 1980), h.208

Dengan demikian, tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam masyarakat akan sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap tingkat kepentingan dari pesan-pesan yang disampaikan kepadanya;

- c) Menurut konsep pendidikan, partisipasi merupakan tanggapan atau respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan atau stimulus yang diberikan, yang dalam hal ini, respon merupakan fungsi dari manfaat atau *reward* yang dapat diharapkan;
- d) Besarnya harapan dalam konsep ekonomi, sangat ditentukan oleh besarnya peluang dan harga dari manfaat yang akan diperoleh; Tentang manfaat itu sendiri, dapat dibedakan dalam manfaat ekonomi maupun non-ekonomi (yang dapat dibedakan dalam: kekuasaan, persahabatan / kebersamaan dan prestasi).¹⁶

Faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan terdapat dua faktor besar yaitu faktor kebutuhan/kepentingan dan faktor manfaat, sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 3
Faktor-Faktor Pengaruh Partisipasi



Sumber Data: Mardikanto dan Poerwoko¹⁷

Berdasarkan gambar 3, maka program pembangunan yang berbasis partisipasi harus mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang bersangkutan serta seberapa besarkah manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat. Sehingga

¹⁶ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Op.Cit*, h.93-94

¹⁷ *Ibid*, h.93

program yang sesuai dengan kepentingan / kebutuhan masyarakat dan dapat diambil manfaatnya maka akan mempengaruhi sikap masyarakat untuk berpartisipasi.

4. Peran Pelaku Perubahan

Pelaku perubahan (*agent of change*) yang dimaksud adalah pihak eksternal yang mendorong adanya partisipasi masyarakat dan keberlanjutan program. Pelaku perubahan biasanya disebut fasilitator, *community worker* atau pekerja masyarakat, *community advisor* atau pendamping masyarakat, dan sebagainya, tujuannya sama yaitu pemberdayaan masyarakat.

Dalam pembahasan ini, diuraikan dua peran besar bagi pelaku perubahan, yaitu peran fasilitatif dan peran edukasional menurut Jim Ife. Peran-peran tersebut diuraikan pada sub judul berikut.

a. Peran-Peran Fasilitatif

- 1) Animasi Sosial (*social animation*), yaitu kemampuan petugas untuk membangkitkan energi, inspirasi, antusiasme masyarakat. termasuk di dalamnya adalah mengaktifkan, menstimulasi dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.¹⁸
- 2) Mediasi dan Negosiasi (*mediation and negotiation*), yaitu pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi (mediator) bagi kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar dapat tercapai sinergi dalam kelompok tersebut, pelaku perubahan juga harus mampu menengahi dan

¹⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Op.Cit*, h.91

mencari titik temu (negosiator) kelompok-kelompok yang sedang berkonflik tanpa menimbulkan pertentangan dan perpecahan yang lebih dalam.¹⁹

- 3) Pemberi Dukungan (*support*), dukungan tidak selalu bersifat ekstrinsik (materiil), tetapi dapat juga bersifat instrinsik seperti pujian, penghargaan dalam bentuk kata-kata, ataupun sikap dan perilaku yang menunjukkan dukungan dari pelaku perubahan terhadap apa yang dilakukan oleh warga, termasuk memberi waktu bagi mereka apabila ingin berbicara dengannya untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi.²⁰
- 4) Membentuk Konsensus (*building consensus*), yaitu tindakan tertentu untuk memperbaiki kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan keragaman dalam masyarakat tersebut sehingga tercapai rasa saling menghargai keragaman budaya dan pandangan dalam upaya mencari jalan terbaik untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat.²¹
- 5) Fasilitasi Kelompok (*group facilitation*), yaitu memfasilitasi kelompok-kelompok warga agar mau bertindak konstruktif dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh dan bukan sekedar membagun satu atau dua kelompok saja.²²
- 6) Pemanfaatan Sumberdaya dan Keterampilan (*utilization of skills and resources*), yaitu pelaku perubahan harus dapat mengidentifikasi dan

¹⁹ *Ibid*, h.92

²⁰ *Ibid*, h.92-93

²¹ *Ibid*, h.94

²² *Ibid*, h.95

memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumberdaya yang ada di dalam komunitas atau kelompok.²³

- 7) Mengorganisasi (*organizing*), yaitu kemampuan pelaku perubahan untuk berpikir tentang hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, hal mana saja yang tidak perlu dilakukan sendiri, dan memastikan bahwa semua itu mungkin untuk diwujudkan.²⁴

b. Peran-Peran Edukasional

- 1) Membangkitkan Kesadaran Masyarakat (*consciousness raising*), yaitu membantu individu melihat permasalahan, impian, aspirasi, penderitaan ataupun kekecewaan mereka dari perspektif sosial politik yang lebih luas.²⁵ Komponen pertama yaitu membantu masyarakat untuk dapat melihat berbagai alternatif yang ada. Komponen kedua adalah menyadarkan masyarakat tentang struktur dan strategi perubahan sosial di mana warga dapat berpartisipasi dan bertindak secara efektif.²⁶
- 2) Menyampaikan Informasi (*informing*), yaitu menyampaikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh komunitas sarannya. Pelaku perubahan dapat memberikan informasi yang berguna antara lain dengan menggambarkan kesuksesan suatu program yang telah dilaksanakan di daerah lain dengan situasi dan kondisi yang mempunyai kemiripan dengan komunitas sasaran.

²³ *Ibid*, h.95

²⁴ *Ibid*, h.96

²⁵ *Ibid*, h.97

²⁶ *Ibid*, h.98

Meskipun mereka mempunyai perbedaan budaya, kadangkala tetap penting untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan di daerah ataupun negara lain.²⁷

- 3) Mengonfrontasikan (*confronting*), teknik konfrontasi digunakan bila pelaku perubahan telah mempertimbangkan bahwa kalau kondisi yang sekarang terjadi tetap dibiarkan, keadaan akan semakin memburuk.²⁸
- 4) Pelatihan (*training*), merupakan peran edukasional yang paling spesifik, sebagai upaya mengajarkan komunitas sasaran bagaimana cara melakukan sesuatu hal yang akan berguna bagi mereka maupun komunitasnya. Pelaku perubahan belum tentu bertindak sebagai instruktur dalam suatu pelatihan warga, tetapi pelaku perubahan dapat menjadi penghubung guna mencari tenaga yang berkompeten dalam melakukan pelatihan tersebut.²⁹

B. Konsep Pembangunan dalam Islam

Agama Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi semesta alam), tentunya mempunyai aturan mengenai masalah-masalah dalam pembangunan. Lalu apakah mungkin permasalahan-permasalahan dalam pembangunan dapat diatasi dengan menerapkan syari'at Islam? Memang jika syari'at Islam hanya dipahami sebatas kewajiban sholat, puasa, menutup aurat, haji, kemudian *qishas* bagi pelaku kriminal/pembunuhan dan sejenisnya, maka agaknyanya tuduhan bahwa Islam hanya sebatas spiritual cukup mengena, karena memang itu bukan solusi yang Allah berikan

²⁷ *Ibid*, h.99

²⁸ *Ibid*, h.101

²⁹ *Ibid*, h.102

untuk mengatasi masalah di masyarakat atau dalam pembangunan. Sebagai contoh, perkembangan dan perluasan kerajaan Islam di dunia telah meninggalkan gaya arsitektur Islami seperti masjid, gerbang, dan gedung-gedung pertemuan yang indah.

Syari'at Islam ditawarkan kepada manusia sebagai penjelas, rahmat, kabar gembira serta termasuk solusi seluruh problem manusia. Perlu disadari bahwa syari'at Islam berisi tentang aturan-aturan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Pencipta-Nya, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama manusia serta hubungan dengan lingkungan sekitarnya.³⁰

Maka, kalau kemudian terjadi kesemrawutan penataan kota di negara-negara yang mayoritas beragama Islam, janganlah menyalahkan syari'at maupun fikih Islam, warga muslim yang berdiam di lingkungan tersebut yang perlu di bina agar merubah sikap dan bertanggung jawab menjaga, membangun dan merawat kota tempat tinggal. Berikut ini beberapa point pembangunan di lihat dari sudut pandang Islam sebagai upaya penuntasan masalah lingkungan terutama kekumuhan tempat tinggal.

1. Karakter Islami dalam Pembangunan

a. Melakukan Perbaikan

Pembangunan dalam Islam dapat diartikan merubah kondisi yang buruk kepada kondisi yang lebih baik, sejalan dengan yang diungkapkan oleh Soetomo “pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik”.³¹ Karena Allah tidak akan merubah keadaan buruk sampai manusia berusaha untuk berubahnya Sebagaimana dalam Al-Qur'an berikut.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ ...

³⁰ Dyayadi, *Tata Kota Menurut Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2008), h.13

³¹ Soetomo, *Op.Cit*, h.328

...sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS.Ar-Ra'du:11)³²

Berdasarkan ayat tersebut, jika ingin hidup dilingkungan yang baik maka harus ada usaha manusia untuk memperbaikinya, jika ingin kesejahteraan maka harus ada usaha manusia juga. Akan tetapi jangan sampai berbuat kerusakan yang menjadi larangan Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-A'raf: 56)³³

Oleh karena itu, jika ingin selalu dekat kepada Allah maka jadilah orang yang selalu melakukan perbaikan, menargetkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jangan sampai menjadi manusia yang berbuat kerusakan sedangkan dirinya tidak menyadari. Manusia seperti itu benar-benar ada, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang

³² Ibid, h.250

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Special for Women*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an), h.157

mengadakan perbaikan". Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. (QS. Al-Baqarah: 11-12)³⁴

Ayat di atas pada masa Rasulullah ditujukan kepada orang-orang munafik di Madinah yang menampakkan keimanan tetapi dalam hati mereka masih ada keraguan. Oleh karena itu, jika tidak mau disebut sebagai orang munafik maka jangan berbuat kerusakan. Adapun kerusakan di sini dapat diartikan secara luas. Contoh, dengan alasan demi meningkatkan kemakmuran bangsa kemudian bebas melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa kearifan lokal. Hal ini sebenarnya sudah terjadi pada masa sekarang, eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, bahkan dilakukan oleh swasta dari negeri asing, tentunya keuntungan yang didapat bukan untuk kemakmuran bangsa sendiri, melainkan kemakmuran individu pemilik modal.

Maka, wajar jika terjadi kerusakan, bencana, dan kemiskinan yang semakin kompleks untuk dituntaskan, semua itu karena manusia berbuat kerusakan sehingga Allah menimpakan akibat dari perbuatannya.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Rum: 41)³⁵

Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan lingkungan, karena itulah, tugas manusia adalah menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan agar tetap serasi dan

³⁴ Ibid, h.3

³⁵ Ibid, h.408

seimbang dalam suasana ekologis yang harmonis.³⁶ Maka, perbaikan yang seharusnya adalah perbaikan pola perilaku merusak menjadi perilaku yang memelihara, menjaga keseimbangan lingkungan serta memanfaatkannya tanpa mengeksploitasi. Karena segala sesuatu yang telah Allah ciptakan adalah untuk manusia, agar dapat diambil manfaatnya serta pelajaran di dalamnya, hanya saja Allah tidak menyukai sikap berlebih-lebihan.

b. Budaya Musyawarah

Dalam perspektif Islam proses pengambilan keputusan biasa disebut dengan “musyawarah”. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah *Shallallahu’alaihi wa Sallam* ketika hendak perang Uhud.

Rasulullah mengemukakan strategi perang kepada para sahabat, strategi yang dikemukakan oleh beliau adalah tidak keluar dari Madinah. Kaum Muslimin akan bertahan di sana. Apabila Kaum Musyrikin tidak melakukan serangan maka dibiarkan saja. Tetapi jika mereka menyerang dan masuk ke dalam kota Madinah maka orang-orang Muslim akan menyerbu mereka dari mulut-mulut gang dan para wanita akan melancarkan serangan dari atap rumah.³⁷

Pendapat tersebut disetujui oleh Abdullah bin Ubay, tetapi kemudian para sahabat mengusulkan untuk tetap pergi berperang dan yang paling bersemangat di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib.

“Wahai Rasulullah, hari seperti ini yang telah kami nanti-nantikan adalah kami berdo’a kepada Allah. Dia telah menuntun kami dan tempat yang kami tuju sudah dekat. Keluarlah untuk menghadapi mereka. Sungguh kami tidak merasa gentar terhadap mereka.”

³⁶ Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h.235

³⁷ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Shahih Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Zenal Mutaqin, cet.ke-4, (Bandung: Penerbit Jabal, 2013), h.317

“Demi Dia yang menurunkan Kitab kepada engkau, aku tidak akan memakan makanan ini hingga aku membabat mereka dengan pedangku di luar Kota Madinah.”³⁸

Kemudian Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam* menerima pendapat sahabatnya dan mengesampingkan pendapatnya sendiri. Ditetapkanlah keputusan perang keluar dari Madinah dan bertempur di medan terbuka. Kekalahan terjadi pada pihak kaum muslimin, tetapi Rasulullah tidak menyesali hasil musyawarah walaupun beliau berduka cita atas syahidnya paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib, karena musyawarah adalah perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 159 berikut;

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS.Al-Imran: 159)³⁹

Kemudian dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura' ayat 38 juga diperintahkan bermusyawarah untuk memutuskan suatu urusan.

...وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ...

“...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka... (QS. Asy-Syura':38)⁴⁰

³⁸ *Ibid*, h.318

³⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.71

⁴⁰ *Ibid*, 487

Kedua ayat tersebut mengajarkan tentang etika dalam mengambil keputusan, yaitu dengan bermusyawarah. Pada QS. Al-Imran ayat 59 di atas, Allah mengajarkan agar dalam bermusyawarah senantiasa menjaga kelembutan hati dan saling memaafkan, karena ada kemungkinan dalam bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat dan menyinggung perasaan orang lain walaupun tidak sengaja.

Jika sudah diperoleh kesepakatan, maka selanjutnya adalah bertawakkal dan melaksanakan hasil musyawarah, walaupun hasilnya tidak sesuai harapan, sebagaimana dalam kisah perang uhud di atas. Maka tugas selanjutnya mengambil pelajaran dari kesalahan agar tidak terulang kembali.

Oleh karena itu, dalam kegiatan pembangunan yang berdampak pada urusan masyarakat maka sudah selaknya masyarakat ikut terlibat dalam upaya merumuskan pemecahan masalah yang sedang dihadapi disertai etika-etika tersebut dan bertawakkal kepada Allah atas hasil musyawarah.

c. Etos Kerja

Islam memberi perhatian yang cukup besar pada masalah bekerja. Allah dan Rasulullah *Shalallahu'alaihi wa Sallam* telah menggariskan tentang pentingnya bekerja. Bekerja terlebih dahulu baru kemudian mengharapkan balasan.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu

*diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS.At-Taubah: 105)*⁴¹

Ayat di atas menjelaskan kepada kita untuk mendahulukan kerja, adapun penilaian akan muncul dengan sendirinya setelah bekerja. Baik atau buruk penilaian hasil pekerjaan hanyalah masalah perspektif, tergantung dari siapa yang menilai. Oleh karena itu, orang beriman mengutamakan penilaian Allah daripada penilaian manusia. Tetap bekerja dengan kesungguhan, sebagaimana perintah pada ayat berikut.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

*“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (sungguh urusan yang lain)” (QS.Al-Insyirah: 7)*⁴²

Bekerja pada ayat di atas lebih dipertegas lagi oleh Allah, yaitu kerja keras, selesai satu urusan, lanjutkan dengan urusan yang lain. Dapat juga diambil hikmah bahwa seharusnya umat Islam tidak cepat puas dengan hasil usahanya, bukan berarti tidak bersyukur, tetapi untuk memotivasi untuk terus lebih baik. Berikut ini adalah perintah Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam* kepada umat Islam.

*“Bersungguh-sungguhlah mengupayakan apa-apa yang bermanfaat untukmu, memohonlah kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah (pesimis)” (HR. Muslim).*⁴³

Berdasarkan hadits di atas, dipahami bahwa segala sesuatu yang bermanfaat harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Jika menjadi Muslim berharta menjadi lebih bermanfaat, maka harus bersungguh-sungguh meraihnya. Jika pembangunan infrastruktur mampu membawa kebermanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat,

⁴¹ *Ibid*, h.203

⁴² *Ibid*, h.505

⁴³ Abu Umar Abdillah, *Muslim Hebat*, (Sukoharjo: CV Arrisalah Cipta Media, 2014), h.32

maka juga harus diusahakan sungguh-sungguh. Sehingga hadits di atas tidak hanya dimaknai untuk urusan agama saja, melainkan berlaku pula untuk urusan duniawi.

Dyayadi mengungkapkan bahwa Islam menghendaki umatnya kreatif, bekerja keras dan produktif. Dengan bekerja keras dan berdo'a, Allah akan mengubah nasib seseorang dan Allah yang Maha Kaya akan menambah rezeki seseorang.⁴⁴

Pada dasarnya etos kerja dipengaruhi oleh cita-cita. Semakin tinggi cita-cita semakin tinggi etos kerja, karena cita-cita yang tinggi mampu menghapus rasa malas. Berikut ini adalah kisah generasi tabi'in (generasi kedua umat Islam) terkait cita-cita.

Di dekat Rukun Yamani, duduk empat remaja yaitu Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubeir dan Abdul Malik bin Marwan.

Abdullah bin Zubair angkat bicara, "Cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi Khalifahnyanya." Saudaranya, Mus'ab menyusulnya, "Keinginanku adalah dapat menguasai dua wilayah Irak dan tak ada yang merongrong kekuasaanku." Adapun Abdul Malik bin Marwan berkata, "Bila kalian berdua merasa cukup dengan itu maka aku tidak puas sebelum bisa menguasai seluruh dunia dan menjadi Khalifah setelah Mu'awiyah bin Abi Sufyan." Sementara itu Urwah diam seribu bahasa, lalu semua mendekat dan bertanya, "Bagaimana denganmu, apa cita-citamu kelak wahai Urwah?"

Beliau berkata, "Semoga Allah memberkahi cita-cita kalian dalam urusan dunia. Aku ingin menjadi 'alim (orang berilmu dan beramal), sehingga orang-orang akan belajar dan mengambil ilmu tentang kitab Rabb-Nya, Sunnah Nabi-Nya, dan hukum-hukum agama dariku. Lalu aku berhasil di akhirat dan memasuki jannah dengan ridha Allah.

Pada gilirannya, Abdullah bin Zubair menjadi penguasa Hijaz, Mesir, Yaman, Khurasan dan Irak yang pada akhirnya terbunuh di Ka'bah, tak jauh dari tempatnya mengungkapkan cita-citanya. Mus'ab bin Zubair telah menguasai Irak sepeninggal saudaranya Abdullah, dan akhirnya terbunuh ketika mempertahankan wilayah kekuasaannya. Malik bin Marwan, akhirnya menjadi khalifah setelah ayahnya wafat dan bersatulah kaum muslimin. Dia berhasil menjadi raja dunia terbesar pada masanya. (*Shuwaru min hayaatit tabi'in*).

Begitupun dengan Urwah bin Zubeir. Beliau menjadi ulama panutan di zamannya. Ibnu Sa'ad dalam thabaqat kedua dari penduduk Madinah

⁴⁴ Dyayadi, *Op.Cit*, h.166

menyebutkan, “Urwah adalah seorang yang tsiqah, banyak meriwayatkan hadits, faqih, tsabit dan bisa dipercaya.” (Kitab at-Tahdzib).⁴⁵

Kisah di atas dapat diambil hikmah bahwa mereka tidak mungkin meraih cita-cita yang tinggi dengan etos kerja yang rendah. Sudah pasti mereka berusaha keras untuk mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu, hidup di lingkungan yang nyaman, bersih dan bebas kumuh layaknya cita-cita yang harus diusahakan sungguh-sungguh. Sehingga tidak perlu bergantung pada program pemerintah.

d. Budaya Bersih

Hukum fiqh Islam telah mengenal budaya bersih yang dikenal dengan istilah *thaharah*, artinya sebelum melaksanakan ibadah seseorang yang beragama Islam diwajibkan suci dari najis (kotoran) baik dengan cara dicuci, mandi berwudhu maupun tayamum. Berarti Islam mengajarkan pemeluknya memiliki budaya bersih termasuk bersih dari sampah.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda;

الْإِسْلَامُ نَظِيفٌ فَتَنْظِفُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ (رواه البيهقي)

“Islam itu bersih dan tidak akan masuk surga kecuali yang bersih.” (HR. Bihaqi).⁴⁶

Kemudian dalam hadits berikut Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* lebih spesifik lagi menggambarkan anjuran menjaga kebersihan bagi umat Islam.

⁴⁵ Abu Umar Abdillah, *Op.Cit*, h.27-28

⁴⁶ Anca Oktaria, 10 Hadits tentang Kebersihan, (<http://www.muslimdaily.net/artikel/10-hadist-tentang-kesehatan-dan-kebersihan.html>), diakses 4 September 2016

عَنْ سَعْدِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ
الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرِيمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَظَفُّوا
أَفْنِيَتَكُمْ (رواه الترمذی)

*“Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari ayahnya, dari Rasulullah “
Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha
Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan,
Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-
tempatmu.” (HR. Tirmizi)⁴⁷*

Kedua hadits di atas mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan dengan jaminan surga. Bahkan kebersihan yang harus dijaga bukan hanya kebersihan fisik maupun lingkungan melainkan juga kebersihan hati.

Beralih pada masalah sampah, karena masalah ini sangat sensitif terhadap kebersihan. Misalnya sampah yang bertumpuk di pinggir jalan, masuk ke dalam drainase, lalat berkerumum, polusi bau, tentu mengganggu keindahan/ estetika.

Dyayadi berpendapat bahwa masalah sampah adalah suatu masalah yang meliputi dan melibatkan suatu sistem dalam arti luas yang mencakup sub-sub sistem yang saling berkaitan dan saling berpengaruh secara totalitas akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan. Sub-sub sistem tersebut meliputi masyarakat (peran aktif masyarakat), prasarana dan sarana, sanksi hukum dan dana. Tentunya selain sub-sistem tersebut, masih ada sub-sub sistem lain yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan masalah sampah.⁴⁸

Berdasarkan pendapat di atas, sangat penting untuk melibatkan masyarakat dalam menuntaskan masalah sampah. Tidak hanya dibebankan kepada Dinas Kebersihan, karena sampah-sampah tersebut sebagian besar berasal dari limbah

⁴⁷ Nurrohmah, Hadits Tentang Kebersihan, (<http://www.edukasi.in/2015/08/hadits-tentang-kebersihan.html>) diakses, 4 September 2016

⁴⁸ *Ibid*, h.208

rumah tangga, misalnya sampah organik sisa makanan dan sampah anorganik seperti kaleng dan plastik.

Peran serta masyarakat meliputi kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah tidak pada tempatnya, membungkus sampah dengan kantong plastik, membuang sampah pada jadwal yang telah ditetapkan dan sebagainya. Pada peran pengelolaan sampah, maka masyarakat dapat dilibatkan dalam mereduksi sampah, pemakaian kembali, daur ulang, pemisahan antara sampah organik dan sampah non-organik, serta sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).⁴⁹

Jika ada ajaran “Bersih pangkal Sehat”, maka Islam sudah lebih dahulu mengajarkan pentingnya kebersihan. Tetapi jika banyak umat Islam tidak memperhatikan kebersihan maka karakter manusianya yang perlu diperbaiki, diperlukan adanya penyadaran terus menerus terkait pola hidup bersih dan sehat.

2. Membangun Fasilitas Umum

Pada sub judul ini disajikan ringkasan pembangunan kota pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Contoh paling menonjol adalah pembangunan kawasan perumahan bagi kaum muslimin di daerah yang ditaklukkan. Di antara kota penting yang dibangun pada masa Umar adalah Kuffah, Basrah, Mosul, dan Fusthath.⁵⁰

Umar sangat memperhatikan kondisi suatu kota, dan dalam membangun kota sangat memperhatika kriteria-kriteria suatu daerah. Maka suatu ketika Umar mendapat surat dari Utbah bin Ghazwan yang menjelaskan kondisi Kota Basrah, beliau mengatakan, “Ini daerah bagus, dekat sumber air, tempat pengembalaan dan kayu bakar.”⁵¹ Kemudian ketika Umar mengetahui keadaan Kota Irak pada masa itu, keadaan Irak juga menjadi kacau, semua fasilitas umum rusak, produksi dan hasil bumi terlantar. Oleh sebab itu, Umar ingin mencurahkan segala perhatiannya kepada upaya perbaikan segala fasilitas umum di Irak.⁵² Umar lalu mengerahkan pembantu-pembantunya untuk memperbaiki prasarana jalan,

⁴⁹ *Ibid*, h.209-210

⁵⁰ *Ibid*, h.87

⁵¹ *Ibid*, h.88

⁵² *Ibid*, h.94

mengatur perairan (irigasi) supaya air dapat mencapai setiap sudut tanah pertanian produktif. Semua bangunan yang roboh atau rusak akibat perang di segala penjuru negeri diperbaiki kembali.⁵³

Oleh karena itu, fasilitas umum, sarana/prasarana yang dibangun oleh Khalifah Umar yang paling penting adalah jalan dan perairan. Jalan merupakan sarana yang urgen, karena memudahkan mobilisasi dan penyebaran barang, kendaraan dan orang serta unsur-unsur pasar dan menjadi tempat peredaran hasil produksi.⁵⁴ Selain jalan, Khalifah Umar membangun bendungan untuk mencegah bahaya banjir, memberikan penerangan (lampu) untuk menerangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dibangun pula rumah tamu (*guest home*) untuk para tamu dari berbagai daerah yang datang ke Madinah.

3. Memperhatikan Sumber Air

Lingkungan pemukiman yang baik memiliki sumber air yang bersih. Karena Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi umat Islam untuk *taharah* ketika hendak sholat, *Istinja'*, mandi, mencuci, minum, dll, bahkan seluruh makhluk hidup di bumi ini pasti membutuhkan air. Hikmah pentingnya air dapat dipelajari dari perang Badar berikut ketika jumlah pasukan kaum muslimin jauh lebih sedikit dibanding jumlah pasukan kafir Quraisy. Berikut ini kisah sebelum Perang Badar.

“Wahai Rasulullah, jika ini strategi yang lahir dari pendapatmu dan bukan merupakan wahyu, maka menurutku kita harus berhenti di tepi sebelah sana sehingga kita lebih dekat dari mereka. Kita timbun kolam mereka, lalu kita penuh kolam kita dengan air, sehingga mereka tidak bisa menjangkaunya. Ketika

⁵³ *Ibid*, h.95

⁵⁴ *Ibid*, h.96

perang, kita bisa minum dengan leluasa, tetapi mereka kesulitan mendapatkan air sehingga tidak bisa minum.” Rasulullah berkata, ”pendapatmu sangat tepat”⁵⁵

Pada akhirnya perang badar dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin yang menguasai posisi strategis dekat dengan sumber air.

Dalam suatu riwayat, Utsman bin Affan sampai-sampai membeli sebuah sumur milik orang Yahudi di Madinah. Sumur itu dikenal dengan *Raumah*. Orang Yahudi pemilik air itu sangat kikir dan menjual air dengan harga mahal kepada umat Islam. Oleh sebab itu, Utsman membeli sumur tersebut dengan harga cukup mahal selanjutnya dibagi-bagikan gratis kepada umat Islam, bahkan umat Yahudi lainnya yang tidak memiliki sumur juga diberi secukupnya.⁵⁶

Uraian tersebut menggambarkan kepada kita bahwa betapa pentingnya air dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman,

...وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?” (QS. Al-Anbiya: 30)⁵⁷

Hikmahnya dalam keadaan apapun manusia selalu membutuhkan air karena menjadi sumber kehidupan. Jika tidak ada air maka tidak ada kehidupan. Bukankah tercemarnya air juga menjadi sumber penyakit? Oleh karena itu, kekurangan air, kesulitan mendapat air bersih dalam suatu pemukiman penduduk tentu akan menimbulkan permasalahan terutama masalah kesehatan dan ibadah.

⁵⁵ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Op.Cit*, h.266

⁵⁶ Dyayadi, *Op.Cit*, h.241-242

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.324

4. Membangun Kota Hijau

Kota Hijau (*Green City*) mengandung makna bukan sekedar kota hijau melainkan kota yang ramah lingkungan. Kawasan hijau perkotaan penting untuk memberikan kenyamanan dan membersihkan udara dari polusi, dan dapat mencegah terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam* menganjurkan umatnya untuk menanam pohon, walaupun kelak tidak dapat menikmati hasil kayu atau buahnya. Dari Anas bin Malik *Rodhiyallahu 'Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

“Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/ tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya.” (HR. Imam Bukhari hadits no.2321)⁵⁸

Dalam Sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam* juga memberikan contoh Kota Madinah, beliau melarang penebangan atau merusak/ mengganggu lingkungan kota tersebut. Beliau *Shallallahu'alaihi wa Sallam* bersabda,

“Kota Madinah suci dari batas situ hingga ke situ. Pohon-pohonnya tidak boleh ditebang dan tidak boleh melakukan kejahatan di dalamnya. Barangsiapa melakukan kejahatan, ia akan mendapatkan kutuk Allah, kutuk Malaikat, dan manusia seluruhnya.” (HR.Al-Bukhari)⁵⁹

Indahnya Islam telah memberikan pengajaran bahwa menebang pohon yang terdapat dalam kota (Kota Madinah) dalam kasus di atas berarti perbuatan

⁵⁸ Abu Abdilbarr, Hadits Anjuran Bercocok Tanam (bagian 1), (<https://abuabdilbarr.wordpress.com/2007/12/07/anjuran-islam-untuk-bercocok-tanam-1/>), diakses 4 September 2016

⁵⁹ Dyayadi, *Op.Cit*, h.119

dosa/terlarang. Padahal saat Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam* masih hidup di kota Madinah belum ada mobil, sepeda motor, bus kota dan sebagainya yang menimbulkan polutan karbon monoksida, namun Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam* telah menunjukkan mukjizatnya bahwa nanti pepohonan sangat dibutuhkan bukan saja di Madinah tetapi juga di lingkungan sekitar pemukim.

Sebagai umat Islam seharusnya menjadi pelopor dalam menjaga kelestarian lingkungan, karena dalam berbagai ayat Al-Qur'an Allah telah melarang umat Islam untuk merusak ekosistem atau lingkungan hidupnya. Allah *subhanahu wa Ta'ala* menegaskan dalam al-Qur'an surat an-Naml ayat 60.

أَمْنَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ
بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ ﴿٦٠﴾

“Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran)” (QS. An-Naml: 60)⁶⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa taman, kebun atau pepohonan akan membawa keindahan dan perlu dilestarikan. Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam* telah mengajarkan kaum muslimin supaya tidak suka menebang pohon yang tumbuh dalam kota, justru seharusnya kita gemar menanam pepohonan yang dampaknya akan menciptakan kota hijau, sejuk, asri dan mengurangi polusi udara.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.382

BAB III

PROGRAM NUSP-2 DI GEDONG PAKUON

A. Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2)

1. Pengertian NUSP-2

- a. NUSP-2 adalah program penanganan kawasan pemukiman kumuh diperkotaan yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk menjamin terlaksananya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan serta berpihak kepada masyarakat miskin.
- b. NUSP-2 dilaksanakan berbasis pemberdayaan masyarakat dan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan daerah. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok yang memecahkan berbagai persoalan yang terkait dengan peningkatan kawasan pemukiman. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.¹

¹ Pedoman Umum, *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2)*, (Kemen PU dan Perumahan Rakyat :2015), h.3

2. Konsep Dasar

Bagian mendasar dari program NUSP-2 adalah Pembangunan berbasis/ digerakkan oleh masyarakat atau *Community Driven Development* (CDD) dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk membuat keputusan sendiri tentang kebutuhan investasi dan prioritas mereka dalam rangka penanganan permukiman kumuh yang ada di lingkungan mereka.

CDD merupakan pendekatan untuk meringankan masalah fisik lingkungan permukiman di perkotaan seperti perumahan yang tidak aman (tidak layak huni), defisiensi infrastruktur, dan utilitas, serta mendukung elemen tidak terukur dari pemberdayaan masyarakat kolektif, penguatan jaringan sosial dan mendukung komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dengan lembaga pemerintah.

Implementasi CDD dalam NUSP-2 harus memperhatikan 4 hal pokok:

- a. Efektivitas pelaksanaan sosialisasi dalam membangun kesadaran dan pemahaman dasar masyarakat terhadap proses-proses NUSP-2, pendanaan dan pelaksanaan proyek;
- b. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, proses pengambilan keputusan, dan kegiatan pelaksanaan proyek;
- c. Inklusivitas partisipasi perempuan;
- d. Sejauh mana kegiatan NUSP-2 telah memenuhi harapan dan kebutuhan warga miskin terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman dimana mereka tinggal.²

Basis utama pendekatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada matrik berikut, yang menjelaskan tentang konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kaitannya dengan komponen dalam NUSP-2.

² Petunjuk Teknis, Penyusunan *Neighborhood Upgrading and Action Plan (NUAP)*, Kemen PU dan Perumahan Rakyat, h.1-2

Matriks 1
Basis Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Basis	Kegiatan	Intervensi
Kebutuhan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Refleksi permasalahan lingkungan permukiman • Membangun visi kedepan permukiman yang aman dan layak huni bagi semua 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Lingkungan • Bantuan Teknis Lingkungan Permukiman • Pendampingan
Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Penghimpunan kemampuan sumber daya yang dimiliki masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Pengetahuan/Ketrampilan Kewirausahaan • Sosialisasi program
Pengelolaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sumber daya masyarakat • Pengembangan kemampuan manajemen masyarakat • Penguatan Institusi BKM • Pencegahan kumuh baru 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan pengelolaan Lingkungan Permukiman (Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengawasan, Pengaturan)

Sumber Data: Juknis Penyusunan NUAP

Konsep pemberdayaan sebagaimana tersebut di atas memberikan landasan yang kokoh pada komponen program NUSP-2 berikut :

- 1) Memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat yang bersifat hibah untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman kumuh;
- 2) Memfasilitasi pembangunan kawasan permukiman baru bagi MBR dan pengembangan akses fasilitas kredit kepemilikan rumah yang terjangkau bagi MBR; dan
- 3) Memberikan bantuan teknis, berupa:
 - a) Pengorganisasian masyarakat, melalui kelembagaan di tingkat komunitas.
 - b) Penguatan kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah dibidang pengelolaan pembangunan perkotaan yang memihak kepentingan warga miskin (*pro-poor urban development*).³

Pendekatan partisipasi masyarakat ditentukan oleh eksistensi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang bekerja secara sukarela, yang memiliki

³ *Ibid*, h.4

pemimpin/pengurus terpilih dan terpercaya. LKM semacam sistem *de facto* perwakilan yang menyusun rencana pengembangan masyarakat untuk memandu kegiatan, membentuk sebuah tim/unit yang bertugas untuk melaksanakan administrasi dan pelaksanaan kegiatan proyek.

LKM menerima dana BLM dari NUSP-2 dan mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu dan mandiri menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan permukiman yang dihadapinya. Disamping LKM, keberadaan relawan atau tenaga penggerak masyarakat juga memainkan peran penting, termasuk dalam perencanaan, pengadministrasian, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur.⁴

3. Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP)

Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) atau Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (RAPL) adalah suatu proses partisipatif untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi dan menyusun alokasi sumber daya, kerjasama individu, masyarakat, dan pemerintah daerah.⁵ Proses penyusunan dokumen NUAP dimaksudkan untuk memberdayakan dan memastikan partisipasi aktif seluruh kelompok dalam masyarakat, khususnya kelompok perempuan dan kelompok minoritas/warga miskin yang sering terabaikan. Proses ini membutuhkan bantuan dan dukungan dari Konsultan Manajemen Wilayah (RMC) dengan seluruh perangkat di bawahnya yaitu: Koordinator Kota (Korkot) dan Tim Pendamping Masyarakat (*Community Advisors*).

⁴ Natsir, Ketua Koordinator LKM Sakai Sambayan, Wawancara 26 Juni 2016

⁵ Petunjuk Teknis, *Op.Cit*, h.6

Secara umum form NUAP terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah data profil dan peta kondisi kawasan/lingkungan permukiman kumuh sesuai hasil SKS. Bagian kedua adalah usulan rencana aksi perbaikan lingkungan (NUAP) tingkat kelurahan yang merupakan hasil analisis kondisi lingkungan permukiman kumuh dan usulan penanganan kumuh sesuai hasil kesepakatan rembuk warga melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dikoordinir UPL di tingkat Lingkungan atau Rukun Warga (RW) dimana lokasi permukiman kumuh berada. Setelah hasil SKS disusun, maka masyarakat penerima manfaat harus dilibatkan untuk turut serta membahas penetapan urutan prioritas program, besaran swadaya yang mampu disiapkan warga, potensi sumber daya yang dimiliki baik biaya, material, peralatan maupun tenaga kerja.

Usulan pembangunan/perbaikan infrastruktur lingkungan permukiman kumuh yang telah dirumuskan dalam dokumen NUAP, selanjutnya dikonsolidasikan di tingkat kabupaten/kota sehingga dapat disusun rencana investasi penanganan kumuh kota (*Consolidated Investment Plan*) yang akan difasilitasi melalui program NUSP-2. Integrasi dan konsolidasi NUAP di tingkat kabupaten/ kota menjadi dokumen SIAP (*Slum Improvement Action Plan*) yang juga dilengkapi dengan Memorandum Program Rencana Penanganan Kumuh Kota yang tidak hanya mencakup penanganan masalah rencana perbaikan kawasan/lingkungan, tetapi juga rencana perbaikan perumahan, layanan sosial dan ekonomi serta rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan kumuh baru di perkotaan.

Alokasi dana investasi dari NUSP-2 digunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik, yang akan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor), bergantung pada jenis dan tingkat kesulitan atau kompleksitas pekerjaan. NUAP disusun dalam rangka mewujudkan “Kota Bebas Kumuh” pada tahun 2019.

Adapun komponen yang dapat diusulkan dalam dokumen NUAP berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan ADB (Asian Development Bank) mencakup 7 hal pokok yaitu:

- 1) Jalan Setapak,
- 2) Jalan Lingkungan,
- 3) Drainase Mikro,
- 4) Persampahan,
- 5) Sanitasi,
- 6) Air Bersih, dan
- 7) Lampu Penerangan Jalan.⁶

Disamping jenis-jenis konstruksi dari komponen infrastruktur tersebut di atas, masyarakat juga dapat mengusulkan komponen infrastruktur dengan konstruksi yang lebih kompleks yang pengerjaannya membutuhkan peralatan/material khusus dan hanya dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor). Komponen infrastruktur tersebut pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.⁷ Kemudian jenis konstruksi yang dapat diusulkan lebih rinci terkait dimensi atau ukuran jenis konstruksi berdasarkan bahan material dapat dilihat pada Lampiran VI.

⁶ *Ibid*, h.10

⁷ *Ibid*, h.12

4. Tahap Kegiatan NUSP-2 Tingkat Kelurahan

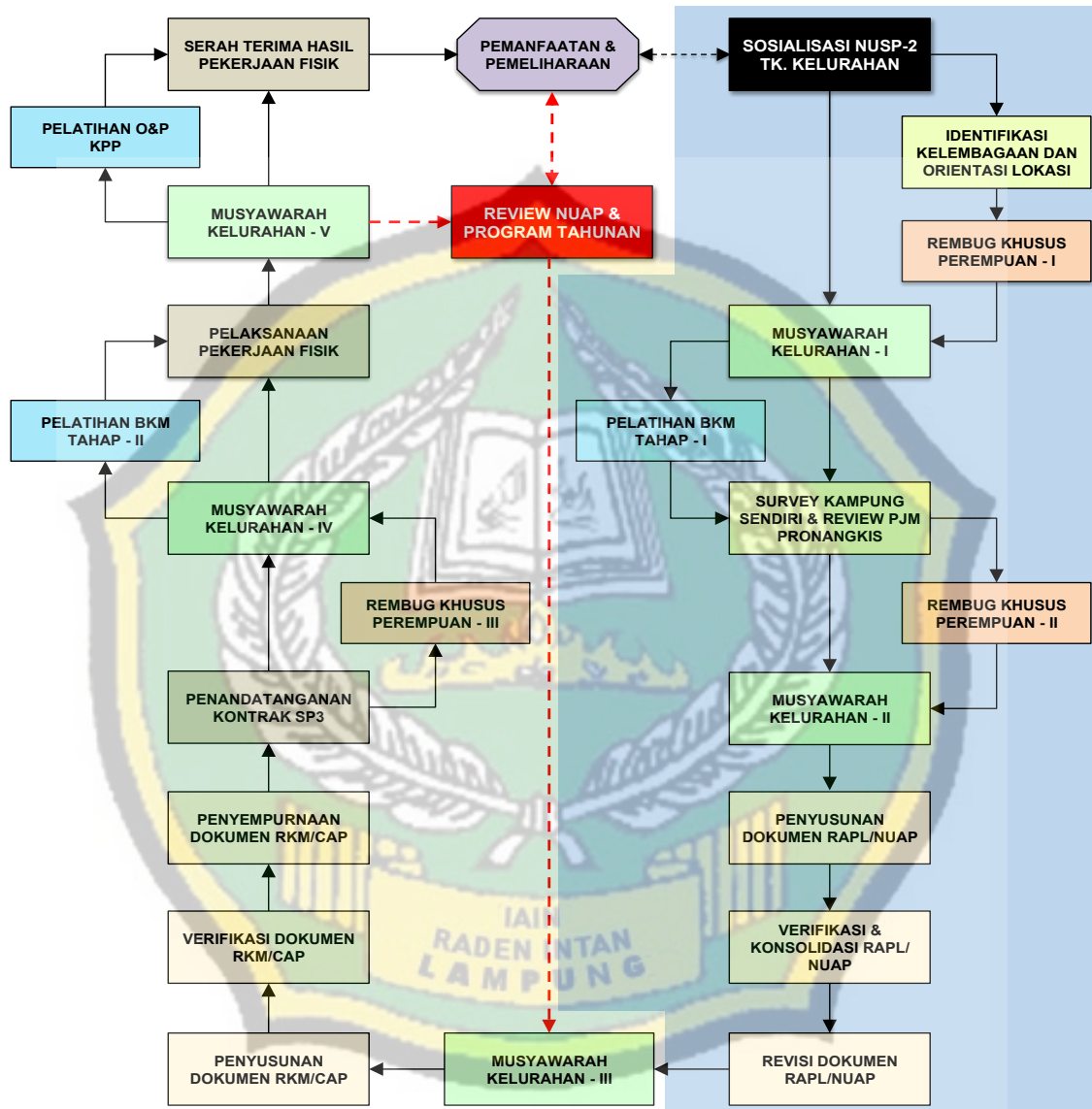
Tahapan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan terdiri dari lima tahapan utama, yaitu: (i) Tahap Persiapan dan Pengorganisasian Masyarakat; (ii) Tahap Survey dan Identifikasi; (iii) Tahap Perencanaan; (iv) Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Fisik; dan (v) Tahap Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur.⁸ Setiap tahap terdapat kegiatan-kegiatan pelaksanaan program yaitu sebagai berikut.

- 1) Tahap Persiapan dan Pengorganisasian Masyarakat, terdiri dari kegiatan:
 - a) Sosialisasi program NUSP-2 tingkat kelurahan
 - b) Identifikasi dan penilaian kelembagaan masyarakat
 - c) Rembug Khusus Perempuan I
 - d) Musyawarah Kelurahan I
 - e) Pelatihan dan penguatan BKM/LKM
- 2) Tahap Survey dan Identifikasi, terdiri dari kegiatan:
 - a) Survey Kampung Sendiri
 - b) Kajian PJM Pronangkis
 - c) Rembug Khusus Perempuan II
- 3) Tahap Perencanaan, terdiri dari kegiatan:
 - a) Musyawarah Kelurahan II
 - b) Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (dokumen NUAP)
 - c) Verifikasi dan Konsolidasi RAPL/NUAP
 - d) Musyawarah Kelurahan III
 - e) Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat/ *Community Action Plan* (RKM/CAP)
- 4) Tahap Pelaksanaan Fisik, terdiri dari kegiatan:
 - a) Panandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)
 - b) Rembug Khusus Perempuan III
 - c) Musyawarah Kelurahan IV
 - d) Pelatihan dan Penguatan BKM/LKM
 - e) Pelaksanaan Pekerjaan Fisik
- 5) Tahap Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur, terdiri dari kegiatan:
 - a) Musyawarah Kelurahan V
 - b) Serah terima hasil pekerjaan
 - c) Pelatihan KPP (Kelompok Penerima dan Pemanfaat)
 - d) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur

⁸ Pedoman Umum, *Op.Cit*, h. 45

Gambar 4

SIKLUS KEGIATAN NUSP-2 TINGKAT KELURAHAN/MASYARAKAT



Sumber Data: Pedoman Umum NUSP-2 dan Juknis NUAP

Penjelasan lebih lanjut terkait masing-masing kegiatan lihat lampiran VII

Pedoman Umum NUSP-2. Kemudian kegiatan- kegiatan tersebut disajikan dalam

bagian siklus kegiatan NUSP-2 tingkat kelurahan/masyarakat, dapat dilihat pada Gambar 4 di atas.

B. Gambaran Umum Wilayah Sasaran Program

1. Monografi

Gedong Pakuon merupakan salah satu kelurahan/desa di Kecamatan Teluk Betung Selatan wilayah Kota Bandar Lampung. Secara geografis terletak pada $05^{\circ} 26' 30''$ LS dan $105^{\circ} 15' 15''$ BT dengan batas-batas wilayah administratif yaitu:⁹

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Sumur Putri
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Talang
- c. Sebelah Selatan : Kelurahan Kuripan
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Negeri Olok Gading

Luas wilayah administratif Kelurahan Gedong Pakuon sekitar 360.000 km² atau 36 hektar, terdiri dari 3 Lingkungan dan 16 RT. Lingkungan I seluas 11, 35 ha terdapat 5 RT, Lingkungan II seluas 13, 50 ha terdapat 6 RT dan Lingkungan III seluas 11, 15 ha terdapat 5 RT. Lokasi kawasan/lingkungan permukiman kumuh tersebar di 10 RT, yaitu RT 01, 02, 03, 05, 07, 16, 11, 12, 13, 14. Adapun luas masing-masing RT sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 beserta jumlah penduduk yang menempati wilayah tersebut pada tahun 2016.

Karakteristik fisik wilayah Kelurahan Gedong Pakuon sebagian besar merupakan kawasan permukiman dan kawasan perdagangan dan pertanian dengan

⁹ Dokumen NUAP (*Neighborhood Upgrading Action Plan*) Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan, (Kelurahan Gedong Pakuon: LKM Sakai Sambayan, 2015), h.8

kondisi topografi datar / berbukit dan berada pada ketinggian rata-rata 2 meter di atas permukaan laut.¹⁰ Status kepemilikan lahan pada kawasan/lingkungan permukiman kumuh sebagian besar merupakan lahan milik pribadi dimana status peruntukkan lahan adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota.¹¹

Tabel 1
Data Sebaran Luas Wilayah

Lingkungan	RT	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)			Jumlah KK
			Laki-Laki	Wanita	Total	
I	01	2,80	186	173	359	95
	02	1,95	259	247	506	135
	03	2,50	171	141	312	84
	04	2,65	243	208	451	99
	05	1,45	60	54	114	32
	5	11,35				
II	06	2,40	140	163	303	76
	07	3,20	142	124	266	72
	08	2,70	57	53	110	27
	09	1,90	134	131	265	68
	10	1,70	130	116	246	65
	16	1,60	161	123	284	75
	6	13,50				
III	11	2,95	154	147	301	76
	12	2,00	89	94	183	48
	13	2,35	214	238	452	113
	14	1,80	71	73	144	36
	15	2,05	51	45	96	27
	5	11,15				
Jumlah	16	36,00	2262	2130	4392	1128

Sumber Data: Profil Kelurahan Tahun 2016

Kelurahan Gedong Pakuon menjadi sasaran program NUSP-2 tahun 2015-2017 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor

¹⁰ *Ibid*, h.9

¹¹ *Ibid*, h.19

1036/IV.32/HK/2014 tanggal 29 Desember 2014, dengan luas kawasan kumuh sebesar 6.58 ha. Setelah dilakukan pemutakhiran data profil kumuh, maka deliniasi kawasan kumuh Gedong Pakuon seluas 11.98 ha.¹² Lokasi kawasan/lingkungan permukiman kumuh berada pada kawasan pinggiran kota dengan karakteristik kawasan sekitar lokasi permukiman kumuh berupa kawasan perumahan dan berada pada tepi sempadan sungai.

2. Demografi

Data demografi diperlukan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisir terjadinya pembangunan yang salah sasaran. Adapun jumlah penduduk pada tabel 3 adalah jumlah keseluruhan pada tahun 2016. Sebelumnya pada tahun 2015 yaitu tahun pertama NUSP-2 diimplementasikan, jumlah penduduk Gedong Pakuon adalah 4.156 jiwa, jumlah KK 1.109 jiwa dengan jumlah KK miskin sebanyak 679 KK. Penduduk laki-laki 1.932 jiwa dan penduduk perempuan 2.224 jiwa.¹³ Dalam penelitian ini hanya diuraikan data demografi wilayah kumuh pada 10 RT berdasarkan hasil survey tahun 2015, dikarenakan hanya RT kumuh saja yang menjadi sasaran NUSP-2.

a. Data Penduduk Menurut Usia

Data penduduk menurut usia di wilayah kumuh diperlukan untuk mengetahui jumlah usia produktif yang memungkinkan untuk diberdayakan dalam pelaksanaan

¹² *Ibid*, h.6

¹³ *Ibid*, h. 9

program NUSP-2. Data penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No.	Kawasan Kumuh (RW/RT)	Jumlah Penduduk Menurut Umur (jiwa)						
		0 - 5 Tahun	6 - 12 Tahun	13 - 17 Tahun	18 - 25 Tahun	26 - 40 Tahun	40 - 55 Tahun	> 55 Tahun
	Lk I							
1.	RT.01	37	47	45	64	77	67	44
2.	RT.02	56	93	75	75	93	60	46
3.	RT.03	37	45	53	44	57	63	41
	Lk II							
4.	RT.06	33	41	43	37	51	45	42
5.	RT.07	23	32	30	45	54	61	32
6.	RT.16	10	13	14	14	35	13	15
	Lk III							
7.	RT.11	33	46	35	44	64	41	33
8.	RT.12	41	47	37	46	61	29	28
9.	RT.13	12	35	26	18	49	53	14
10.	RT.14	53	62	66	59	81	63	56
	Jumlah	335	461	424	446	622	495	351

Sumber Data: Dokumen NUAP

Jika penduduk yang berusia 18 - 55 tahun dianggap mampu untuk berpartisipasi dalam program NUSP-2, maka jumlah penduduk Kelurahan Gedong Pakuon yang menempati wilayah kumuh dan memungkinkan untuk berpartisipasi adalah 1.563 warga (dijumlahkan berdasarkan interval 18-25 tahun, 26-40 tahun dan 40-55 tahun). Jika dihitung menurut persentase maka penduduk usia produktif adalah 49,8% dari jumlah total penduduk adalah 3.134 warga.

b. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data penduduk menurut mata pencaharian diperlukan untuk mengetahui sumber penghasilan masyarakat, sehingga dapat diketahui kondisi perekonomiannya.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Kawasan Kumuh (RW/RT)	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian (jiwa)						
		PNS/TNI /Polri	Swasta	Pengrajin	Nelayan	Petani	Buruh	Tidak Bekerja
	Lk I							
1	RT.01	-	24	-	-	-	117	-
2	RT.02	1	57	-	-	-	66	-
3	RT.03	7	82	-	-	-	53	-
	Lk II							
5	RT.06	8	-	-	-	-	45	-
6	RT.07	3	18	-	-	-	46	-
7	RT.16	3	36	-	-	-	40	-
	Lk III							
8	RT.11	2	43	-	-	-	45	-
9	RT.12	5	10	-	-	-	21	-
10	RT.13	16	13	-	-	-	40	-
11	RT.14	-	14	-	-	-	19	-
	Jumlah	45	297	0	0	0	492	0

Sumber Data: Dokumen NUAP

Berdasarkan tabel 3 di atas, sebagian besar kepala keluarga bermata pencarian sebagai buruh, yakni mencapai 73, 95 % dari jumlah keseluruhan kepala keluarga 834 jiwa.

Kemudian dibutuhkan data terkait penghasilan rata-rata rumah tangga agar lebih akurat dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari program NUSP-2. Hal ini dikarenakan program NUSP-2 berpihak kepada masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Oleh karena itu data penghasilan rata-rata rumah tangga diperlukan agar implementasi program tepat dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu. Data penghasilan rata-rata rumah tangga dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Data Penghasilan Rata-rata Rumah Tangga

No.	Kawasan Kumuh	Jumlah Penghasilan Rata-rata Rumah Tangga (KK)				
		< Rp 1 Juta	Rp 1 – 2 Juta	Rp 2 – 3 Juta	Rp 3 – 5 Juta	> Rp 5 Juta
	LkI					
1	RT.01	77	24	-	-	-
2	RT.02	46	70	16	-	-
3	RT.03	37	32	7	-	-
	Lk II					
4	RT.06	45	-	32	-	-
5	RT.07	40	28	12	-	-
6	RT.16	15	16	3	-	-
	Lk III					
7	RT.11	35	43	6	-	-
8	RT.12	41	20	15	-	-
9	RT.13	25	13	16	-	-
10	RT.14	99	21	-	-	-
	Jumlah	460	267	107	0	0

Sumber Data: Dokumen NUAP

Berdasarkan tabel 4, rumah tangga yang berpenghasilan rata-rata di bawah 1 juta masih mendominasi, yakni mencapai 55,16 % dari jumlah keseluruhan kepala keluarga 834 jiwa. Sedangkan rata-rata penghasilan terbesar antara 2-3 juta rupiah.

c. Data Tingkat Kesehatan Penduduk

Data tingkat kesehatan penduduk diperlukan untuk memperoleh gambaran terkait wabah penyakit apa saja yang pernah atau sedang melanda penduduk di lingkungan kumuh, karena lingkungan kumuh dapat menjadi sumber penyakit bagi penduduk di sekitarnya. Data ini dapat digunakan untuk proses penyadaran kepada masyarakat bahwa lingkungan yang kumuh menjadi sumber penyakit. Harapannya

masyarakat akan sadar dan membiasakan pola hidup bersih dan sehat.

Tabel 5
Data Tingkat Kesehatan Penduduk

No	Kawasan Kumuh	Jumlah Penderita Penyakit Kronis (jiwa)						
		Diare	ISPA	Muntaber	DBD	Malaria	TBC	Lainnya
	Lingkungan I							
1.	RT.01	31	-	24	12	8	2	-
2.	RT.02	16	-	11	6	4	-	-
3.	RT.03	9	-	6	-	-	1	-
	Lingkungan II							
4.	RT.06	4	-	2	4	5	1	-
5.	RT.07	6	-	6	6	4	1	-
6.	RT.16	8	-	4	-	6	1	-
	Lingkungan III							
7.	RT.11	4	-	2	2	4	-	-
8.	RT.12	6	-	4	-	-	-	-
9.	RT.13	8	-	12	6	8	-	-
10.	RT.14	2	-	4	-	2	-	-
	Jumlah	94	-	75	36	41	6	-

Sumber Data: Dokumen NUAP

Berdasarkan Tabel 5 di atas, penderita penyakit Diare menempati posisi terbesar, mencapai 37, 30% kemudian muntaber mencapai 30% dari total penderita penyakit kronis sebanyak 252 jiwa.

3. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Gedong Pakuon berasal dari etnis/suku Lampung, sehingga nuansa kekeluargaan di Gedong Pakuon masih terasa antara warga yang tinggal dalam satu RT atau yang tempat tinggalnya berdekatan. Selain itu, jarak antara rumah warga dengan warga lainnya yang tinggal di wilayah kumuh cukup padat, hanya dibatasi oleh gang kecil atau jalan setapak yang hanya cukup

untuk dilalui motor atau bahkan hanya dibatasi oleh tembok serta tidak memiliki keteraturan.

Sarana yang memiliki fungsi sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat di wilayah perumahan dan permukiman yang terdapat di Kelurahan Gedong Pakuon berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, sarana ibadah, dan ruang terbuka atau taman, serta balai pertemuan warga.

Di Kelurahan Gedong Pakuon terdapat sarana ibadah berupa 1 buah Mesjid, sarana pendidikan berupa PAUD/TK ada 1 buah, SD/MI ada 3 buah, SLTP/MTs ada 1 buah dan SLTA/MA ada 1 buah. Sarana layanan kesehatan berupa POSYANDU ada 5 buah dan PUSTU (Puskesmas Pembantu) ada 1 buah. Sedangkan sarana publik berupa gedung balai pertemuan warga yang terdapat di Kelurahan Gedong Pakuon seluas 36 meter persegi.¹⁴

Berikut ini adalah tabel data keseluruhan penduduk menurut agama pada tahun 2016, tidak berdasarkan wilayah kumuh.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jenis Kelamin			Ket
		L	P	Jumlah	
1	Islam	2213	2078	4291	
2	Kristen Protestan	22	19	41	
3	Kristen Khatolik	20	22	42	
4	Budha	7	10	17	
5	Hindu	-	1	1	
Jumlah		2262	2130	4392	

Sumber Data: Laporan Kependudukan Kelurahan

Berdasarkan tabel 6, penduduk beragama Islam mencapai 97.7% dari total jumlah penduduk sebesar 4.392 jiwa. Sedangkan penduduk yang beragama Kristen Protestan 0.93%, Kristen Khatolik 0.95%, Budha 0.39%.

¹⁴ Dokumen NUAP, *Op.Cit*, h.10

Masyarakat Kelurahan Gedong Pakuon mayoritas beragama Islam. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan berupa pengajian rutin ibu-ibu dengan agenda belajar mengaji atau membaca Al-Qur'an sesuai dengan makhroj dan tajwidnya serta taushiyah dari ustadz. Dilaksanakan rutin setiap hari selasa di mushola dan hari jum'at di masjid pukul 13.00 WIB¹⁵

4. Kondisi Infrastruktur

Data kondisi infrastruktur diperlukan untuk mengetahui infrastruktur apa saja yang layak untuk diajukan dalam program NUSP-2 yang sesuai dengan jenis-jenis konstruksi yang boleh diusulkan. Data-data tersebut tercantum dalam dokumen NUAP yang dibuat berdasarkan hasil Survey Kampung Sendiri (SKS).

a. Bangunan Rumah Tinggal

Data terkait kondisi rumah tinggal diperlukan untuk mengetahui kondisi jumlah rumah penduduk yang layak atau tidak layak sebagai tempat tinggal, permanen, semi permanen atau non permanen, kumuh atau tidak kumuh, serta bagaimana status kepemilikan rumah tersebut agar lebih mudah untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Bangunan rumah tinggal yang ada di kawasan/lingkungan permukiman kumuh sebagian besar merupakan bangunan rumah semi-permanen dengan konstruksi lantai terbuat dari bahan Semen, dinding dari bahan Tembok + Papan

¹⁵ Natsir, Koordinator LKM Sakai Sambayan, Wawancara 11 Oktober 2016

dengan konstruksi atap terbuat dari Genteng.¹⁶ Bangunan rumah tinggal permanen mencapai 48.07%. Sedangkan kondisi bangunan rumah tinggal yang kumuh mencapai 51.93% dari jumlah total 595 rumah tinggal. Bangunan rumah dengan kekumuhan tertinggi terletak pada Lingkungan III RT 13, mencapai 41 bangunan. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran IX.

b. Prasarana Jalan

Prasarana jalan di lingkungan permukiman kumuh Gedong Pakuon meliputi jalan lingkungan (lokal sekunder) dan jalan setapak dengan kondisi umumnya rusak.

Di kawasan/lingkungan permukiman kumuh, jaringan jalan setapak berupa jalan Paving Block sepanjang 1.807 meter dengan kondisi 90% rusak. Sedangkan jaringan jalan lingkungan yang terdapat di kawasan/lingkungan permukiman kumuh berupa konstruksi Lapen atau HRS dengan panjang 500 meter dengan kondisi baik.¹⁷ Di kawasan/lingkungan permukiman kumuh tidak terdapat sarana dan prasarana kelengkapan infrastruktur jalan seperti Saluran Tepi Jalan dan Bahu Jalan. Sedangkan untuk kelengkapan infrastruktur jalan berupa Penerangan Jalan, hanya terdapat di Lingkungan I RT. 01, 02 dan 03.¹⁸

Kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas warga terhadap pusat-pusat layanan kegiatan sosial-ekonomi, termasuk akses kepada layanan pendidikan dan kesehatan, pasar, fasilitas umum, serta fasilitas sosial-ekonomi lainnya. Untuk pembangunan jalan setapak sepanjang 1.807 meter oleh warga telah diusulkan dalam NUAP tahun 2015.

¹⁶ Dokumen NUAP, *Op.Cit*, h.22

¹⁷ *Ibid*, h.25

¹⁸ *Ibid*, h.26

c. Drainase Lingkungan

Sistem drainase lingkungan permukiman kumuh Gedong Pakuon terdiri dari, saluran drainase tersier, saluran drainase sekunder dan primer. Kondisi drainase lingkungan di Kelurahan Gedong Pakuon pada umumnya sudah mengalami kerusakan, sehingga perlu untuk mengadakan perbaikan, agar air limbah tidak mencemari kawasan pemukiman penduduk. Jenis konstruksi dan kondisi saluran dapat dilihat pada tabel 7 berikut.

Tabel 7
Sistem Drainase Lingkungan

No.	Kawasan Kumuh (RW/RT)	Dimensi Saluran		Konstruksi	Kondisi
		Lebar (cm)	Panjang (m)		
	Lingkungan I				
1.	RT.01	-	-	-	-
2.	RT.02	20	10	Pasangan Batu	Rusak
3.	RT.03	40	110	Pasangan Batu	Rusak
	Lingkungan II				
4	RT.06	40	14,5	Pasangan Batu	Rusak
5	RT.07	80	20	Pasangan Batu	Rusak
		40	197	Pasangan Batu	Rusak
6	RT.16	-	-	-	-
	Lingkungan III				
7	RT.11	40	17	Pasangan Batu	Rusak
		50	41,5	Pasangan Batu	Rusak
8	RT.12	50	114	Pasangan Batu	Rusak
9	RT.13	50	114	Pasangan Batu	Rusak
10	RT.14	30	110	Pasangan Batu	Rusak
		40	32	Pasangan Batu	Rusak
Jumlah			780		

Sumber Data: Dokumen NUAP

Kondisi drainase lingkungan tersebut dengan panjang total 780m pada umumnya sudah rusak, sehingga menyebabkan genangan saat musim hujan tiba dengan luas 1.2 ha dan tinggi antara 20-30 cm dengan rata-rata genangan 2-3 jam.

Kebutuhan pembangunan/perbaikan infrastruktur drainase lingkungan ditujukan untuk penyaluran air bekas/air hujan dan penanganan genangan/banjir dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penghuni kawasan/lingkungan permukiman kumuh disamping perlindungan terhadap bangunan rumah dan fasilitas umum serta fasilitas sosial-ekonomi yang ada.¹⁹

d. Prasarana Air Bersih

Gambaran tentang sistem penyediaan air bersih pada kawasan/lingkungan permukiman kumuh meliputi: jumlah rumah tangga yang telah dilayani melalui sistem penyediaan air bersih perpipaan PDAM (sambungan rumah) dan melalui bak penampung (kran umum/KU) serta jumlah rumah tangga yang memanfaatkan sumber air bersih lainnya yang aman termasuk sumur dangkal (sumur gali), sumur bor maupun sumber air bersih lainnya (mata air/sungai).

Jumlah rumah tangga yang telah dilayani melalui sistem penyediaan air bersih perpipaan PDAM (sambungan rumah) sebesar 66 SR, jumlah rumah tangga yang melalui bak penampung (kran umum/KU) sebesar 49 rumah tangga yang dilayani 5 unit KU, jumlah rumah tangga yang memanfaatkan sumber air bersih Sumur Gali sebesar 300 rumah tangga, serta jumlah rumah tangga yang memanfaatkan sumber air bersih Sumur Bor sebesar 104 rumah tangga. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

¹⁹ *Ibid*, h.35

Tabel 8
Sistem Penyediaan Air Bersih

No	Kawasan Kumuh (RW/RT)	Jml SR	Kran Umum		Sumur Gali		Sumur Bor		Lainnya (RT/ KK)
			Unit	Jml RT	Unit	Jml RT	Unit	Jml RT	
	Lingkungan I								
1.	RT.01	10	1	10	62	62	-	-	
2.	RT.02	25	1	9	84	84	-	-	
3.	RT.03	12	-	-	40	40	-	-	
	Lingkungan II								
4	RT.06	11	-	-	44	44	19	19	
5	RT.07	5	1	10	36	36	18	18	
6	RT.16	9	-	-	34	34	12	12	
	Lingkungan III								
7	RT.11		-	-			10	10	
8	RT.12		-	-			15	15	
9.	RT.13		1	10			17	17	
10.	RT.14		1	10			13	13	
	Jumlah	66	5	49	300	300	104	104	

Sumber Data: Dokumen NUAP

Kebutuhan pembangunan/perbaikan sistem penyediaan air minum ditujukan untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap pemenuhan kebutuhan air minum yang layak secara berkelanjutan pada lingkungan permukiman kumuh.²⁰

e. Prasarana Pengolahan Air Limbah (Sanitasi)

Gambaran tentang sistem pengolahan air limbah rumah tangga meliputi: sarana pembuangan air limbah dan sistem pengolahan air limbah yang digunakan oleh penduduk/warga masyarakat. Sistem pengolahan air limbah rumah tangga pada kawasan/lingkungan permukiman kumuh dari 834 KK, masih ada yang tidak memiliki WC sendiri dan tidak menggunakan MCK Komunal sebesar 68 KK (8.15%). Untuk memberikan pelayanan sanitasi kepada masyarakat yang belum

²⁰ Ibid, h.36

memiliki prasarana akan diusulkan melalui penyediaan MCK komunal, terutama di lokasi yang telah tersedia lahan di Lk I, II dan III.²¹

Sarana Sanitasi lingkungan di Kelurahan Gedong Pakuon dapat dilihat pada tabel 9 berikut.

Tabel 9
Sarana Sanitasi Lingkungan

No.	Kawasan Kumuh (RW/RT)	Jumlah Kepala Keluarga / Rumah Tangga				
		Memiliki WC sendiri + septic tank	Memiliki WC sendiri tanpa septic tank	Menggunakan IPAL Komunal	Menggunakan MCK Komunal	Tidak memiliki WC dan tidak menggunakan MCK Komunal
	Lingkungan I					
1	RT.01	89	-	-	10	2
2	RT.02	113	-	-	9	10
3	RT.03	64	-	-	-	12
	Lingkungan II					
4	RT.06	65	-	-	-	12
5	RT.07	60	-	-	10	10
6	RT.16	29	-	-	-	5
	Lingkungan III					
7	RT.11	74	-	-	-	10
8	RT.12	69	-	-	-	7
9	RT.13	44	-	-	10	-
10	RT.14	110	-	-	10	-
	Jumlah	735	-	-	49	68

Sumber Data: Dokumen NUAP

Kebutuhan pembangunan/perbaikan infrastruktur sanitasi lingkungan ditujukan untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap sistem pembuangan dan pengolahan air limbah (sanitasi) yang layak secara berkelanjutan.²²

²¹ *Ibid*, h.29

²² *Ibid*, h.36

f. Pengelolaan Persampahan

Gambaran sistem pengelolaan dan prasarana sampah rumah tangga di Gedong Pakuon meliputi: sistem pengumpulan dan pengangkutan serta pembuangan sampah yang digunakan oleh masyarakat. Pengelolaan layanan pengangkutan dan pembuangan sampah dilaksanakan oleh aparat pemerintah kelurahan dan Dinas Kebersihan Kota. Sarana dan prasarana sampah rumah tangga di lingkungan kumuh meliputi Bak Sampah 118 unit, Gerobak Sampah 3 unit dan 1 unit TPS atau tempat penimbunan sampah sementara. Kebutuhan pembangunan/perbaikan infrastruktur sistem pengelolaan sampah lingkungan ditujukan untuk meningkatkan akses rumah tangga terhadap sistem pengelolaan sampah yang layak secara berkelanjutan pada kawasan/lingkungan permukiman kumuh.²³ Keterangan lebih lanjut dapat di lihat pada Lampiran X.

g. Prasarana Penerangan Jalan

Jenis lampu penerangan jalan di kawasan/lingkungan permukiman kumuh terdiri dari lampu penerangan jalan setapak sebanyak 2 titik dan lampu penerangan jalan lingkungan atau jalan lokal sekunder sebanyak 0 titik.²⁴ Lokasi yang belum memiliki prasarana penerangan jalan banyak berada di lingkungan I dan II. Beberapa lokasi ini belum tersedia prasarana tersebut karena masyarakat tidak menyepakati sistem penyambungan aliran listrik yang menyatu dengan salah satu rumah warga. Upaya penanganannya, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu melakukan

²³ *Ibid*, h.37

²⁴ *Ibid*, h.31

koordinasi dengan instansi terkait untuk memfasilitasi penyambungan dan mekanisme pembebanan biaya. Kebutuhan pembangunan/perbaikan lampu penerangan jalan lingkungan ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta mendukung keamanan warga penghuni, khususnya warga perempuan.

C. Implementasi NUSP-2 dan Partisipasi Masyarakat

1. Tahap Persiapan dan Pengorganisasian

a. Rembug Khusus Perempuan I

Tujuan diselenggarakannya RKP I adalah sosialisasi kepada kaum perempuan terkait pelaksanaan kegiatan NUSP-2, untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan musyawarah, pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan infrastruktur, juga agar aspirasi dan keinginan kelompok perempuan dapat disalurkan.²⁵ RKP I di Gedong Pakuon didampingi oleh CA pemberdayaan yaitu Bapak Wildan dan CA teknik yaitu Bapak Saragih. Dilaksanakan di sekretariat LKM Sakai Sambayan atau di rumah Bapak Natsir, Koordinator LKM.

Adapun partisipasi kaum perempuan Gedong Pakuon dalam RKP I dilihat dari tingkat kehadiran kurang lebih 30 orang. Ibu-ibu atusias untuk melaksanakan program NUSP-2 di lingkungannya dan siap mendukung atau berpartisipasi.²⁶ Dalam RKP I disepakati nama-nama kaum perempuan yang akan menjadi pengurus LKM. Nama-nama yang diusulkan dan disepakati bersama adalah Ibu Megawati, Ibu Lisni,

²⁵ Pedoman Umum, *Op.Cit*, h.46

²⁶ Wildan, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 29 Agustus 2016

Ibu Nurhayati dan Ibu Eliya. Mereka kemudian menjadi anggota pimpinan LKM Sakai Sambayan, karena mereka dapat dianggap sebagai tokoh perempuan, sehingga diharapkan mampu menggerakkan warga perempuan lainnya.²⁷

Selain itu, kaum perempuan menyepakati untuk berpartisipasi berupa kesediaannya untuk menyiapkan konsumsi ketika pelaksanaan rembug maupun musyawarah dan ketika pelaksanaan kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur pada RT masing-masing. Sebagaimana dalam pernyataan berikut.

Ibu-ibu yang *bikin* minum, kopi atau apa *lah...* nyiapin makanan. Saya relawannya, ya *nyiap-nyiapin* makanan, minum, kopi kalo *pas* ada rapat atau ada tukang yang kerja.²⁸

Tugas tersebut disepakati dan didanai swadaya oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan dana dari NUSP-2 hanya boleh digunakan untuk membiayai infrastruktur dasar yang direncanakan oleh masyarakat, adapun untuk pengeluaran lainnya adalah swadaya dari masyarakat setempat di mana proyek akan diimplementasikan.

b. Musyawarah Kelurahan I

Tujuan Muskel I untuk melakukan identifikasi kelembagaan masyarakat atau status dan keaktifan LKM yang terdapat di masyarakat serta pembahasan hasil Rembug Khusus Perempuan I.²⁹

Hasil dari Muskel I adalah menetapkan LKM Sakai Sambayan sebagai lembaga pelaksana kegiatan NUSP-2 di Gedong Pakuon. Menetapkan para pengurus

²⁷ Natsir, Koordinator LKM Sakai Sambayan, Wawancara 26 Juni 2016

²⁸ Eliya, Masyarakat, Wawancara 26 Juni 2016

²⁹ Wildan, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 29 Agustus 2016

dengan ketentuan minimal 30% pengurus adalah perempuan. Kemudian didampingi oleh CA untuk membahas Konsep Surat Pernyataan Minat dan Kesiapan Masyarakat dalam pelaksanaan NUSP-2.³⁰ Adapun surat pernyataan tersebut sudah tertera dalam konsep NUSP-2. Secara garis besar konsep surat pernyataan tersebut memuat kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan NUSP-2 dan berperan aktif dalam setiap tahap kegiatan NUSP-2, kemudian masyarakat siap menerima dana BLM untuk perbaikan lingkungan dan sanggup melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman umum NUSP-2.³¹

Pembahasan selanjutnya adalah penentuan tim Survey Kampung Sendiri yang akan melakukan pemetaan terhadap kondisi sosial-ekonomi serta kondisi infrastruktur di lingkungan kumuh. Penentuan anggota tim berdasarkan kemauan masyarakat itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sirli.

*“Kalo SKS itu dilibatkan masyarakat sebagian yang mau, kesadarannya sendiri lah, kalo memang mau kampungnya maju, mau bersih. Tim SKS 10 orang, ya kita-kita ini lah, perempuan 4, laki-laki 6. Kalo masyarakat lain mau bantu ya nggakpapa lebih bagus.”*³²

Oleh karena itu, tidak ada paksaan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, hanya saja penanggung jawab atas terlaksananya kegiatan SKS harus ditentukan tim khusus sehingga ada rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya. Kemudian penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan selanjutnya untuk kegiatan pelatihan bagi tim survey dan kegiatan survey itu sendiri.

³⁰ Wildan, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 29 Agustus 2016

³¹ Form Surat Pernyataan Minat dan Kesiapan Masyarakat

³² Sirliana, Tim Pengadaan Barang, Wawancara 26 Juni 2016

2. Tahap Survey

a. Survey Kampung Sendri

Kegiatan Survey Kampung Sendiri (SKS) di Kelurahan Gedong Pakuon dilaksanakan setelah RKP I dan Muskel I. Kegiatan ini melibatkan kaum laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya, kesadaran masing-masing jika menginginkan perubahan yang lebih baik untuk lingkungan tempat tinggalnya. Sebelum melaksanakan Survey Kampung Sendiri, tim SKS terlebih dahulu mendapat pelatihan tentang teknis pelaksanaan dan motivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan.

Adapun kegiatan Survey Kampung Sendiri yang dilaksanakan di Kelurahan Gedong Pakuon meliputi pendataan jumlah warga berdasarkan usia, pekerjaan, penghasilan, tingkat pendidikan, dll.

Kita yang data anak dari nol sampe sekian tahun, jadi warganya itu kan umpamanya dari 6 sampe 12 tahun berapa, remajanya berapa, jadi kita biar tau umpama dari RT ini berapa yang membutuhkannya, kira-kira ini sesuai *nggak* dengan yang kita ajukan, gitu kan.. Kayak drainase itukan yang kita survey *kemaren*. Karena yang sesuai dengan usulan-usulan mereka itu ... itu kita langsung ke SKS yang kita terjun langsung itu sesuai atau *nggak gitu*. Kita juga mendata warga yang dari penghasilan, kita lihat penghasilan kalo sudah dari satu juta ke bawah itu kan udah istilahnya miskin, karena itu tidak memadai, sekarang *aja udah* berapa (harga kebutuhan pokok-pen). Kalo yang menengah ke atas ada juga di sini tapi kan satu dua. Ini kan rata-rata kumuh, yang *nggak* kan bisa *diitung*, ya kan.³³

Masyarakat dengan sukarela terlibat dalam kegiatan SKS sebagaimana dalam pernyataan di atas, karena masyarakat dianggap paling tahu kondisi lingkungan tempat tinggalnya, sehingga masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

³³ Sirliana, Tim Pengadaan Barang, Wawancara 26 Juni 2016

Selain mendata jumlah penduduk, kegiatan SKS juga mendata jenis infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan jenis-jenis infrastruktur yang dapat diusulkan sudah ditentukan oleh program NUSP-2.

Proses pelaksanaan SKS dengan cara mengisi form dokumen NUAP dan form penyusunan basis data kumuh yang telah disediakan oleh NUSP-2. Form penyusunan basis data kumuh berisi tentang data umum kelurahan berupa jumlah RT, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK. Kemudian data kependudukan menurut interval usia tertentu yang telah ditentukan oleh NUSP-2, jumlah penduduk menurut mata pencaharian, jumlah penghasilan rata-rata rumah tangga dan data tingkat kesehatan atau jumlah penderita penyakit di lingkungan kumuh. Kemudian data mengenai infrastruktur, akses layanan publik, dll. Tim SKS bertugas untuk mengisi data-data tersebut dengan sebenarnya untuk kemudian menjadi acuan untuk menyusun dokumen NUAP.

b. Rembug Khusus Perempuan II

Tujuan RKP II untuk mengidentifikasi masalah dan perumusan usulan kebutuhan kelompok perempuan untuk perbaikan kualitas di kawasan lingkungan kumuh.³⁴ Kegiatan RKP II di Gedong Pakuon dilaksanakan setelah kegiatan SKS, oleh LKM Sakai Sambayan dan didampingi oleh CA pemberdayaan dan kader masyarakat. Masyarakat yang diundang sama seperti RKP I, terutama bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh sasaran NUSP-2.³⁵

³⁴ Form Undangan Rembug Khusus Perempuan II

³⁵ Wildan, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 29 Agustus 2016

Partisipasi kaum perempuan dalam RKP II dilihat dari tingkat kehadiran, berkisar 30 orang. Masyarakat aktif dalam bertanya maupun mengungkapkan pendapat. Seperti mengusulkan untuk dibangun sumur bor di RT 14 karena tidak tersedia layanan air bersih yang layak, kemudian mengusulkan pembangunan drainase di RT 11 karena *becek* atau drainase sangat rusak bahkan sudah tidak berbentuk seperti drainase, dll.

Kemudian antusias bersama-sama untuk mengisi form usulan penanganan lokasi kumuh yang telah disediakan oleh NUSP-2, berupa usulan penanganan untuk aspek fisik lingkungan terkait kepemilikan lahan, kualitas bangunan, infrastruktur, dll. Kemudian aspek sosial-budaya, terkait akses pendidikan, kesehatan dan perilaku hidup sehat. Serta aspek ekonomi terkait peluang usaha dan pendapatan rata-rata.³⁶ Hasil kesepakatan Ibu-ibu dalam Rembug kemudian akan dibahas pada saat kegiatan Musyawarah Kelurahan II program NUSP-2.

3. Tahap Perencanaan

a. Musyawarah Kelurahan II

Musyawarah Kelurahan II dilaksanakan untuk membahas hasil RKP II yang merupakan hasil usulan kaum perempuan terkait komponen infrastruktur yang akan dibangun berdasarkan hasil Survey Kampung Sendiri. Pelaksanaan Muskel II di Gedong Pakuon dilaksanakan oleh LKM Sakai Sambayan, dipimpin oleh Bapak Anton Idward sebagai Kepala Kelurahan didampingi oleh tim CA.

³⁶ Wildan, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 29 Agustus 2016

Muskel II dilaksanakan untuk membahas hasil RKP II, contoh ibu-ibu usul untuk dibangun drainase di RT 11 dan RT 14 kemudian usul untuk dibuat sumur bor di RT 13, dan usulan-usulan lainnya, ketika di Muskel II itu dibahas apa saja yang masih kurang, misalnya ada yang usul untuk dibangun rabat beton di RT 11 atau RT-RT lainnya. Masyarakat antusias menyampaikan usulan-usulan.³⁷

Hasil Muskel II dibuat dokumen NUAP atau dokumen Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan, disusun oleh LKM didampingi tim pendamping masyarakat. Isi dokumen NUAP berupa profil kelurahan dan profil lingkungan kumuh, infrastruktur yang diusulkan oleh masyarakat dan hasil analisis. Form dokumen NUAP sudah disediakan pihak NUSP-2, masyarakat cukup mengisi data-data sesuai hasil SKS dan kondisi sebenarnya.³⁸

Konstruksi yang boleh diusulkan dalam dokumen NUAP sudah ditentukan oleh program NUSP-2 sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Tetapi sebisa mungkin proyek yang dibangun dilakukan oleh masyarakat sendiri sehingga meminimalisir peran pihak ketiga (kontraktor). Sebagaimana pernyataan berikut.

Setelah kegiatan SKS, kita lihat sesuai *nggak* dengan usulan-usulan mereka itu, kan *udah* ditentuin apa-apa *aja* yang boleh diusulkan. Itu yang kita bahas pas rapat di Kelurahan atau di LKM nya.³⁹

Sudah ditentukan apa saja infrastruktur yang bisa diusulkan melalui program NUSP, itu sudah kesepakatan dari pemerintah, bisa juga usul yang lebih besar, tapi yang mengerjakan bukan masyarakat, ada tim ahlinya sendiri. Tapi ya sebisa mungkin program ini yang melaksanakan masyarakat sendiri. Contohnya sumur bor itu kan *nggak* bisa sembarangan orang bisa, jadi kalau masalah ini kita serahkan ke pihak ketiga atau kontraktor.⁴⁰

Kehadiran masyarakat cukup antusias berkisar 45 orang yang terdiri dari perwakilan RT, pengurus dan anggota LKM dan tim SKS, aktif dalam bertanya dan mengemukakan pendapat. Kemudian pembentukan Tim Perencana dan Pelaksana Pembangunan Infrastruktur (TPPI) dan diusulkan nama Bapak Sudirman warga

³⁷ Saragih, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 30 Agustus 2016

³⁸ Wildan, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 29 Agustus 2016

³⁹ Sirliana, Tim Pengadaan Barang, Wawancara 26 Juni 2016

⁴⁰ Saragih, *Community Advisor* di Gedong Pakuon, Wawancara 15 Agustus 2016

Kelurahan Gedong Pakuon sebagai ketua TPPI kemudian masyarakat yang hadir dalam Muskel II menyepakati. Setelah waktu berjalan kemudian ketua TPPI digantikan oleh Angga Reridya.

b. Musyawarah Kelurahan III

Musyawarah Kelurahan III di Gedong Pakuon dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Gedong Pakuon, setelah dokumen NUAP yang disusun dalam Muskel II dan dikonsolidasikan oleh LCO (*Local Coordinating Office*) ke tingkat kabupaten/kota.

Tujuan konsolidasi ini untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan usulan-usulan masyarakat dengan Program Kerja SIAP atau Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan Kumuh di tingkat kabupaten/kota. Setelah dikonsolidasikan maka selanjutnya LKM merevisi dokumen NUSP kemudian dilaksanakan Musyawarah Kelurahan III untuk pembahasan dokumen NUAP hasil revisi.⁴¹

Agenda Muskel III membahas kesepakatan rencana prioritas tahunan infrastruktur yang akan dibangun. Penyepakatan jadwal penyusunan RKM (Rencana Kerja Masyarakat) dan pembentukan KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara). Muskel III di Gedong Pakuon dihadiri masyarakat berkisar 40 orang, 40% perempuan dan 60% laki-laki. Masyarakat tersebut terdiri dari Ketua RT, Tokoh Perempuan, serta masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh di mana program akan diimplementasikan.⁴²

Rencana Kerja Masyarakat dibuat berdasarkan hasil revisi dokumen NUAP. Di dalam dokumen RKM memuat rencana penggunaan dana BLM dari NUSP-2. Program NUSP-2 ini didanai oleh ADB melalui pemerintah, ketika turun di masyarakat menjadi dana hibah. Untuk pembangunan infrastruktur tahun 2015

⁴¹ Adi Barcon, Koordinator Kota NUSP-2, Wawancara 28 Agustus 2016

⁴² Wildan, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 29 Agustus 2016

kami menghabiskan dana Rp530 juta, dana dari NUSP-2 Rp 500 juta, sedangkan yang 30 juta-nya swadaya masyarakat. Kemudian dibahas juga siapa-siapa yang menjadi tukang atau pekerja. Nanti tukangnya itu kita bayar pakai dana dari NUSP-2 kita sebut dana BLM. Besarnya upah itu kita musyawarahkan juga dengan masyarakat. Ada yang mengusulkan Rp 60ribu, Rp 70ribu dan Rp 85ribu untuk tukang, tapi kemudian disepakati Rp 75ribu per HOK (Harian Orang Kerja). Sedangkan untuk tukang ada yang mengusulkan Rp 80ribu, Rp 90ribu dan Rp 85ribu tetapi kemudian disepakati Rp 95ribu per HOK untuk tukang.⁴³

Permasalahan kumuh di Kelurahan Gedong Pakuon diakibatkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana lingkungan, seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, air limbah dan persampahan. Dengan kondisi tersebut, melalui proses rembug-rembug masyarakat telah mengusulkan kegiatan-kegiatan penanganan kumuh yang mencakup usulan pembangunan infrastruktur jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan dan penerangan jalan. Usulan-usulan tersebut harus direncanakan penanganannya dalam jangka waktu 3 tahun, dan dimulai pada tahun 2015 – 2017.⁴⁴

Prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dari infrastruktur dan mempertimbangkan waktu pelaksanaannya. Mengingat waktu pelaksanaan NUSP-2 tahun 2015 sangat sempit, yaitu diperkirakan hanya 2.5 bulan. Maka pembangunan pada tahun 2015 diprioritaskan pada pembangunan jalan dan drainase pada lokasi-lokasi yang mudah dijangkau dan kondisi rusak parah.

Sedangkan prioritas pada tahun 2016 disepakati untuk memprioritaskan infrastruktur jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan dan penerangan jalan

⁴³ Natsir, Koordinator LKM Sakai Sambayan, Wawancara 26 Juni 2016

⁴⁴ Dokumen NUAP, *Op.Cit*, h.48

dengan alokasi dana Rp 1000.000.000,- karena waktu pelaksanaannya yang cukup panjang, diperkirakan 12 bulan⁴⁵.

4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Fisik

a. Rembug Khusus Perempuan III

Tujuan RKP III untuk penguatan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, terlibat dalam pengawasan serta berpartisipasi dalam pemeliharaan hasil pembangunan. Adapun partisipasi perempuan di Gedong Pakuon aktif bertanya dan mengemukakan pendapat serta menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan serta pengawasan.

Rembug Khusus Perempuan (RKP) diadakan bukan sekedar persoalan gender saja, bahwa potensi kaum perempuan mempunyai banyak kelebihan, seperti: ketersediaan waktu yang cukup, kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan masih banyak potensi unggulan lainnya. Dengan demikian akan sangat positif bila partisipasi perempuan dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh dapat ditingkatkan.⁴⁶

Ibu Sirli mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan sangat penting, karena perempuan yang lebih mengetahui kondisi lingkungan rumahnya.

Ibu-ibu juga harus berperan aktif, jangan mentang-mentang NUSP ini laki-laki, *nggak* bisa, perempuan juga harus ikut, kan yang tau dapur perempuan, kadang-kadang *kebanyakan* perempuan *bawel*, *cerewet*, lebih detail, *kalo* laki-laki *mah* suka asal tembak *aja*, asal jadi. Jadi kita *bahas* misalnya apa yang *diperluin* ibu-ibu, kira-kira yang mau dibangun apa-apa, jangan kita minta saran sama

⁴⁵ Anton Idward, Kepala Kelurahan Gedong Pakuon, Wawancara, 29 Juni 2016

⁴⁶ Petunjuk Teknis, *Op.Cit*, h.14

bapak-bapak nanti ibu-ibunya *nggak* setuju kan *nggak* sesuai, *nggak* sinkron, misalnya kayak masalah drainase, masalah siring itu kan ibu-ibu yang tau, bapak-bapak mah tinggal *ngerjain*, kebanyakan yang *ngatur* ibu-ibunya.⁴⁷

Oleh karena itu, partisipasi perempuan penting untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Di Kelurahan Gedong Pakuon telah dilaksanakan RKP I, II dan III.⁴⁸

b. Musyawarah Kelurahan IV

Musyawarah Kelurahan IV dilaksanakan setelah Rembug Khusus Perempuan III. Tujuannya untuk membahas langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan fisik.⁴⁹ Muskel IV dilaksanakan di Aula Kelurahan Gedong Pakuon. Hal-hal yang dibahas adalah penetapan tenaga kerja volume HOK, rencana pengadaan barang, pembersihan lokasi, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, dll. Tim pengadaan barang dan jasa di Kelurahan Gedong Pakuon diketuai oleh Ibu Sirliana. Sedangkan tenaga kerja diambil dari di mana mereka tinggal atau di RT masing-masing. Sebagaimana dalam ungkapan berikut.

Ya di mana tempat kerja di tempat RT masing-masing. Karena kita kan maunya *gimana* caranya supaya masyarakatnya langsung yang menyerap. Tapi ada tukang khususnya, karena kalo *nggak* ada ahlinya berantakan, kita ambil memang dari masyarakat setempat, tapi kita ada tukang khususnya karna apa, *kalo nggk* ada ahlinya *nggak* tau ukurannya.⁵⁰

Nah, *kalo* tukang ya dibayar, masak mau sukarela, kan mau kasih makan anak *bininya*. Kemaren ada juga *sih* uang BOP (BLM) sekian persennya, untuk buku-buku, karena kita kan mau *bikin-bikin* ini (laporan-pen) *gimana* *kalo nggk* ada dananya, paling kita di kasih untuk beli pulsa, karena kan untuk nelson-nelson ini

⁴⁷ Sirliana, Tim Pengadaan Barang, Wawancara 26 Juni 2016

⁴⁸ Wildan, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 29 Agustus 2016

⁴⁹ Wildan, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 29 Agustus 2016

⁵⁰ Sirliana, Tim Pengadaan Barang, Wawancara 26 Juni 2016

gimana kalo nggak ada pulsanya. Entah berapa juta itu buat foto kopi laporan dan segala *macem*.⁵¹

Sebenarnya pembangunan ini juga untuk kebaikan kampung lingkungan sendiri, tapi ya bagaimana kalo *nggak* dibayar ya *gimana*, karna saya kan buruh harian, *kalo* saya harus mengalihkan pekerjaan saya untuk bangun ini, ya darimana anak dan istri saya bisa makan?⁵²

Pemberian upah dengan dana BLM tidak bertentangan dengan penggunaan dana, selama masyarakat itu sendiri yang menyerap dana tersebut, sehingga menurut CA teknik hal itu tidak masalah, sebagaimana dalam ungkapan berikut.

Kalau tukang memang dibayar, buat motivasi mereka selama masyarakat miskin atau kurang mampu dan berpenghasilan rendah yang menerima manfaat tidak masalah.⁵³

Berdasarkan pernyataan di atas, maka partisipasi masyarakat secara sukarela adalah ketika melakukan survey, perencanaan, serta evaluasi. Sedangkan para tukang mendapat imbalan, karena mereka adalah warga kurang mampu sehingga mempekerjakan mereka bertujuan untuk meringankan beban ekonomi. Kecuali bagi relawan yang bekerja sukarela, sehingga tidak mendapatkan imbalan sebagaimana para tukang atau para pekerja. Sebagaimana dalam ungkapan berikut.

Kita di situ kan relawan, istilahnya kita sukarela di situ, bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan masyarakat, untuk kemajuan kampung sendiri. Bukan untuk pribadi, ya *kalo* kita *nggak* sukarela begitu ya siapa lagi yang mau majukan kampung sendiri?⁵⁴

Tenaga kerja berasal dari warga kurang mampu. Jumlah tenaga kerja sebanyak 71 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah perempuan 17 orang

⁵¹ Eliya, Relawan, Wawancara 26 Juni 2016

⁵² Akmal, Pekerja, Wawancara 10 Agustus 2016

⁵³ Saragih, *Community Advisor* di Gedong Pakuon, wawancara, 15 Agustus 2016

⁵⁴ Sirliana, Tim Pengadaan Barang, Wawancara 26 Juni 2016

dan jumlah laki-laki 54 orang. Pekerja yang paling aktif ada 22 orang. Baik aktif dalam Musyawarah maupun aktif dalam pelaksanaan kegiatan.⁵⁵ Kemudian kegiatan pembersihan lokasi yang dilakukan secara gotong royong atau sukarela didampingi oleh LKM dan CA pemberdayaan serta CA teknik dan sadar untuk kebaikan kampungnya sendiri.

c. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di wilayah kumuh kelurahan Gedong Pakuon sesuai dengan Rencana Kerja Masyarakat yang disusun pada tahun 2015. Kegiatan fisik di kerjakan oleh masyarakat setempat dan didampingi oleh ahli agar hasil sesuai dengan yang diharapkan. Walaupun para tukang tersebut adalah warga asli Kelurahan Gedong Pakuon tetapi mereka tetap diberi bayaran. Alasannya karena mereka adalah masyarakat kurang mampu yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki keluarga yang harus dinafkahi, Selain itu, agar dana BLM benar-benar diserap oleh masyarakat miskin itu sendiri. Masyarakat yang membangun sendiri dan untuk dirasakan manfaatnya oleh mereka sendiri.

Adapun menurut data yang ada, jumlah pekerja aktif terdapat 22 orang.⁵⁶ berasal dari masyarakat kurang mampu sekitar lingkungan kumuh Gedong Pakuon. Sedangkan jumlah total pekerja adalah 71 orang. Kemudian volume HOK (Harian Orang Kerja) bagi pekerja sebanyak 1.188, untuk tukang 436 HOK.⁵⁷ Selama

⁵⁵ Natsir, Koordinator LKM Sakai Sambayan, Wawancara, 3 Oktober 2016

⁵⁶ Dokumen Rencana Kerja Masyarakat, h.25

⁵⁷ *Ibid*, h.32

pelaksanaan kegiatan fisik, masyarakat didampingi oleh CA teknik yaitu Bapak Saragih. Berikut ini gambaran keaktifan kaum perempuan dalam pelaksanaan NUSP-2 serta dalam kegiatan pengawasan dalam proses pekerjaan fisik.

Ibu-ibu di sana pernah mereka sampe angkat batu, panas-panasan. Partisipasi sih partisipasi, tapi *kalo sampe* angkat batu itukan *kerjaan* laki-laki.⁵⁸

Kadang kita perempuan suka *gregetan* ikut juga angkat-angkat batu, pasir, semen, kadang *kalo* ketuanya *bilang* coba *kesana liat* di RT sana, *nggak* ada kendaraan berangkat *aja* kita.⁵⁹

Hal tersebut menurut pengakuan mereka karena demi kemajuan kampung sendiri, jika bukan mereka sendiri maka siapa lagi yang akan bekerja memperbaiki kampung mereka.

Kita di situ *kan* relawan, istilahnya kita sukarela di situ, bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan masyarakat, untuk kemajuan kampung sendiri. Bukan untuk pribadi, ya *kalo* kita *nggak* sukarela *begitu* ya siapa lagi yang mau majukan kampung sendiri? Namanya *kan* kita relawan jadi pas ada waktu dia yang ke *sono*, jadi bisa *gantian*, karena kita *kan* *nggak* semata-mata di situ, *kalo* kita ada di sini pasti kita *stanby*.⁶⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kegiatan fisik terkadang mengerjakan pekerjaan berat yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan dalam kegiatan pengawasan selama mereka ada di rumah atau ada di lingkungannya maka mereka akan melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan oleh kaum perempuan dilakukan secara sukarela, sehingga tidak mengganggu aktivitas mereka di luar lingkungan.

⁵⁸ Saragih, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 9 Mei 2016

⁵⁹ Sirliana, Tim Pengadaan Barang, Wawancara 26 Juni 2016

⁶⁰ Eliya, Masyarakat, Wawancara 26 Juni 2016

Kegiatan fisik prioritas tahun 2015 berupa infrastruktur jalan dan drainase dengan konstruksi *Paving Block*, *Plat Duicker* Rabat Beton, diselesaikan pada bulan Desember, kemudian penandatanganan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) pada tanggal 30 Desember 2015.⁶¹ Dengan ditandatanganinya SP3K maka tahap NUSP-2 tahun 2015 selesai pula. Kemudian dilanjutkan dengan prioritas tahun 2016. Adapun pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah drainase RT 06, RT 07, RT 13, RT 14, *Paving Block* RT 06, RT 07, RT 12, *Plat Duicker* RT 03, RT 13, RT 14, Rabat Beton, RT 01, RT 03, RT 11, RT 12, RT 14.⁶²

5. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilaksanakan secara terbuka, setiap masyarakat boleh menghadiri ketika diadakan rapat evaluasi. Selain itu juga semakin sering masyarakat ikut serta dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan maka itu lebih baik, tetapi khusus bagi LKM diharuskan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan, sebagai laporan pertanggung jawaban.

Khusus untuk LKM, masyarakat boleh mengawasi tapi secara khusus untuk LKM karena yang tau persis perkembangannya, kalau masyarakat mau setiap hari pun ngawasin boleh silakan justru lebih bagus. Kalau masyarakat bisa tiap hari apalagi RT nya kita wajibkan *ngawasin* di mana tempat kerja di situ RT nya diwajibkan mengawasi. Kalau seumpama *nggak* bagus RT juga yang *kena*.⁶³ Selama ini LKM dan RT yang aktif mengawasi, masyarakat sekitar paling cuma *liat-liat udah*. Kalau rapat khusus evaluasi ada di Musyawarah Kelurahan.⁶⁴

⁶¹ Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) Kelurahan Gedong Pakuon

⁶² Laporan Akhir NUSP-2, LKM Sakai Sambayan, Kelurahan Gedong Pakuon

⁶³ Asep, Masyarakat, Wawancara, 20 Agustus 2016

⁶⁴ Johan, Masyarakat, Wawancara, 20 Agustus 2016

Berdasarkan pernyataan di atas, maka ketua RT diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan di RT masing-masing. Masyarakat juga dipersilakan untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan kegiatan. Selain dilakukan pengawasan secara langsung, disediakan pula papan informasi yang dipasang di kantor LKM, gunanya untuk lebih terbuka kepada masyarakat tentang dana untuk apa digunakan, infrastruktur apa saja yang akan dibangun maupun yang sudah dibangun serta dokumentasi yang penting untuk diketahui oleh masyarakat.

Ada papan informasi, di kantor LKM ada semua di situ. Termasuk anggaran dana juga ada di situ, ada foto-fotonya dari kegiatan awal dari sebelum dibangun, ketika dibangun, baru separo dibangun sampai selesai dibangun ada semua di situ. Jadi masyarakat kalau mau tau silakan.⁶⁵

Berdasarkan observasi penulis, papan informasi tersebut di pasang pada dinding teras kantor LKM Sakai Sambayan, posisi terlindung dari panas maupun hujan agar dokumentasi tidak rusak dan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan pelaksanaan program NUSP-2 di kelurahannya. Akan tetapi papan tersebut ada sejak Program PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan di Kelurahan Gedong Pakuon, tampak pada papan tertulis PNPM Mandiri Perkotaan. Walaupun begitu, tetap dapat dimanfaatkan untuk laporan kegiatan NUSP-2 karena kegiatan PNPM Mandiri telah selesai.⁶⁶ Model evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil pembangunan adalah 0%-50% dan 100%. Pembangunan berhasil jika semua proyek mencapai 100%.

⁶⁵ Sirliana, Tim Pengadaan Barang, Wawancara 26 Juni 2016

⁶⁶ Observasi oleh Penulis, di Kantor LKM Sakai Sambayan, 20 Juli 2016

Tahap Evaluasi dibahas dalam Musyawarah Kelurahan V dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2016 di Kantor Kelurahan Gedong Pakuon. Musyawarah Kelurahan V tepat dihadiri oleh 22 peserta laki-laki dan 22 peserta perempuan. Persoalan yang dibahas tentang pertanggung jawaban penggunaan dana BLM untuk pelaksanaan kegiatan fisik, pembahasan laporan pertanggung jawaban hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), penyerahan seluruh dokumen dan laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, persiapan serah terima hasil pembangunan pembentukan KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat) dan pembahasan rencana usulan pelatihan bagi KPP.

Adapun tugas KPP adalah melakukan pemeliharaan infrastruktur. KPP dibentuk untuk mengawasi infrastruktur yang telah selesai dibangun kemudian melaporkan jika terjadi kerusakan.⁶⁷ Pengurus KPP berasal dari masyarakat setempat dan seluruh RT menjadi anggota sehingga bersama-sama mengawasi.

Semua RT dari 16 RT dilibatkan semua, untuk sekretaris, ketua bendahara itu kita, kalau RT semua jadi anggota jadi kita bersama-sama mengawasi.⁶⁸

Dalam Muskel V masyarakat meminta program NUSP-2 dilanjutkan pada tahun 2016, masyarakat siap untuk memelihara infrastruktur yang dibangun dengan program NUSP-2 tahun 2015.⁶⁹ Dari pelaksanaan NUSP-2 pada tahun 2015 dan

⁶⁷ Pedoman Umum, *Op.Cit*, h.57

⁶⁸ Siti, Masyarakat, Wawancara 26 Juni 2016

⁶⁹ Berita Acara Musyawarah Kelurahan V, Kelurahan Gedong Pakuon

2016 sesuai dengan luasan pemukiman kumuh diperkirakan berkurang $\pm 30\%$ dari total keseluruhan luasan kumuh dan selanjutnya pada pelaksanaan tahun 2017.⁷⁰

Untuk lebih jelas terkait mplementasi dan partisipasi masyarakat Gedong Pakuon dalam Program NUSP-2 dapat dibuat bagan sebagai berikut.

D. Keberlanjutan Pembangunan

Keberlanjutan pembangunan bukan sekedar keberlanjutan fisik saja, melainkan juga keberlanjutan masyarakat untuk tetap aktif merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk perbaikan lingkungan serta kualitas hidupnya. Karena tujuan dari pembangunan melalui NUSP-2 yang berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat adalah menjadikan masyarakat mandiri menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Adapun keberlanjutan pelaksanaan musyawarah maupun rembug tidak berdasarkan pekanan maupun bulanan, akan tetapi dilaksanakan berdasarkan siklus pelaksanaan kegiatan NUSP-2 sebagaimana pada pembahasan sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan CA berikut.

Kegiatan harian tidak ada, kecuali sudah pelaksanaan fisik. Kegiatan musyawarah atau rembug dilaksanakan berdasarkan jadwal tahapan kegiatan NUSP-2, bukan berdasarkan waktu sebulan atau seminggu.⁷¹ Partisipasi masyarakat Gedong Pakuon baik warga miskin maupun perempuan cukup aktif, dalam setiap kegiatan rembug atau musyawarah, mereka aktif memenuhi undangan dan aktif bertanya dan mengungkapkan pendapat.⁷²

⁷⁰ Dokumen NUAP, *Op.Cit*, h.41

⁷¹ Wildan, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 25 April 2016

⁷² Wildan, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 14 April 2016

Sedangkan unsur pimpinan daerah atau ketua RT terkadang lebih didengar pendapat dan usulannya, karena dianggap lebih tau kondisi lingkungannya dan lebih mampu untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Menurut masyarakat, “justru mereka kita undang karena mereka itulah yang tau kondisi masyarakatnya”.⁷³

Adapun kemauan masyarakat untuk hadir dalam agenda NUSP-2 dijelaskan dalam pernyataan berikut.

Ketua LKM nya di sana orang terpendang, jadi mudah mau kumpul sama masyarakatnya. Tapi ya kita-nya juga yang harus *nyesuaikan* dengan jadwal mereka. *Malem-malem* pun jadi lah. Kita tinggal hubungi ketuanya, kita mau ada agenda ini misalnya, nanti ketuanya yang kondisikan masyarakat bisanya kapan. Kita harus siap. Tapi masalahnya mereka selalu menanyakan amplop setiap ada perkumpulan. Inilah yang menjadi tugas kita untuk memahamkan kepada mereka.⁷⁴

Kehadiran masyarakat dalam musyawarah berdasarkan undangan. Masyarakat diundang melalui ketua-ketua RT setempat. Ketua RT berhak memilih siapa saja warganya yang sekiranya dapat mewakili. Sebagaimana dalam ungkapan berikut.

Kalau rapat, ada yang rapat di RT, ada rapat di kelurahan, kadang juga di LKM-nya, kalau rapat di Kelurahan atau di LKM masing-masing RT perwakilan, nanti masing-masing RT mengadakan semua.⁷⁵

Kita rapat *ngundang* RT, nanti RT *suruh* bawa warga berapa untuk perwakilan, *kalo* mau dibawa semua kan *nggak* mungkin, karena kan kebanyakan ya. Jadi kita *ngundang* RT nanti mewakili *umpamanya* 6 orang atau 7 orang satu RT. Terserah bapak RT nya mau bawa siapa, *kebanyakan* di sini orang kuli, ada yang tukang becak, mana saja yang sempat.⁷⁶

⁷³ Sirliana, Tim Pengadaan Barang, Wawancara 26 Juni 2016

⁷⁴ Saragih, *Community Advisor* NUSP-2 di Gedong Pakuon, Wawancara 9 Mei 2016

⁷⁵ M.Zen, Ketua RT 02, Wawancara 13 Juli 2016

⁷⁶ Siti, Masyarakat, Wawancara 13 Juli 2016

Oleh karena itu, ketika program selesai maka tidak ada lagi rembug atau musyawarah yang dilakukan. Selanjutnya masyarakat sendiri yang harus bergerak. Pendamping masyarakat sebagai pembimbing selama program berlangsung.

Kemudian, pembangunan infrastruktur yang diharapkan keberlanjutannya harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Maka infrastruktur yang telah selesai pada tahun 2015 memberi manfaat kepada masyarakat berupa lingkungan yang bersih, menambah pergaulan, dll. Sebagaimana dalam ungkapan berikut.

Manfaatnya ya lingkungannya bersih, jalanan kita bagus, kaya drainase-drainase itu ditutup atasnya kan sudah dicor, jalan yang tadinya sempit jadi lebar, terus salah satunya ya pergaulan, banyak saudara.⁷⁷

Kemudian sebagai bentuk keberlanjutan pembangunan agar hasil pembangunan dapat dirasakan kebermanfaatannya secara terus menerus, maka dibentuklah Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) seperti yang dibentuk pada saat pelaksanaan Musyawarah Kelurahan V. Sementara ini, KPP bertugas memperhatikan apakah ada kerusakan atau tidak, kemudian melaporkan kepada LKM, akan tetapi masih terkendala karena belum ada anggaran untuk kegiatan tersebut. Sebagaimana dalam pernyataan berikut.

Ya sementara ini kita cuma ngawasin aja, kita lapor ke LKM nya, nanti LKM yang memperbaiki. Kalau ada rumput ya masyarakat setempat yang bersihkan. Tapi sementara ini belum berjalan, belum ada anggarannya⁷⁸

Sedangkan pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2016 baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Desember mendatang. Sebagaimana dalam ungkapan berikut.

⁷⁷ Sirliana, Tim Pengadaan Barang, Wawancara 20 Agustus 2016

⁷⁸ Edi Jen, Masyarakat, Wawancara , 10 Agustus 2016

Kalo yang tahun 2016 nanti abis lebaran kemungkinan sudah ada kegiatan, sekitar bulan Agustus September. Kalo sekarang belum ada kegiatan.⁷⁹

Kemudian kekumuhan rentan terulang kembali. Hal ini menurut koordinator LKM adalah sikap dan perilaku masyarakat yang belum bisa menjaga pola hidup bersih, masyarakat belum sadar akibat membuang sampah sembarangan, sehingga lingkungan kumuh yang sudah dibersihkan rentan kotor kembali..

Sekarang kalau bicara kumuh, berapapun anggaran yang digelontorkan di kelurahan itu, tetap dia akan kumuh *nggak* bisa diberantas sepanjang sebelum manusianya. Karena apa, karena warga dimasyarakat kita ini, pola pikir, pola hidup sehatnya belum semua menyadari. Siring sudah kita *bagusin*, sampah lempar, ada bekas *pempers* lempar di siring, bekas nasi bungkus lempar, kumuh lagi. Kalo mbak ikut waktu kegiatan SKS, samping rumah itu kandang ayam. Siring ini sudah kita tutup dengan plat deker *ditarok* kandang ayam, *gimana* *nggak* kumuh lagi.⁸⁰

Oleh karena itu, Koordinator LKM mengharapkan di samping perbaikan lingkungan juga harus ada penyuluhan budaya hidup sehat bagi masyarakat agar sadar dari perilaku kumuhnya, sehingga upaya pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur terjadi keberlanjutan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau.

Saya usul kemarin yang paling dekat itu bidang kesehatan. Posyandu tiap-tiap RT itu kan ada. Selama ini Posyandu itu Ibu-ibu yang ada bayi nimbang, mereka tidak ada insentif. Coba lah kita *door to door*, misalnya “Bu cobalah kita hidup sehat, begini caranya, jangan begini”, kalo secara rutin kontinyu kasih tau dari rumah ke rumah mungkin bisa berubah. Karena yang bisa menyentuh ibu-ibu itu ya perempuan itu. Kalau sekali dua kali ya mungkin belum berubah, tapi kalau didatengin terus lama-lama malu juga kalau didatengin terus, *wah bener juga ini*, sadar juga akhirnya. Makanya perlu juga mahasiswa turun berikan penyuluhan, bagaimana pola hidup sehat kemudian budaya.⁸¹

⁷⁹ Natsir, Koordinator LKM Sakai Sambayan, Wawancara 26 Juni 2016

⁸⁰ Natsir, Koordinator LKM Sakai Sambayan, Wawancara 26 Juni 2016

⁸¹ Natsir, Koordinator LKM Sakai Sambayan, Wawancara 26 Juni 2016

Program penuntasan kemiskinan maupun penuntasan pemukiman kumuh bukan yang pertama kali diimplementasikan di Kelurahan Gedong Pakuon. Sebagai contoh, menurut pengamatan penulis drainase yang berada di RT 13, drainase ukurann besar, tampak yang mengalir melalui drainase tersebut sudah mulai kumuh akibat limbah dan sampah yang dibuang ke dalam drainase, belum seberapa parah kekumuhannya, tetapi itu adalah bangunan pada tahun 2015, baru satu tahun berlalu, apa yang terjadi jika telah beberapa tahun berlalu.

Kemudian, ketika menyusuri wilayah bersama Bu Eliya, warga Gedong Pakuon sepulang dari RT 12 untuk wawancara, di Kelurahan Gedong Pakuon tidak hanya Program NUSP-2 yang diimplementasikan, sebelumnya juga ada PNPM Mandiri Perkotaan, karena masih ada jejak program tersebut berupa sumur bor di RT 13 yang masih berfungsi dan dimanfaatkan airnya oleh masyarakat. Dengan sistem perawatan dan pembayaran listrik diserahkan oleh masyarakat.

Iya, ini dari PNPM, kalo dari NUSP belum, nanti abis lebaran kemungkinan, tuh ada capnya dari PNPM. Sistem bayar listriknya masyarakat, ini kan disambung ke rumah masing-masing yang pakai, jadi mereka bayar masing-masing.⁸²

Oleh karena itu, diperlukan adanya penyuluhan tentang pentingnya hidup bersih dan lingkungan sehat. Agar dana besar yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai program penuntasan kawasan kumuh tidak sia-sia.

⁸² Eliya, Masyarakat, Wawancara 26 Juni 2016

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NUSP-2

A. Implementasi Program NUSP-2

Implementasi Program NUSP-2 di Kelurahan Gedong Pakuon memenuhi lima tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap survey dan identifikasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap terakhir yaitu tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Kelima tahap tersebut telah diimplementasikan pada tahun 2015 dan terakhir Musyawarah Kelurahan V yang dilaksanakan pada bulan Januari 2016 dengan memenuhi tiga basis utama pelaksanaan program NUSP-2 yaitu Basis Kebutuhan Masyarakat, Basis Partisipasi Masyarakat dan Basis Pengelolaan Masyarakat.

1. Basis Kebutuhan Masyarakat

Basis kebutuhan masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat agar mau berpartisipasi (BAB II, h.31). Semakin program tersebut dibutuhkan oleh masyarakat semakin menarik bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan tersebut. Basis kebutuhan telah diimplementasikan melalui kegiatan Survey Kampung Sendiri untuk mengetahui permasalahan kekumuhan di lingkungan sasaran program, kemudian disusun Dokumen Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (NUAP/ *Neighborhood Upgrading Action Plan*) yang disusun secara partisipatif.

Dokumen NUAP semacam proposal pengajuan dana untuk kegiatan perbaikan lingkungan yang dibuat langsung oleh masyarakat melalui LKM dan didampingi oleh

tim pendamping masyarakat. Akan tetapi pada dasarnya, jenis-jenis infrastruktur yang boleh diusulkan oleh masyarakat sudah ditentukan oleh pemerintah dan pihak pemberi pinjaman dana yaitu ADB.

Pihak pemerintah dan ADB sudah menentukan jenis-jenis komponen dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini sama saja dengan program yang berasal dari pemerintah, maka pemerintah juga yang merencanakan, kemudian masyarakatlah yang menyesuaikan kebutuhan dengan yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

Hanya saja penentuan prioritas pembangunan menjadi hak masyarakat untuk menentukan sendiri. Jadi, jenis infrastruktur yang akan terlebih dahulu dibangun sesuai dengan tingkat kekumuhannya maka itulah ditentukan sendiri oleh masyarakat melalui LKM dan didampingi oleh pendamping masyarakat, kemudian diusulkan dalam dokumen NUAP.

2. Basis Partisipasi Masyarakat

Basis partisipasi masyarakat diimplementasikan melalui rembug dan musyawarah. Pada dasarnya kegiatan ini untuk menggali kebutuhan masyarakat terutama kaum perempuan sehingga dibentuk forum Rembug Khusus Perempuan (RKP) sampai tiga tahap. Kemudian dibentuk forum untuk masyarakat secara umum yaitu forum Musyawarah Kelurahan (Muskel) sampai lima tahap. Forum inilah yang menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan prioritas pembangunan.

Secara quorum setiap pelaksanaan musyawarah dan rembug, kehadiran masyarakat sesuai dengan target yang dicapai, yaitu minimal 20 warga perempuan yang hadir dalam Rembug Khusus Perempuan, dan pada masyarakat Gedong Pakuon mencapai 30 orang. Sedangkan untuk kegiatan Musyawarah Kelurahan minimal 40 warga yang hadir, terdiri dari 40% wanita dan 60% laki-laki. Di Gedong Pakuon telah terpenuhi jumlah tersebut.

Bagi masyarakat yang 97, 7% beragama Islam, maka musyawarah merupakan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan kebiasaan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, para sahabatnya dan orang-orang sholih terdahulu sebagai cara untuk menyatukan langkah dalam pembangunan lingkungan yang lebih baik, demi kepentingan bersama. Dengan adanya musyawarah atau rembug diharapkan akan tercapai pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum.

Forum-forum tersebut dikonsep agar masyarakat berpartisipasi sejak penentuan keputusan prioritas pembangunan. Forum tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan waktu yang rutin, tetapi dilaksanakan berdasarkan tahapan kegiatan NUSP-2. Konsep seperti ini baik untuk menjadikan setiap pertemuan lebih terfokus dan terarah pada masalah yang harus diselesaikan. Sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih efektif dan efisien, karena setiap pertemuan akan membahas masalah yang berbeda dan sudah jelas apa saja yang akan dibahas, yang merupakan keberlanjutan dari penyelesaian masalah sebelumnya. Hal ini akan menghindari kasus berputar-putar pada masalah yang sama setiap kali diadakan pertemuan warga.

Kemudian dalam proses kegiatan fisik dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan meminimalisasi intervensi dari pihak luar. Sehingga sebisa mungkin masyarakat lokal yang melaksanakan dan merasakan manfaat dari hasil pembangunan. Maka, basis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik atau pembangunan lebih ditekankan pada pemanfaatan kemampuan sumberdaya tenaga yang dimiliki masyarakat.

3. Basis Pengelolaan Masyarakat

Implementasi NUSP-2 di Gedong Pakuon melalui LKM Sakai Sambayan yang dikoordinatori oleh Bapak Natsir sebagai wujud dari basis pengelolaan masyarakat. Sehingga masyarakat Gedong Pakuon belajar untuk bekerja dalam sistem keorganisasian serta birokrasi dan mengenal berbagai lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Sehingga peran pendamping masyarakat dalam hal ini sebagai pembimbing masyarakat untuk memahami alur birokrasi yang benar ketika hendak menyampaikan suatu hal. Misal terkait usulan mengenai pembangunan infrastruktur di wilayahnya sendiri.

Implementasi program NUSP-2 di Kelurahan Gedong Pakuon dapat dikatakan relatif berhasil memberikan manfaat kepada masyarakat tergantung dari sudut pandang cara melihatnya. Apabila dilihat dari pembangunan infrastruktur yang telah berhasil dibangun maka lingkungan yang awalnya kumuh menjadi lingkungan yang bersih. Masyarakat yang berpenghasilan rendah memperoleh upah dari hasil partisipasinya membangun infrastruktur di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian

dengan adanya program NUSP-2 bermanfaat untuk memperluas pergaulan, karena akan sering diadakan pertemuan-pertemuan warga yang memungkinkan masyarakat untuk saling bertemu dan saling menjalin silaturahmi. Selain itu juga untuk mengokohkan persatuan masyarakat dengan adanya kerja sama dalam membangun wilayah tempat tinggalnya.

Namun, apabila dilihat dari sudut pandang berbeda, adanya program NUSP-2 dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat pada program pembangunan dari pemerintah. Karena program NUSP-2 bukan program yang pertama kali diimplementasikan di Kelurahan Gedong Pakuon. Sebelumnya telah ada Program yang sejenis yaitu PNPM Mandiri Perkotaan yang bergerak pada bidang infrastruktur seperti sumur bor, paving, dll serta pemberian dana pinjaman (BAB III, h.89 dan 95).

Jika program- program pembangunan yang diimplementasikan dalam suatu kelurahan mampu menjadikan masyarakat mandiri tentu tidak perlu lagi ada program lain yang sejenis akan diimplementasikan di tempat yang sama. Sebelum diimplementasikan NUSP-2 di Gedong Pakuon sudah diimplementasikan PNPM Mandiri Perkotaan dengan proyek yang sama. Program berhasil menuntaskan masalah yang terjadi saat itu, tetapi ketika terjadi masalah yang sama, akan ada lagi program yang sama diimplementasikan. Sehingga masyarakat terbiasa bergantung pada program pemerintah.

B. Partisipasi Masyarakat

Semakin program itu dibutuhkan oleh masyarakat dan semakin bermanfaat secara langsung maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakatnya. Hal ini dikarenakan “kebutuhan” dan “manfaat” menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi (BAB II, h.31). Kemudian kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi sudah dibuka melalui program NUSP-2 yang menjamin partisipasi aktif masyarakat terutama kaum perempuan dan pemangku kepentingan daerah. Maka selanjutnya ada atau tidak kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, karena kesempatan saja tanpa ada kemampuan dan kemauan masyarakat maka partisipasi tidak akan terlaksana (BAB II, h.27).

1. Kemampuan Masyarakat untuk Berpartisipasi

Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dilihat dari kemampuan untuk menyampaikan pendapat, ide-ide atau alternatif solusi serta kemampuan secara materi. Kemampuan dalam menyampaikan pendapat sudah cukup aktif. Terutama kaum perempuan, aktif dalam menyampaikan usulan prioritas pembangunan, kemudian berswadaya menyiapkan konsumsi. Bahkan mampu melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kaum laki-laki (BAB III, h.87).

Kemudian kemampuan dalam hal swadaya dalam bentuk materi, masyarakat berperan dalam menyediakan makanan dan minuman ketika pelaksanaan kegiatan fisik maupun ketika acara rembug dan musyawarah. Kemudian swadaya dana sebesar Rp 30.000.000,- (BAB III, h.82) pada pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2015.

Kemudian masyarakat yang mampu secara keterampilan maupun tenaga akan terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur.

Namun, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 berupa *paving block*, *plat duicker* dan drainase hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat saja, yaitu 22 orang sebagai tukang dan 71 sebagai pekerja. Selain itu, infrastruktur yang dibangun cukup sederhana, sehingga memungkinkan masyarakat biasa dapat membantu proses penyelesaiannya. Seperti pemasangan paving dan pembuatan drainase lingkungan.

Masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan menjadi indikator masyarakat yang berdaya. Karena partisipasi merupakan proses untuk memampukan (memberdayakan) masyarakat lokal untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena itu, masyarakat Gedong Pakuon dapat dikatakan masyarakat yang berdaya dalam hal swadaya ide dan tenaga. Tetapi, ketika dihadapkan pada masalah materi atau dana, masyarakat belum mampu untuk swadaya yang lebih besar. Hal ini karena kondisi perekonomian mereka yang sebagian besar masih berada pada garis kemiskinan. Sehingga belum mampu untuk berswadaya yang lebih besar dari segi materi.

Usaha masyarakat untuk berpartisipasi dalam perbaikan lingkungan berdasarkan kemampuannya sudah cukup baik. Karena usaha tersebut sebagai bentuk tindakan nyata untuk perubahan menjadi lebih baik atau perwujudan nyata dari sebuah cita-cita hidup di lingkungan yang nyaman dan layak. Permasalahan dana dan

sebagainya pasti akan ada jalan keluar yang Allah berikan kepada setiap orang yang mau berusaha terlebih dahulu, “bekerjalah” perintah Allah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 105. Kemudian Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk bersungguh-sungguh dalam semua hal yang bermanfaat. Manfaat dalam hal ini dapat diartikan untuk dunia dan akhirat.

Syaratnya jangan sampai melakukan kerusakan sebagaimana yang telah Allah *Subhanahu wa Ta’ala* larang dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 11-12 (BAB II, h.37), dalam kegiatan pembangunan dapat diartikan sebagai usaha perbaikan lingkungan melalui pertimbangan tertentu. Misalnya pembangunan MCK komunal maka pembangunan *septic tank* harus memenuhi jarak tertentu agar tidak mencemari sumber air atau sumur warga. Kemudian pembangunan drainase harus memperhatikan lingkungan agar limbah tidak menjadikan lingkungan semakin tercemar.

Maka, orang-orang yang berbuat kebaikan dan tidak berbuat kerusakan akan dekat dengan *Rahmat* Allah sebagaimana dala Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 56 (BAB II, h.375). Orang yang dekat dengan *Rahmat* Allah maka apa yang tidak mungkin bagi Allah untuk membantu hamba-Nya sekedar untuk membangun lingkungan yang nyaman, bersih dan layak, jauh dari kekumuhan. Oleh karena itu, kemampuan masyarakat harus selalu mengarah pada perbaikan lingkungan.

2. Kemauan Berpartisipasi

Kemauan masyarakat Gedong Pakuon untuk terlibat dalam pembangunan dapat dilihat dari keterlibatannya dalam setiap tahap NUSP-2. Usia produktif masyarakat Gedong Pakuon mencapai 49,8% pada tahun 2015. Tetapi ketika pelaksanaan kegiatan rembug dan musyawarah kehadirannya berkisar antara 30 warga sampai 45 warga.

Jika dilihat dari sudut pandang konsep NUSP-2 kehadiran masyarakat dalam rapat dengan jumlah tersebut sudah memenuhi persyaratan atau quorum, artinya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan sudah baik. Sudah ada kemauan masyarakat untuk memperbaiki mutu hidupnya. Karena tidak mungkin efektif ribuan masyarakat hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh NUSP-2, sehingga jumlah tersebut sudah cukup mewakili jumlah masyarakat penerima manfaat lainnya.

Kemauan masyarakat tersebut dilakukan secara sukarela ketika kegiatan musyawarah dan rembug. Peran koordinator LKM mempengaruhi tingkat kehadiran masyarakat. Yaitu bagaimana cara komunikasi koordinator kepada masyarakat. Koordinator LKM memang disegani oleh masyarakat, tetapi beliau tidak serta merta memaksa masyarakat untuk hadir dalam setiap agenda yang diadakan oleh NUSP-2. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan CA untuk menyesuaikan dengan waktu masyarakat, bahkan jika masyarakat hanya bisa mengadakan agenda pada malam hari hal itu tidak masalah.

Hanya saja tugas CA adalah memahami kepada masyarakat untuk tidak terlalu melihat imbalan apa yang akan diterima ketika berpartisipasi dalam pembangunan. Dikarenakan mendapat imbalan atau tidak, tetap pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Maka, dibutuhkan peran edukasional dari pendamping masyarakat dan lembaga sebagai agen perubahan.

Selanjutnya kemauan masyarakat yang dilakukan secara sukarela adalah dalam pengawasan dan pemeliharaan hasil infrastruktur. Walaupun hanya melihat-lihat pekerja yang sedang melakukan pembangunan. Kewajiban melakukan pengawasan dibebankan kepada LKM sebagai penanggung jawab laporan serta ketua masing-masing RT. Keterbukaan dalam anggaran dilakukan dengan menempelkan laporan keuangan pada papan informasi yang dipasang dinding luar pada sekretariat LKM Sakai Sambayan, serta dipasang pula dokumentasi hasil pembangunan dari 0% - 50% -100%.

Sedangkan kemauan dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur sudah dibentuk tim KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat) dengan keanggotaan dari masing-masing RT, akan tetapi belum berjalan maksimal karena belum ada anggarannya. Selain itu, masalah kekumuhan yang rentan kembali lagi di lingkungan kumuh Gedong Pakuon adalah karena budaya masyarakatnya yang masih jauh dari kebersihan. Sehingga membuang sampah sembarangan serta rasa memiliki hasil pembangunan belum sepenuhnya tertanam di hati masyarakat.

Hal ini diperlukan peran edukasional dari pendamping masyarakat atau pihak lain seperti LKM, ibu-ibu PKK atau kader Posyandu. Perlu adanya usaha penyadaran yang terus-menerus dilakukan. Dapat pula dilakukan penyadaran melalui pengajian yang dilakukan oleh ibu-ibu Kelurahan Gedong Pakuon dengan memasukkan taushiyah tentang ajaran hidup bersih agama Islam, mengingat sebagian besar penduduk adalah beragama Islam. Ibu-ibu menjadi sasaran utama proses penyadaran ini, karena limbah atau sampah sebagian besar berasal dari rumah tangga.

Proses penyelesaian masalah sampah memerlukan keterlibatan seluruh sub-sistem di masyarakat, seperti pemerintah sebagai pembuat peraturan, lembaga pendidikan sebagai lembaga yang membentuk karakter generasi bangsa, serta yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat itu sendiri. Dapat pula diberlakukan sanksi bagi yang membuang sampah sembarangan. Hal ini untuk memberi efek jera bagi masyarakat. Sedangkan keterlibatan atau peran aktif masyarakat dalam masalah sampah dapat dilakukan dengan R3 (*Reuse, Recycle, Reduce*) kemudian memisahkan sampah kategori B3 (Bahan Berbahaya, Bercun).

Akan tetapi, tidak bisa hanya menuntut masyarakat untuk hidup bersih sedangkan fasilitas kebersihan tidak memadai, misal sulitnya menemukan tempat sampah di tempat umum, atau tidak tersedia lokasi tempat pembuangan akhir, sehingga sampah dibuang di mana saja atau di lahan kosong. Oleh karena itu, proyek infrastruktur NUSP-2 di Gedong Pakuon mencakup sarana persampahan, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses penyadaran yang terus-menerus.

C. Stagnasi Program NUSP-2

Sebagaimana dalam teori pada BAB II h.24, Jika masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahap dan hanya bersifat pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan oleh pelaku perubahan (misalnya, pihak lembaga pemerintah, LSM maupun sektor swasta), masyarakat cenderung akan menjadi *dependent* (tergantung) pada pelaku perubahan. Seharusnya masyarakat secara mandiri akan tetap melakukan pembangunan dengan ada atau tidaknya program dari pemerintah. Akan tetapi keberlanjutan tidak terlaksana bahkan masalah yang menjadi fokus penyelesaian kemudian kembali lagi. Hal ini yang menyebabkan stagnasi program NUSP-2 di Gedong Pakuon. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirinci 3 penyebab stagnasi program yaitu Budaya Masyarakat dan Kondisi Ekonomi Masyarakat.

1. Rasa Memiliki

Jika membaca sejarah Islam pada masa Khalifah Umar Bin Khattab, perencanaan pembangunan kota dibuat oleh Khalifah (pemerintah), keputusan prioritas pembangunan juga ditentukan oleh Khalifah, akan tetapi benar-benar melalui survey kondisi yang sebenarnya. Setelah didapatkan gambaran kota sasaran pembangunan, maka selanjutnya ditentukan pembangunan yang paling tepat dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. (BAB II, h.46-47)

Sedangkan program pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah saat ini berdasarkan gambaran secara umum, kemudian disimpulkan kebutuhan secara umum, maka masyarakat yang menyesuaikan dengan rencana pemerintah. Maka, masalah

yang kemudian muncul adalah masyarakat kurang merasa memiliki (*sense of belonging*) untuk merawat dan memelihara hasil pembangunan dari pemerintah, bisa jadi bukan itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka. Misalnya, jalan setapak yang sudah diperbaiki, diperluas kemudian oleh mereka tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, misalnya menjadi tempat untuk menaruh kandang ayam (BAB III, h.94).

Pemerintah menentukan jenis-jenis pembangunan tersebut sebenarnya karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan ingin segera menyelesaikan masalah dengan cara cepat. Selain itu, terbatasnya dana APBN untuk pembangunan yang kompleks menjadikan pemerintah memilih kebijakan untuk bekerja sama dengan pihak pemberi dana dari luar. Diberikan kepada masyarakat sebagai hibah, sedangkan di tingkat pemerintahan menjadi hutang.

Misalnya program pembangunan infrastruktur hanya fokus pada masalah infrastruktur, padahal menurunnya kualitas infrastruktur juga dapat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat. Sehingga program pembangunan memiliki fokus masing-masing. Karena pihak pemberi pinjaman dana bukan sekedar memberi pinjaman, tetapi juga menginginkan hasil yang dapat dilihat, yang dibuktikan dalam bentuk laporan akhir. Maka, wajar jika terjadi rasa kurang memiliki yang menjadikan masyarakat bersama-sama untuk memelihara hasil pembangunan, karena pembangunan yang dilaksanakan untuk mengejar target seperti yang diharapkan oleh pemberi pinjaman dana.

2. Budaya

Kebersihan merupakan budaya yang penting untuk dibiasakan di masyarakat. Karena permasalahan kumuh yang terjadi di Gedong Pakuon adalah akibat dari kebiasaan masyarakat yang masih kumuh. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator LKM, bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi budaya yang sulit ditinggalkan (BAB III, h.94). Maka diperlukan penyadaran yang terus menerus terkait kebiasaan hidup bersih, mengingat sebagian besar warga Gedong Pakuon beragama Islam yang sangat memperhatikan urusan kebersihan. Jika umat Islam mengamalkan ajaran Islamnya tentu akan sangat memperhatikan kebersihan. Bukankah salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadits maupun hadats? Sehingga tidak mungkin umat Islam yang diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari-semalam tidak akan memperhatikan kebersihan baik lingkungan, tempat tinggal, pakaian apalagi kebersihan diri sendiri.

Maka dari itu, program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan menjadi lingkungan yang jauh dari kekumuhan maka harus lebih serius untuk menyadarkan masyarakat kepada pola hidup bersih. Sehingga tidak perlu lagi program yang sama diimplementasikan pada lokasi yang sama setiap periodenya.

Jika kebersihan sudah menjadi budaya yang sangat melekat di masyarakat, maka dapat mengurangi anggaran pemerintah untuk membiayai program-program penuntasan kekumuhan. Begitu pula ketika kebersihan belum menjadi budaya yang mengakar di masyarakat, bisa jadi berapa pun dana yang dikeluarkan untuk

membiayai kegiatan-kegiatan tersebut, maka kekumuhan akan kembali lagi. Sehingga jangan sampai program yang dibiayai oleh pemerintah dengan dana yang besar apalagi dana berasal dari pinjaman asing hanya memberikan efek sementara dan hanya menyisakan hutang yang terus berbunga.

3. Ekonomi

Pembangunan yang cenderung bergantung kepada pemerintah sehingga ketika dana belum sampai maka pembangunan menjadi terhambat, padahal permasalahan kekumuhan harus segera dituntaskan agar tidak membawa dampak yang lebih buruk lagi bagi kesehatan masyarakat. Hal ini dikarenakan pembangunan memerlukan dana yang cukup besar, sehingga mengharapkan kemandirian masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh mencapai 73,95%, sedangkan penghasilan rata-rata berada pada angka dibawah 1 juta masih mendominasi, mencapai 55,16% akan sulit tercapai. Sehingga, jika dana dari pemerintah belum sampai kepada masyarakat maka pembangunan tidak akan terlaksana, karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja mengandalkan penghasilan Rp 1 juta, bagaimana bisa masyarakat akan memikirkan pembangunan di lingkungannya. Oleh karena itu, selain peningkatan kualitas pemukiman juga diperlukan peningkatan kualitas ekonomi.

Pada dasarnya perbaikan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi tidak secara langsung. Misalnya bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, maka infrastruktur yang baik akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran distribusi barang. Tetapi bagi masyarakat yang bekerja sebagai

buruh, pembangunan infrastruktur tidak secara langsung memperoleh manfaat secara ekonomi. Tetapi setidaknya dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menjadikan lingkungan bersih, bebas dari kekumuhan.

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik tidak jauh berbeda dari cara mengalihkan masyarakat dari profesinya. Masyarakat yang awalnya bekerja sebagai buruh dialihkan sementara menjadi pekerja atau tukang untuk pembangunan lingkungan tempat tinggalnya sendiri, kemudian mendapatkan upah dari hasil usahanya. Setelah proyek selesai maka masyarakat kembali lagi kepada profesinya sebagai buruh. Tidak ada keberlanjutan secara ekonomi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai buruh. Maka perlu adanya peningkatan etos kerja bagi masyarakat. Bukan sekedar bekerja dan bekerja tanpa ada upaya perubahan dari cara kerjanya. Dalam hal ini dibutuhkan kembali peran edukasional dari pendamping masyarakat atau dari LKM itu sendiri untuk membangkitkan etos kerja masyarakat, mengingat memiliki etos kerja tinggi merupakan ajaran Islam.

Penting untuk ditegaskan, bahwa masyarakat Gedong Pakuon bukanlah masyarakat yang malas dalam bekerja. Mereka sibuk bekerja sejak pagi hingga sore hari, ada yang berprofesi sebagai tukang becak, kuli dan buruh harian lepas. Hal ini dibuktikan dari sempat atau tidaknya masyarakat untuk hadir dalam agenda, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka adalah pekerja keras. Akan tetapi kerja keras saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas ekonomi, perlu adanya kerja cerdas bukan sekedar kerja keras. Hal ini adalah makna yang sebenarnya dalam etos kerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada BAB IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi NUSP-2 di Gedong Pakuon telah memenuhi lima tahap kegiatan NUSP-2, yaitu tahap persiapan, tahap survey dan identifikasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Kelima tahap tersebut dilaksanakan berdasarkan 3 basis utama, yaitu basis kebutuhan, basis partisipasi dan basis pengelolaan masyarakat. Tahap yang kurang maksimal dilaksanakan adalah tahap kelima, yaitu dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah selesai dibangun.
2. Partisipasi masyarakat dilihat dari kemauan untuk berpartisipasi yaitu, melaksanakan secara sukarela ketika kegiatan Survey Kampung Sendiri, Rembug Khusus Perempuan, Musyawarah Kelurahan, Evaluasi dan Pemeliharaan Hasil Pembangunan. Sedangkan pada pelaksana kegiatan fisik hanya melibatkan beberapa masyarakat saja, kemudian mendapat imbalan atas partisipasinya. Adapun partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik sekedar pengalihan pekerjaan sementara dari masyarakat yang bekerja sebagai buruh menjadi bekerja sebagai tukang untuk pembangunan di lingkungannya. Setelah itu tidak ada keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat buruh. Partisipasi masyarakat dilihat dari kemampuannya berpartisipasi, maka masyarakat Gedong

Pakuon mampu berpartisipasi dalam hal mengungkapkan pendapatnya terkait prioritas pembangunan serta mampu dalam hal tenaga.

3. Penyebab stagnasi atau ketidakberlanjutan program NUSP-2 di Gedong Pakuon dipengaruhi oleh pertama, kurangnya rasa memiliki sehingga masyarakat kurang peduli dengan hasil pembangunan, ketika tidak ada yang menggerakkan untuk memelihara atau memperbaiki maka tidak ada pula yang bergerak. Kedua, budaya masyarakat yang masih kumuh, sehingga beberapa program yang sama akan diimplementasikan di tempat yang sama, hanya tahun saja yang berbeda. Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Sebesar 73,95 % masyarakat berprofesi sebagai buruh dengan penghasilan di bawah 1 juta sebesar 55,16 %, maka dalam pembangunan fisik masyarakat tersebut tidak mampu secara materi.

B. Saran

1. Kepada pemerintah agar perencanaan pembangunan tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter dan budaya secara terus-menerus untuk hidup bersih. Karena merubah karakter itu sulit, membutuhkan waktu dan proses yang lama. Hal ini agar dana besar yang dikeluarkan untuk membiayai program penuntasan kekumuhan tidak sia-sia, apalagi jika dana tersebut berasal dari dana pinjaman dari luar seperti ADB. Jika tidak ada upaya membangun karakter atau budaya bersih maka sebarang dana yang dianggarkan tetap saja kekumuhan terjadi kembali, hanya menyisakan hutang Negara yang semakin bertambah.

2. Kepada pendamping masyarakat yang telah diamanahkan di kelurahan dampingannya agar tidak bosan dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya memanfaatkan, menjaga dan memelihara hasil pembangunan, Karena pendamping masyarakat dapat menjadi tangan kanan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat untuk merubah karakter masyarakat.
3. Kepada Masyarakat Gedong Pakuon dan masyarakat lainnya yang menjadi sasaran program-program pembangunan agar tidak bergantung pada ada atau tidaknya program dari pemerintah untuk melakukan perbaikan. Karena perubahan itu ditentukan oleh diri sendiri, Tugas manusia hanya bekerja, berusaha, melakukan perbaikan sesuai kemampuan, tidak merusak lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, nanti Allah yang akan memberikan keajaiban pertolongan berupa kemampuan secara finansial, atau dengan adanya program sejenis atau bahkan pertolongan dari arah yang tidak pernah disangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Umar Abdillah. 2014. *Muslim Hebat*. Sukoharjo: CV Arrisalah Cipta Media
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1980. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- Britha Mikkelsen. 2005. *Methods for Development Work and Research*. New Delhi: SAGE Publications
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Special for Women*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an
- Djayadi. 2008. *Tata Kota Menurut Islam*. Jakarta: Khalifa
- Edi Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harry Hikmat. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Hasim dan Remiswal. 2009. *Community Development Berbasis Ekosistem (Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat)*. Jakarta: Diadit Media
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Irawan Soehartono. 2008. *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet.ke-8. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Isbandi Rukminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- John W. Creswell. 2010. *Research Design Kualitatif, Quantitatif, and Mixed Methods Approaches. Third Edition*, diterjemahkan oleh Ahmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lexy J. Moleong. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bisnis dan Sosial)*. Yogyakarta: Ekonisia
- Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafe'i. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Panduan Penyusunan Basis Data Kumuh, *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2(NUSP-2)*
- Pedoman Umum. 2015. *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2)*. Kementrian PU dan Perumahan Rakyat
- Petunjuk Teknis, Penyusunan *Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP)*, Kemen PU dan Perumahan Rakyat
- Robert K.Yin. 2002. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. diterjemahkan oleh Djauzi Mudzakir. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sanapiah Faisal. 2008. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, cet.ke-8. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- . 2012. *Pembangunan Masyarakat, Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury. 2013. *Shahih Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Zenal Mutaqin.cet.ke-4. Bandung: Penerbit Jabal
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfa Beta

Sumber Karya Ilmiah

- Irma Septiani, “Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dengan Penggunaan Metode CLEAR di Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi UtaraKota Bekasi”, (Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, Depok, 2012)
- Ishak Kadir, Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Dampak Program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) terhadap Peningkatan

Kualitas Pemukiman Masyarakat Kelurahan Kendari Caddi Kota Kendari, *Metropilar*, Vol.7, (Oktober 2009)

Suhendar, “Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri di Desa Karyasari Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang”, (Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang Banten, 2012)

Sumber Internet

Abu Abdilbarr, Hadits Anjuran Bercocok Tanam (bagian 1), (<https://abuabdilbarr.wordpress.com/2007/12/07/anjuran-islam-untuk-bercocok-tanam-1>), diakses 4 September 2016

Anca Oktaria, 10 Hadits tentang Kebersihan <http://www.muslimdaily.net/artikel/10-hadist-tentang-kesehatan-dan-kebersihan.html> diakses 4 September 2016

Nurrohmah, Hadits Tentang Kebersihan, <http://www.edukasi.in/2015/08/hadits-tentang-kebersihan.html> diakses 4 September 2016

Wiwin Hendriani, Dua Langkah Analisis Tematik (Boyatzis, 1998) <https://wiwinhendriani.com/2012/12/17/dua-langkah-analisis-tematik-boyatzis-1998/> diakses 10 April 2016

Sumber Dokumen

Dokumen NUAP (*Neighborhood Upgrading Action Plan*) Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan, Kelurahan Gedong Pakuon: LKM Sakai Sambayan

Dokumen RKM (Rencana Kerja Masyarakat) Tahun 2015, Kelurahan Gedong Pakuon: LKM Sakai Sambayan

Data Laporan Kependudukan Tahun 2016, Kelurahan Gedong Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung

LAMPIRAN I

DAFTAR SAMPEL

No	Nama Sampel	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	Anton Idward	Laki-laki		Lurah GP
2	Muhammad Natsir	Laki-laki	RT 12	Koordinator LKM
3	Edijen	Laki-laki	RT 01	Masyarakat
4	Johan	Laki-laki	RT 02	Masyarakat
5	M.Zen	Laki-laki	RT 02	Ketua RT
6	Sirliyana	Perempuan	RT 12	Tim Pengadaan Brg
7	Siti Juro	Perempuan	RT 13	Masyarakat
8	Eliya	Perempuan	RT 13	Relawan
9	Aksan	Laki-laki	RT 03	Masyarakat
10	Akmal	Laki-laki	RT 07	Pekerja
11	Didik Santari	Laki-laki	RT 11	Masyarakat
12	Enal Agustoni	Laki-laki	RT 13	Masyarakat
13	Sukirman	Laki-laki	RT 07	Masyarakat
14	Adi Barcon	Laki-laki	Tanjung Senang	<i>City Coordinator</i>
15	Wildan Kesai	Laki-laki	Way Kandis	<i>Community Advisor</i>
16	Jantuahman Saragih	Laki-laki	Way Kandis	<i>Community Advisor</i>

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

LAMPIRAN II

Nama Responden/Kegiatan	:
Alamat	:
Lokasi Wawancara/Observasi	:
Waktu/Tanggal	:
Jabatan/Pekerjaan	:

Aspek	Indikator	Sub Indikator	Hasil (Wawancara, Observasi, Dokumentasi)
Perencanaan Program	Masyarakat aktif: 1. Menghadiri kegiatan musyawarah/proses perencanaan kegiatan 2. Menyampaikan pendapat dan usulan kegiatan yang menjadi kebutuhannya. 3. Tersusun program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	1. Masyarakat terlibat dalam kegiatan kampung sendiri (SKS) 2. Masyarakat hadir dalam musyawarah kelurahan/rembug khusus perempuan 3. Masyarakat merasa mudah dalam menyampaikan pendapat, mengungkapkan kebutuhannya dan bertanya dalam rapat	
Pelaksanaan Program	1. Masyarakat antusias dalam melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan 2. Melibatkan kaum perempuan dalam proses pembangunan sesuai dengan fitrahnya.	1. Masyarakat ikut serta dalam pembersihan lokal yang menjadi sasaran pembangunan 2. Masyarakat turut serta dalam mobilisasi bahan material (pasir, batu, plat, semen, dll)	

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Masyarakat siap sedia bergotong royong, bekerja sama untuk segera terselesaikannya pembangunan 4. Partisipasi masyarakat tidak terpengaruh oleh ada atau tidaknya imbalan yang diterima 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Masyarakat bersama-sama, bekerja sama melakukan pembangunan, bukan pihak lain (pihak swasta). 4. Ada tidaknya imbalan yang diterima, masyarakat tetap bekerja (sukarela) 	
Pemantauan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan 2. Transparansi penggunaan anggaran 3. Disediakkannya papan informasi atau laporan kegiatan yang mudah diakses oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keaktifan masyarakat melakukan pemantauan secara langsung maupun melalui papan informasi jika disediakan 2. Teknis pelaporan penggunaan anggaran 	
Pengelolaan dan Pemeliharaan pasca konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat dalam menjaga atau memelihara infrastruktur yang telah dibangun 2. Terbentuk lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat memiliki rasa "memiliki" dan kesadaran untuk mengelola dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun. 2. Masyarakat merasakan manfaat dari program pembangunan yang telah terlaksana 	

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara kepada Masyarakat

Tahap Kegiatan	Pertanyaan Wawancara
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mengumpulkan data tersebut? 2. Mengapa Bapak/Ibu untuk ikut serta dalam kegiatan SKS? 3. Mengapa Bapak/Ibu menghadiri musyawarah kelurahan? 4. Mengapa Ibu mneghadiri rembug khusus perempuan?
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan program NUSP-2? 6. Siapa saja yang turut serta dalam proses pembangunan infrastruktur dari program NUSP-2? 7. Mengapa Bapak/Ibu ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? 8. Apa saja imbalan yang Bapak/Ibu peroleh? 9. Berapa jumlah/ nominal imbalan yang Bapak/Ibu peroleh?
Pemantauan dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 10. Mengapa Bapak/Ibu memantau jalannya program pembangunan infrastruktur? 11. Apa saja kegiatan yang bisa Bapak/Ibu lakukan untuk memantau kegiatan tersebut? 12. Informasi apa saja yang ditulis dalam papan informasi?
Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasca Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 13. Manfaat apa saja yang sudah Bapak/Ibu rasakan? 14. Kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mengelola, memelihara hasil dari pembangunan? 15. Jika terdapat kerusakan, siapakah yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya? 16. Jika terdapat biaya harian seperti listrik, bagaimana cara pembayarannya?

Pedoman Wawancara kepada Pendamping Masyarakat

Tahap Kegiatan	Pertanyaan Wawancara
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pedoman umum program NUSP-2 bahwa program ini menjamin partisipasi masyarakat secara aktif, partisipasi dalam hal apa saja yang dimaksud dalam pedoman tersebut? 2. Mengapa partisipasi masyarakat secara aktif sangat penting dalam program NUSP-2? 3. Siapa saja masyarakat yang harus hadir dalam kegiatan musyawarah? 4. Apakah masyarakat Gedong Pakuon (GP) mudah untuk diajak berpartisipasi dalam musyawarah maupun rembug? 5. Apakah masyarakat GP aktif dalam menyampaikan pendapat/usulan maupun bertanya? 6. Bagaimana strategi yang Anda lakukan untuk meningkatkan minat masyarakat GP agar berpartisipasi?

	<p>7. Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam mengajak masyarakat GP untuk berpartisipasi?</p> <p>8. Bagaimana Anda menghadapi kendala-kendala tersebut?</p>
Pelaksanaan	<p>9. Dalam hal apa saja masyarakat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur?</p> <p>10. Apakah dalam proses pembangunan tersebut melibatkan pihak swasta? Jika Ya, mengapa? Jika tidak, mengapa?</p> <p>11. Bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan, apakah mereka diberi imbalan?</p> <p>12. Atas permintaan siapakah imbalan tersebut diberikan?</p> <p>13. Apakah dengan adanya imbalan akan meningkatkan etos kerja masyarakat?</p> <p>14. Bagaimana peran perempuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut?</p> <p>15. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?</p> <p>16. Bagaimana Anda menghadapi kendala-kendala tersebut?</p>
Pemantauan dan Evaluasi	<p>17. Apa saja tugas pendamping masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi?</p> <p>18. Siapa saja masyarakat yang diundang untuk menghadiri rembug/ rapat evaluasi?</p> <p>19. Bagaimana antusiasme masyarakat GP dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi?</p> <p>20. Fasilitas apa saja yang telah diberikan agar masyarakat aktif dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi?</p>
Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasca Pembangunan	<p>21. Apa saja yang dilakukan dalam kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan pasca pembangunan?</p> <p>22. Bagaimanakah antusiasme masyarakat GP dalam kegiatan pemeliharaan pasca pembangunan?</p>

LAMPIRAN IV

PEDOMAN OBSERVASI

Nama Kegiatan	:
Tempat	:
Tanggal	:
Waktu	:
Lokasi	:

Tahap Kegiatan	Kegiatan Observasi
Pelaksanaan	1. Mengamati partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh mereka. 2. Mengamati dan mencatat teknik/strategi fasilitator dalam memotivasi masyarakat agar berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
Pemantauan dan Evaluasi	3. Mengamati keaktifan masyarakat dalam pemantauan proses pelaksanaan kegiatan 4. Mengamati dan mencatat partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi, kegiatan apa saja yang dilakukan. 5. Mengamati dan mencatat infrastruktur yang berhasil/ telah selesai dibangun
Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasca Pembangunan	6. Mengamati pemanfaatan hasil pembangunan yang telah selesai dibangun oleh masyarakat 7. Mengamati usaha masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang telah selesai dibangun
Lain-lain	8. Mengamati kondisi lingkungan, sosial budaya kelurahan Gedong Pakuon 9. Mengamati kondisi keagamaan masyarakat kelurahan Gedong Pakuon

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Dokumen monografi dan demografi terbaru/terkini, meliputi gambaran umum wilayah, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk miskin, klasifikasi penduduk menurut usia, pendidikan, mata pencaharian penduduk dan kondisi keagamaan.
2. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan, meliputi:
 - a. Proyek yang terlaksana tahun 2015 dan 2016
 - b. Dokumen Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (RAPL)/ dokumen NUAP
 - c. Absensi / daftar kehadiran peserta dalam kegiatan rembuk dan musyawarah
 - d. Berita acara kegiatan rembuk dan musyawarah yang terlaksana
3. Dokumen NUAP/RAPL Kelurahan Gedong Pakuon
4. Panduan penyusunan basis data kumuh
5. Foto-foto kegiatan NUSP-2
6. Surat keterangan telah melakukan penelitian



LAMPIRAN VI

JENIS KONSTRUKSI YANG DAPAT DIUSULKAN

No	Komponen Infrastruktur	Dimensi	Jenis Konstruksi
1	Jalan Setapak	Lebar : 1,5 – 2,5 m	Konstruksi Rabat Beton (1:3:5) K-175 Konstruksi Paving Block minimal Mutu C
2	Jalan Lingkungan	Lebar : 2,5– 4,0 m Tebal Lapen ≥ 5 cm	Konstruksi Paving Block minimal Mutu B Konstruksi Lapis Penetrasi (Lapen)
3	Jembatan	Bentang ≤ 5 meter	Konstruksi slab beton K-225
4	Drainase Lingkungan	Lebar= 0,3 – 0,8 m Dalam $\leq 0,8$ m	Konstruksi Pasangan Batu Bata Konstruksi Batu Kali (1:4) Konstruksi Beton (minimal K-175)
5	Persampahan	Bak Sampah Komunal Kapasitas 5-10 RT	Bak sampah RT, konstruksi batu bata Tong sampah komposter (plastik bekas) Bak sampah komunal, konstruksi batu bata Bak Kontainer, konstruksi baja Gerobak/Becak/Motor sampah TPS - konstruksi batu bata
6	Sanitasi	Kap. 40 - 80 KK	IPAL Komunal, konstruksi beton / fiber Jaringan Perpipaan IPAL Komunal Mandi, Cuci, Kakus (MCK)
7	Air Bersih	Kap. HU : 10-20 KK Kap. SA > 5 lt/dt	Hidran Umum, konstruksi batu bata Bronscapting sumber air (SA), konstruksi batu bata + beton Pipa distribusi sumber air, PVC Ø 150 mm Paket SPAM Sumur bor dalam Mesin pompa air dalam ≥ 50 m Menara air h = 4 m, konstruksi baja Tandon air kapasitas 1,0 m ³ , konstruksi fiber
8	Lampu Penerangan Jalan	Daya TL/LED \geq 40watt	Lampu TL/LED, konstruksi tiang pipa baja galvanis Ø 2¼" + pondasi batu kali (1:4)

Sumber Data: Juknis Penyusunan NUAP



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 1036/IV.32/WK/2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TARGET PENANGANAN KAWASAN KUMUH PENERIMA PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE-2 (NUSP PHASE-2) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015-2017

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan permukiman dan perumahan yang sehat, layak dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan upaya penanganan lingkungan permukiman kumuh dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Penerima Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP Phase-2).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2012;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

Memperhatikan Surat Direktur Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor UM.02.06-CK/373 tanggal 16 Juni 2014 tentang Pertemuan Penajaman Usulan Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP Phase-2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Penerima Program Neighborhood And Shelter Project Phase-2 (NUSP PHASE 2) Di Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2017;

KEDUA : Lokasi Penerima Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP Phase-2) merupakan Lokasi (Kecamatan, Kelurahan) dalam lingkup wilayah kota Bandar Lampung yang terdapat dalam Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 974/IV.32/HK/2014 Tanggal 24 November 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung;

KETIGA : Lokasi Penerima Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP Phase-2) ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil Pemutakhiran Data Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;

KEEMPAT : Lokasi Penerima Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP Phase-2) di Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Penyediaan Hunian Layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Bandar Lampung, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

- KELIMA** : Berdasarkan Penetapan Lokasi Penerima Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP Phase-2) di Kota Bandar Lampung ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, layak dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,



HERMAN HN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala BAPPEDA Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Masing - masing yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR : 1036/IV.32/WK/2014
 TANGGAL : 29 Desember 2014

**PENETAPAN LOKASI TARGET PENANGANAN KAWASAN KUMUH
 PENERIMA PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER
 PROJECT PHASE-2 (NUSP PHASE-2) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015-2017**

No.	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS KAWASAN KUMUH
1.	Kota Karang Raya	Teluk Betung Timur	16,60 Ha.
2.	Kota Karang ✓	Teluk Betung Timur ✓	20,00 Ha.
3.	Gedung Pakuon ✓	Teluk Betung Selatan ✓	6,58 Ha.
4.	Negeri Olok Gading	Teluk Betung Selatan	6,00 Ha.
5.	Talang	Teluk Betung Selatan	9,42 Ha.
6.	Kangkung ✓	Bumi Waras ✓	21,03 Ha.
7.	Bumi Waras	Bumi Waras ✓	14,46 Ha.
8.	Bumi Raya ✓	Bumi Waras ✓	8,64 Ha.
9.	Sukaraja	Bumi Waras	42,50 Ha.
10.	Pidada ✓	Panjang ✓	6,63 Ha.
11.	Karang Maritim	Panjang ✓	2,00 Ha.
12.	Srengsem ✓	Panjang ✓	1,50 Ha.
13.	Campang Jaya	Sukabumi	5,06 Ha.
14.	Sukamenanti Baru	Kedaton	6,94 Ha.
15.	Kebon Jeruk	Tanjung Karang Timur	20,08 Ha.
16.	Sukajawa Baru	Tanjung Karang Barat	12,51 Ha.
17.	Gunung Sulah ✓	Way Halim ✓	19,19 Ha.
	17 KELURAHAN	9 KECAMATAN	219,14 Ha.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,


 HERMAN HN

LAMPIRAN IX

KONDISI BANGUNAN RUMAH TINGGAL

No	Kawasan Kumuh (LK/RT)	Jumlah Bangunan Rumah			Kondisi Bangunan		Status Kepemilikan	
		Perma- nen	Semi- Permanen	Non- Permanen	Tidak Kumuh	Kumuh	Milik Sendiri	Lainnya
	Lingkungan I							
1	RT.01	30	17	12	30	29	Pribadi	-
2	RT.02	24	18	10	24	28	Pribadi	-
3	RT.03	28	19	19	28	38	Pribadi	-
	Lingkungan II							
4	RT.06	29	19	11	29	30	Pribadi	-
5	RT.07	31	12	12	31	24	Pribadi	-
6	RT.16	27	15	16	27	31	Pribadi	-
	Lingkungan III							
7	RT.11	30	17	11	30	28	Pribadi	-
8	RT.12	34	16	12	34	28	Pribadi	-
9	RT.13	28	23	18	28	41	Pribadi	-
10	RT.14	25	20	12	25	32	Pribadi	-
Jumlah		286	176	133	286	309		

Sumber Data: Dokumen NUAP

LAMPIRAN X

SARANA PERSAMPAHAN

No.	Kawasan Kumuh (RW, RT)	Sarana Pengelolaan Sampah								
		Tingkat Rumah Tangga			Sarana Pengangkutan			TPS / Penimbunan		
		Jml Unit	Type & Kapasitas (m3)	Tingkat Layanan KK/RT	Jml Unit	Kapasitas (m3)	Tingkat Layanan (KK/RT)	Jml Unit	Kapasitas (m3)	Cakupan Layanan (KK/RT)
	Lingkungan I									
1	RT.01	5	Bak Sampah /0,6 m3	101	1	Gerobak Sampah /1m3	309	-	-	-
2	RT.02	9	Bak Sampah /0,6 m3	132				-	-	-
3	RT.03	8	Bak Sampah /0,6 m3	76				-	-	-
	Lingkungan II									
4	RT.06	18	Bak Sampah /0,6 m3	77	1	Gerobak Sampah /1m3	191	-	-	-
5	RT.07	15	Bak Sampah /0,6 m3	80				1	8	1.109
6	RT.16	16	Bak Sampah /0,6 m3	34				-	-	-
	Lingkungan III									
7.	RT.11	10	Bak Sampah /0,6 m3	84	1	Gerobak Sampah /1m3	334	-	-	-
8.	RT.12	12	Bak Sampah /0,6 m3	76				-	-	-
19.	RT.13	15	Bak Sampah /0,6 m3	54				-	-	-
10.	RT.14	10	Bak Sampah /0,6 m3	120				-	-	-
Jumlah		118		834	3		834			

Catatan: Type sarana Pengumpulan sampah,

- ✓ Tingkat Rumah Tangga : Bak sampah Rumah Tangga, Bak sampah Komunal, Bak sampah komposting
- ✓ Sarana Pengangkutan : Gerobak (Kap 1,3 m3), Becak sampah (Kap 1 m3), Motor sampah (Kap 1,5 m3)
- ✓ TPS / Penimbunan : Open Dumping, Bak Sampah, Kontainer (Kap 4 & 8 m3), Transfer Depo

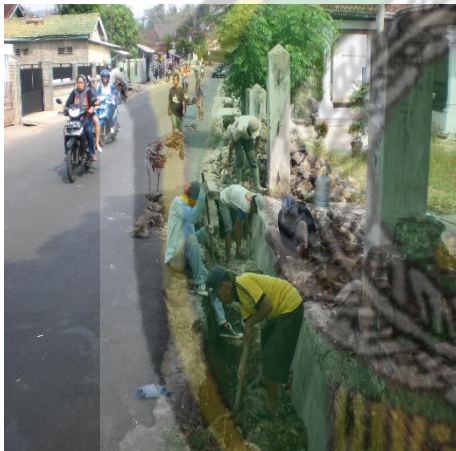
Sumber Data: Dokumen NUAP

LAMPIRAN XI

DOKUMENTASI KEGIATAN Pengangkutan bahan Material oleh Masyarakat



Pelaksanaan Kegiatan



LAMPIRAN XII



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENETAPAN JUDUL DAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM (KPI), PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI) DAN
MENEJEMEN DAKWAH (MD) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung

Menimbang : Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa diperlukan ditetapkan judul dan penunjukkan pembimbing skripsi dengan surat keputusan

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. KMA. RI. No. 397 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung
4. KMA. RI No. 30 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
5. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung No. 122 tahun 2011 tentang pedoman IAIN Raden Intan Lampung
6. Kalender Akademik IAIN Raden Intan Lampung TA. 2014/2015
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung no. 181 tahun 2011 tentang Beban Kerja Dosen IAIN Raden Intan Lampung
8. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Fakultas Dakwah dan ilmu komunikasi IAIN Raden Intan Lampung tahun 2014
9. Memperhatikan : hasil keputusan tim Sidang Judul tanggal 6 April 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM, PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

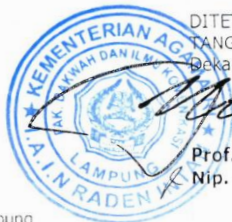
PERTAMA : Menetapkan Judul Dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan KPI, PMI, Dan MD Sebagaimana Tersebut Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini.

KEDUA : Mahasiswa Tersebut Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini Harus Segera Menyusun Proposal Penelitian Untuk Diseminarkan Selambat-Lambatnya 3 (Tiga) Bulan Sejak Ditetapkan Surat Keputusan Ini. Apabila Hal Tersebut Tidak Dilaksanakan Maka Dekan Dapat Membatalkan Judul Dan Pembimbing Yang Telah Ditetapkan.

KETIGA : Dosen Pembimbing Harus Menyediakan Waktu Kepada Mahasiswa Untuk Berkonsultasi Minimal Satu Kali Dalam Seminggu, Mengarahkan, Membimbing Dan Memberikan Petunjuk Kepada Mahasiswa Bimbingannya. Apabila Pembimbing Tidak Dapat Melaksanakan Tugasnya Maka Dapat Mengajukan Pergantian Pembimbing.

KEEMPAT : Segala akibat dari dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Raden Intan lampung tahun 2015

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI
TANGGAL
Dekan,

: Bandarlampung
: 14 April 2015

Prof. DR. H. Khomsahrial Romli, M.Si
Nip. 1961040919900310024

Tembusan :

1. Yth. Rektor IAIN Raden Intan lampung
2. Yth. Wakil Rektor I dan II IAIN Raden Intan lampung
3. Yth. Para Dekan di lingkungan IAIN Raden Intan lampung
4. Yth. Kepala Biro AUAK IAIN Raden Intan lampung
5. Yth. Wakil Dekan I FDIK IAIN Raden Intan lampung
6. Yth. Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan lampung

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung
 Nomor : 10 Tahun 2015
 Tanggal : 14 April 2015
 Tentang : Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan PMI

JUDUL SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN PMI 2015

NO	NAMA	NPM	JUDUL SKRIPSI	DOSEN PEMBIMBING	GOL	HONOR
1	Siti Latifah	1141020027	Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Remaja Di Kelurahan Kampung Baru Raya Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung	1. Drs.H. M. Saifuddin, M.Pd.	IV/b	Rp. 85. 000
2	Nia Fitri Maknun	1241020008	Strategi Rumah Yatim dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (Study Kasus terhadap 'Rumah Yatim' Bandar Lampung)	2. Drs. H. Rosidi, MA. 1. Dra. Siti Binti AZ., M. Si.	IV/b IV/c	Rp. 65. 000 Rp. 85.000
3	Musodah	1241020002	Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Bnk Sampah di Dusun Keramat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung	2. Drs. Mansur Hidayat, M.Sos. 1. Faizal, S. Ag., M.Sos.I	III/c IV/c	Rp.65. 000 Rp. 85. 000
4	Leni Arlisa	1241020058	Kemitraan Perusahaan dan Masyarakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Petani (Analisis terhadap Program Sertifikasi 4C PT Nestle pada Masyarakat Desa Ngarp Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus	2. Yundir Cui Mutia Yanti, S. Sos., M. Sos. I. 1. Prof. Dr. H. MA. Aehlami HS, MA.	III/d IV/d	Rp. 65. 000 Rp. 85. 000
5	Khodijah	1241020057	Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kelutanan (BP3K) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Di Desa Waygalih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan	2. Drs. H. Rosidi, MA. 1. Dr. Jasmadi, M. Ag.	IV/b IV/b	Rp. 65. 000 Rp. 85. 000
6	Meliyanti	1241020021	Fungsi Panti Sosial Bina Remaja Raden Intan Dalam	2. Drs Kholidi S. M. Pd. I. 1. Dr. Hasan Mukmin, MA.	IV/b IV/b	Rp. 65. 000 Rp. 85. 000

	Fitriyani		Pemberdayaan Sosial di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung	2. Mardiyah, S.Pd., M.Pd	III/c	Rp. 65. 000
7	Lili Tobing	1241020017	Kiyai dan Perubahan Sosial Keagamaan (Analisis terhadap Peran Kyai Pondok Pesantren <i>Raudlatul Muta'allimin</i> terhadap perubahan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan)	1. Dr. Jasmadi, M. Ag. 2. Drs. M. Mawardi J, M.Si	IV/b IV/b	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
8	Yamanhar Zubki	1241020054	Fungsi Organisasi Dakwah dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi terhadap Aktifitas LDII Dalam Pemberdayaan Ekonomi Anggota Rayon Gedong Lataan Kabupaten Pesawaran)	1. Drs. Mansur Hidayat, M. Sos. 2. Mardiyah, S. Pd., M.Pd	III/d III/c	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
9	Muhamad Imam Mahfut	1141020059	Fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) Dalam Pengembangan Life Skill Remaja Di Kelurahan Banjar Sari Metro Utara	1. Faizal, S. Ag., M.Ag. 2. M. Apun Syaripudin, M. Ag.	IV/b III/d	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
10	Febri Setiawan	1241020041	Komunitas Mahasiswa dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Sosial-Budaya pada Masyarakat lingkungan 'Pendawa Raya' Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame	1. Drs. M. Saifuddin, M. Pd. 2. Drs Mansur Hidayat, M. Sos.I	IV/b III/d	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
11	Supenik	1291020037	Pengorganisasian Komunitas Petani dalam Pemberdayaan Ekonomi (Analisis terhadap Fungsi Lembaga Kelompok Tani Di Desa Sidoarjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)	1. Dr. Bambang Budiwiranto,M.Ag. MA (AS) 2. Ibrahim, S. Ag., M. Ag.	III/d IV/a	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
12	Munawir Sadzali	1141020003	Pemanfaatan Sumberdaya Lokal dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di lingkungan RT 019 Griya Sukarame Bandar Lampung	1. Dr. Jasmadi, M. Ag. 2. Zamhariri, S. Ag., M.Sos.I	IV/b III/c	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
13	Nofriansah Eka Putra	1141020004	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis Gender (Studi terhadap Aktifitas Pemberdayaan kaum perempuan Melalui Kerajinan Tapis di Kawasan Pertokoan Bambu Kuning Bandar Lampung)	1. Drs. HM. Saifuddin, M.Pd. 2. Zamhariri, S. Ag., M. Sos. I.	IV/b III/c	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000

88

14	Deti Wahyuni	1241020055	Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Kesehatan warga Kelurahan Way Halim Kota Bandar Lampung	1. Prof. Dr. H. M. Bahri Ghozali, MA. 2. Drs. Mansur Hidayat, M. Sos. I	IV/c III/d	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
15	Herdi Yulianda	1241020045	Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Desa melalui Pengelolaan Potensi Pariwisata di Desa Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus	1. Faizal, S. Ag., M. Ag. 2. Zamhariri, S. Ag., M. Ag	IV/b III/c	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
16	Ahmad Syarkati Azan	1241020048	Pengaruh Perusahaan Retail Alfamart terhadap Perekonomian Masyarakat Islam Desa Kalibangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara	1. Prof. Dr. H. M. Nasor, M. Si. 2. Drs. M. Mawardi J., M.Si	IV/c IV/b	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
17	Rizki Akbar Nugroho	1241020065	Fungsi Kelompok Tani Mekar Sari Dalam Pemberdayaan Komunitas Petani Di Pekon Kebunen Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus	1. Bambang Budiwiranto, M.Ag.,MA (AS) 2. Mulyadi, S. Ag., M. Sos. I.	III/d III/d	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
18	Josy Novitasari	1241020010	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Dana Bergulir PNPB Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Raja Basa Bandar Lampung	1. Dr. Abdul Syukur, M. Ag. 2. Mardiyah, S. Pd. M.Pd.	IV/b III/c	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
19	Malpin Suryadi	1141020064	Pemanfaatan Potensi Lokal dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada Program Rumah Pangan Lestari (RPL) Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan	1. Prof. Dr. MA. Achlami HS., MA. 2. M. Apun Syaripudin, S. Ag., M. Si.	IV/c III/d	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
20	Fitriani	1241020032	Fungsi Baitul Maal Wat-Tawil (BTM) Sepakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan	1. Prof. Dr. H.MA. Achlami HS,MA. 2. Hj. Rodyah, S. Ag., M.Ag.	IV/c IV/b	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
21	Mastuah	1241020062	Optimalisasi fungsi Lahan Pertanian dalam peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Way Halom Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus	1. Drs. M. Mawardi J., M.Si 2. Zamhariri, S. Ag., M.Sos.I	IV/b III/c	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000

14

22	Rahmawati	1241020064	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren (Studi terhadap aktifitas Pemberdayaan Masyarakat di Pondok Pesantren Darul Hidayah Kemiling Bandar Lampung)	1. Prof. Dr. MA. Achlami HS, MA. 2. Zamhariri, S. Ag., M.Ag.	IV/c III/d	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
23	Yuli Rahayu Saparina	1241020063	Pengaruh Industri PT Indokom terhadap perubahan Ekonomi Masyarakat Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan	1. Drs. M. Mawardi, M.Si 2. Drs. Mansur Hidayat, M. Sos.I	IV/a III/d	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
24	Aulia Dewi	121020042	Pemberdayaan Remaja Penyandang Masalah Disabilitas Di Sekolah Luar Biasa (SLB) Sukarame Kota Bandar Lampung	1. Prof. Dr. MA. Achlami HS., MA. 2. Faizal, S.Ag., M.Ag.	IV/c IV/b	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000
25	Ervansyah	1141020063	Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Industri Kerajinan Sulam Usus Di Desa Haji Mena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	1. Drs. Mawardi J, M. Si. 2. Hesti Riza Zen, SH., MH.	IV/b IV/a	Rp. 85. 000 Rp. 65. 000

Bandar Lampung, 14 April 2015
Dekan,



Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si
NIP. 196104091990031002

LAMPIRAN XIII



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl.Letkol.H.Endro Suratmin Kampus Sukarame Lampung. Telp.(0721)704030.....

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

No : In/11/PD.I.D/PP.00.9/ **423** / 2016

Surat Keterangan ini diberikan kepada :

Nama : **RAHMAWATI**

NPM : **1241020064**

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Setelah dilaksanakan Seminar Proposal Judul Skripsi pada :

Hari/Tanggal : Kamis/14 April 2016 pukul 14.30

Judul awal : **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PESANTREN (STUDI TERHADAP AKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PONDOK PESANTREN DARUL HIDAYAH KEMILING BANDAR LAMPUNG)**

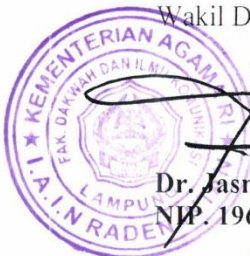
Judul Akhir : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NUSSP PHASE-2 DI GDEONG PAKUON KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Bandar Lampung, 10 Mei 2016

Ketua Jurusan PMI

H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I
NIP. 1973060112003121002

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Jasmadi, M. Ag.
NIP. 196106181990031003

LAMPIRAN XIV



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

TELUK BETUNG

REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI

Nomor : 070/839 /III/II.03/2016

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
 3. Surat Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Negeri Raden Intan Lampung Nomor: In.09/DD/PP.00.9/431/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Permohonan Izin Penelitian/Survey

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama/NPM : **Rahmawati / 1241020064**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.
Alamat : Desa Jati Indah Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
Lokasi : Kelurahan Gedong Pakuon Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung
Jangka Waktu : 17 Mei 2016 s.d. 17 Agustus 2016
Peserta : -
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
Judul Penelitian : **"Partisipasi Masyarakat dalam Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Gedong Pakuon Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung"**

- Catatan :
- 1.Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
 - 2.Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survey tersebut di atas.
 - 3.Melaporkan hasil Penelitian/Survey kepada Gubernur Lampung c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 - 4.Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.



Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 20 Mei 2016

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK,

IRWAN SIHAR MARPAUNG

Pembina Utama Madya
NIP. 19620527 201410 1 001

Tembusan :

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan),-
2. Walikota Bandar Lampung
c.q. Kepala Kesbang dan Politik
3. Rektor IAIN Raden Intan Lampung
c.q. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung

LAMPIRAN XV



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung Telpn 0721- 266 925
BANDAR LAMPUNG 35214

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/PENGABDIAN/KKN/PKL

Nomor : 070/ 388 /III.16/2016

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
 4. Peraturan Presiden No. 13 tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 24 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
- Membaca :** Surat Rekomendasi Penelitian/ Survei Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor :070/839/III/II.03/2016 tanggal 20 Mei 2016.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

NAMA : RAHMAWATI / 1241020064 ✓
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung
Alamat : Desa Jati Indah Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
Lokasi : Kelurahan Gedong Pakuon Bandar Lampung
Lamanya : 3 (tiga) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi/Karya Ilmiah
Judul : " PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) DI GEDONG PAKUON KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG "

Surat Izin ini berlaku sejak tanggal : 25 MEI 2016 S/D 25 AGUSTUS 2016

- CATATAN :**
1. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar Izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan Izin akan dicabut.
 2. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 25 Mei 2016

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA
SYARIFUDDIN ARTIF, SH
NIP. 197407111980031004

Tembusan Disampaikan Kepada Yth..

1. Bapak Walikota Bandar Lampung (sbg Laporan)
2. Sdr. Camat Teluk Betung Selatan Bandar Lampung
3. Sdr. Lurah Gedong Pakuon Bandar Lampung
4. Sdr. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung
5. ----- Arsip -----

LAMPIRAN XVI



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung Telpn 0721- 266 925
BANDAR LAMPUNG 35214

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/PENGABDIAN/KKN/PKL

Nomor : 070/ 638 /III.16/2016

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
 4. Peraturan Presiden No. 13 tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 24 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
- Membaca :** Surat Rekomendasi Penelitian/ Survei Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor : 070/839/III.03/2016 tanggal 20 Mei 2016.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

NAMA : RAHMAWATI / 1241020064
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung
Alamat : Desa Jati Indah Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
Lamanya : 2 (dua) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi/Karya Ilmiah
Judul : " PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) DI GEDONG PAKUON KECAMATAN TELUK BETUNG SELATAN KOTA BANDAR LAMPUNG "

Surat Izin ini berlaku sejak tanggal : **14 SEPTEMBER 2016 S/D 14 NOVEMBER 2016**

- CATATAN :**
1. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar Izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan Izin akan dicabut.
 2. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 14 September 2016

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK

KOTA BANDAR LAMPUNG

Ka. Bid. PMSD,

MUDA BASTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19611212 199203 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth..

1. Bapak Walikota Bandar Lampung (sbg Laporan)
2. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
3. Sdr. Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung
4. ----- Arsip -----

LAMPIRAN XVII



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN KELURAHAN GEDONG PAKUON

Jalan Basuki Rahmat No.1 Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Telp (0721) 475537

SURAT KETERANGAN

Nomor: 471.105/VII-142/2016

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Gedong Pakuon, Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : RAHMAWATI
NPM : 1241020064
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Benar telah melakukan penelitian di Gedong Pakuon dengan judul **"Partisipasi Masyarakat dalam Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di Gedong Pakuon Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung"**, mulai tanggal 24 Juni 2016 sampai 30 Agustus 2016.

Demikian surat ini kami buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gedong Pakuon, 13 September 2016

Kepala Kelurahan
Gedong Pakuon



Anton Idward, S.Sos
NIP. 196011241981011002

LAMPIRAN XVIII



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
KECAMATAN TELUKBETUNG SELATAN

Jl. WR. Supratman No. 9A Gedong Pakuon Telp. (0721) 475695

BANDAR LAMPUNG

SURAT IZIN PENELITIAN / SURVEY / PENGABDIAN / KKN / PKL

NOMOR : 070/129 /V.52/2016

Mengingat : Surat Izin Penelitian/Survei/Pengabdian/KKN/PKL dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor : 070/388/III.16/2016 tanggal 25 Mei 2016.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : RAHMAWATI/ 1241020064
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.
Alamat : Desa Jati Indah Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.
Untuk melaksanakan Kerja Praktek di :
Lokasi : Kelurahan Gedong Pakuon Kecamatan Telukbetung Selatan
Lamanya : 3 (tiga) bulan 25 Mei 2016 s/d 25 Agustus 2016
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung.
Tujuan : Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah.
Judul : **“ PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) DI GEDONG PAKUON KEC. TBS “**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 28 Juni 2016

CAMAT TELUKBETUNG SELATAN



YUSTAN EFFENDI, SE.,MH
NIP. 19741211 199503 1 002

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. ----- Arsip -----

LAMPIRAN XX



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letnan Kolonel Hi. Endro Suratmin Telp. (0721) 704030 Sukarame I Bandar Lampung 35131

KARTU BUKTI HADIR MUNAQSAH

Nama Mahasiswa : RAHMAWATI
NPM : 1241020064
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Pembimbing I : Prof. Dr.H.MA. Achlami. HS, MA
Pembimbing II : Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I
Judul Skripsi : **Partisipasi Masyarakat dalam Program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2) di Gedong Pakuon Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung**

No	Hari, Tanggal	Nama Mahasiswa	Notulen	Paraf
1	Senin, 23 Maret 2015	Dewi Maryam	Mardiyah, S.Pd., M.Pd	
2	Jum'at, 17 April 2015	Ageng Widodo	Mardiyah, S.Pd., M.Pd	
3	Jum'at, 17 Juli 2015	Nofiyanti	Mardiyah, S.Pd., M.Pd	
4	Rabu, 23 Maret 2016	M.Imam Mahfud	Taufik, M.TI	
5	Kamis, 24 Maret 2016	Leni Arlisa	Taufik, M.TI	
6	Kamis, 24 Maret 2016	Khodijah	Badarudin, S.Ag., M.Ag	
7	Kamis, 24 Maret 2016	Nia Fitria Makmun	Taufik, M.TI	
8	Rabu, 13 April 2016	Rani Musodah	Taufik, M.TI	

Bandar Lampung, 9 September 2016
Ketua Jurusan

Zamhariri, S.Ag. M.Sos.I
NIP. 197306012003121002



KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

PEDOMAN UMUM

Neighborhood Upgrading and Shelter Project
Phase-2 (NUSP-2)





1.1 Latar Belakang

Perkembangan perumahan dan pemukiman di perkotaan tidak lepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan, baik karena faktor pertumbuhan penduduk di kota maupun karena faktor urbanisasi. Seiring dengan pertumbuhan penduduk kota tersebut maka, kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan pemukiman meningkat pula, baik melalui kegiatan peningkatan maupun pembangunan prasarana-sarana baru. Namun, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pemukiman, baik dari segi perumahan maupun kawasan pemukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana kawasan pemukiman mulai mengalami penurunan sehingga memberikan kontribusi terjadinya kawasan pemukiman kumuh.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki laju urbanisasi tertinggi di Asia telah dihadapkan pada permasalahan kawasan pemukiman kumuh yang jumlahnya meningkat cukup besar. Berdasarkan data Susenas BPS, proporsi rumah tangga kumuh diperkotaan telah menurun sebesar 8,18% dari 20,75% pada tahun 1993 menjadi 12,57 pada tahun 2011. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa laju rata-rata penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 0,05% per tahun. Tanpa suatu terobosan yang berarti maka upaya pemerintah untuk mewujudkan kota bebas kumuh pada tahun 2020 akan sulit tercapai.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum didukung oleh dana APBN, telah melaksanakan berbagai kegiatan penanganan permukiman kumuh, sebagai upaya mengatasi masalah perkotaan seperti menurunnya kemampuan dan daya dukung kawasan permukiman, menurunnya kualitas lingkungan permukiman, tingginya angka kemiskinan dan kurang berkembangnya fungsi perkotaan.

Mengingat keterbatasan dana APBN dan dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kota bebas kumuh pada tahun 2020, Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase-2 (NUSP-2)* dengan menggunakan dana pinjaman dari *Asian Development Bank (ADB)*. Program NUSP-2 merupakan program pengembangan dari program *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSP)* yang telah dilaksanakan pada tahun 2005-2010 di 32 kota/kabupaten

Sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam rangka pelaksanaan UU No 1 Tahun 2011, pemerintah dalam melaksanakan pembinaan kepada pemerintah daerah mempunyai wewenang antara lain memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Dengan demikian maka, melalui program NUSP-2, pemerintah kota/kaupaten akan difasilitasi dalam proses penyusunan rencana aksi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan penanganan pemukiman kumuh dan kawasan permukiman kumuh daerah.

1.2 Tujuan dan Sasaran Program

Tujuan penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 adalah meningkatkan kualitas hunian, fungsi sarana dan prasarana serta utilitas umum pada kawasan pemukiman kumuh melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta secara mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin perkotaan.



Secara khusus tujuan pelaksanaan NUSP-2 adalah:

- a. Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan, termasuk kelompok masyarakat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pada kawasan pemukiman kumuh perkotaan.
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman kumuh melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta utilitas umum yang memadai dan terpadu dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh.
- c. Meningkatkan aksestabilitas masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui pembangunan kawasan pemukiman baru (*New Sites Development/NSD*).

Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan NUSP-2 memiliki dua sasaran kegiatan yaitu sasaran fungsional dan sasaran operasional. Sasaran fungsional diarahkan kepada hal-hal berikut:

- a. Terlembaganya pendekatan partisipatif di dalam perencanaan dan pembangunan pemukiman perkotaan yang memihak masyarakat miskin pada 20 kota/kabupaten;
- b. Tercapainya peningkatan kapasitas pemerintah daerah di 20 kabupaten/kota di dalam menangani permasalahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh yang selaras dengan rencana pembangunan perkotaan;
- c. Terumuskannya rencana aksi penanganan kawasan pemukiman kumuh perkotaan pada 20 kota/kabupaten yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan kelompok masyarakat;
- d. Terbangunnya kelembagaan masyarakat lokal di dalam pelaksanaan kegiatan penanganan lingkungan kumuh pada tingkat kelurahan dan tingkat komunitas;
- e. Terealisasinya dukungan kebijakan dan pembiayaan pemerintah di dalam pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 5 kota sasaran.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah dan masyarakat yang berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan pemukiman yang layak, sehat dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan maka, sasaran operasional penyelenggaraan kegiatan NUSP-2 di arahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mewujudkan rencana aksi penanganan pemukiman kumuh perkotaan (*Slum Improvement Action Plan/SIAP*) yang berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan;
- b. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman kumuh di perkotaan;
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat agar dapat bekerja sama secara sinergi memperbaiki lingkungan pemukiman secara mandiri dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap kebutuhan perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat, layak huni dan terjangkau;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur dasar lingkungan pemukiman yang telah dibangun/ditinggalkan.



4.3. TAHAPAN KEGIATAN TINGKAT KELURAHAN

Tahapan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan akan terdiri dari beberapa kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, yang dibagi kedalam 5 (lima) tahapan utama, yaitu: (i) Tahap Persiapan dan Pengorganisasian Masyarakat; (ii) Tahap Survey dan Identifikasi; (iii) Tahap Perencanaan; (iv) Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Fisik; (v) Tahap Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur.

4.3.1. Tahap Persiapan dan Pengorganisasian Masyarakat

Pada tahap ini akan dilaksanakan beberapa kegiatan, baik melalui forum musyawarah maupun rembug khusus, yang pada intinya ditujukan untuk mengorganisasikan warga masyarakat kedalam lembaga keswadayaan masyarakat yang akan bertanggung jawab di dalam pelaksanaan program NUSP-2. Pada tahap ini juga akan dilakukan penggalangan dukungan dan partisipasi aktif warga masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan berikut.

1) Sosialisasi Program

Kegiatan sosialisasi di Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dan Koordinator Kota, dibantu Tim Pendamping Masyarakat atau *Community Advisors* (CA) pelaksanaan kegiatan NUSP-2 tingkat Kelurahan. Secara rinci tujuan sosialisasi adalah agar:

- Masyarakat sadar akan permasalahan permukiman kumuh di wilayahnya;
- Masyarakat paham tentang potensi dan sumberdaya yang dapat digunakan untuk mengatasinya;
- Masyarakat paham tentang konsep dasar dan langkah-langkah kegiatan penanganan kumuh melalui program NUSP-2;
- Masyarakat paham tentang arti penting keberadaan organisasi keswadayaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan/lingkungan permukiman kumuh di wilayahnya;
- Masyarakat sadar tentang pentingnya keterlibatan perempuan didalam kepemimpinan dan keanggotaan organisasi masyarakat;
- Masyarakat sepakat dan memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan NUSP-2

2) Identifikasi dan Penilaian Kelembagaan Masyarakat

Identifikasi dan penilaian keberadaan kelembagaan masyarakat yang mengakar dan diakui oleh masyarakat, difokuskan pada prinsip dasar, substansi serta peran dan fungsi lembaga keswadayaan masyarakat yang mampu menjadi representasi masyarakat setempat di dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh melalui NUSP-2. Kegiatan ini dilakukan oleh Pendamping Masyarakat dengan tujuan agar diperoleh data dan informasi tentang:

- Keberadaan dan status lembaga keswadayaan masyarakat ditingkat Kelurahan;
- Struktur organisasi, jumlah pengurus dan anggota, serta aktivitas atau kegiatan lembaga keswadayaan masyarakat di kelurahan;
- Potensi dan kekurangan serta peluang yang dimiliki lembaga keswadayaan masyarakat untuk penguatan lebih lanjut.

3) Rembug Khusus Perempuan I

Fasilitasi rembug warga khusus kelompok perempuan ditujukan untuk menggali lebih lanjut tentang pendapat dan harapan mereka terhadap upaya penanganan lingkungan permukiman kumuh yang ada dilingkungannya. Rembug khusus perempuan terkait dengan



keberadaan organisasi keswadayaan masyarakat dimaksudkan untuk mendorong partisipasi dan keterwakilan mereka, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota, agar aspirasi dan keinginan kelompok perempuan dapat disalurkan dan diakomodir dalam kelembagaan masyarakat tersebut.

Penyertaan warga perempuan dalam kegiatan NUSP-2 bukan semata-mata ditujukan untuk mengatasi persoalan gender saja. Potensi kaum perempuan mempunyai banyak kelebihan, seperti: ketersediaan waktu yang cukup, kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan masih banyak potensi unggulan lainnya. Dengan demikian akan sangat positif bila partisipasi perempuan dalam penanganan lingkungan permukiman kumuh dapat ditingkatkan. Untuk itu, upaya lebih banyak memberi kesempatan pada kelompok perempuan agar terlibat pada pelaksanaan NUSP-2, akan menjadi faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program. Hasil yang diharapkan dari Rembug Khusus Perempuan I adalah:

- Warga perempuan sadar akan potensi yang dimiliki untuk berperan aktif dalam penanganan masalah kumuh di lingkungannya;
- Terjaringnya masukan dan pandangan warga perempuan tentang akar masalah terjadinya kekumuhan di lingkungannya;
- Warga perempuan termotivasi untuk terlibat secara aktif dalam upaya penanganan lingkungan permukiman kumuh yang ada di lingkungan sekitarnya;
- Warga perempuan termotivasi untuk ikut dan terlibat aktif sebagai pengurus kelembagaan masyarakat (BKM/LKM);
- Memilih personil perempuan (minimal 30%) yang akan diusulkan menjadi pengurus BKM/LKM;
- Penetapan wakil warga perempuan yang akan diusulkan sebagai pengurus dan anggota BKM/LKM.

4) Musyawarah Kelurahan I

Musyawarah Kelurahan I adalah forum pertemuan warga masyarakat tingkat Kelurahan yang ditujukan untuk membahas hasil identifikasi dan menetapkan lembaga keswadayaan masyarakat yang ada atau membentuk lembaga keswadayaan masyarakat yang baru sebagai pelaksana kegiatan NUSP-2 di tingkat Kelurahan. Musyawarah Kelurahan I diikuti oleh warga masyarakat sekurang-kurangnya 50 orang, terdiri dari 30 laki-laki (60%) dan 20 perempuan dewasa (40%), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perwakilan RT 10 orang, terdiri dari 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan (diutamakan RT yang masuk dalam lokasi NUSP-2);
- Perwakilan RW 8 orang, terdiri dari 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan (diutamakan RW yang masuk dalam lokasi NUSP-2);
- Organisasi perempuan (PKK) sebanyak 8 orang;
- Organisasi pemuda (Karang Taruna) 10 orang, terdiri dari 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan;
- BKM/LKM 7 orang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 orang perempuan.

Musyawarah Kelurahan I dipimpin oleh Kepala Kelurahan dengan agenda sbb:

- menetapkan lembaga pelaksana kegiatan NUSP-2 dan Kader Masyarakat di tingkat Kelurahan;
- Penetapan wakil perempuan dan kepengurusan BKM minimal 30% perempuan;



- c. Pembentukan dan Pemilihan Tim Survey Kampung Sendiri (SKS) yang akan melakukan pemetaan situasi dan kondisi sosial-ekonomi serta infrastruktur pada kawasan/lingkungan permukiman kumuh;
- d. Penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan NUSP-2 di tingkat kelurahan dan di tingkat masyarakat.

5) Pelatihan dan Penguatan BKM/LKM

Agar penyelenggaraan tahapan kegiatan NUSP-2 dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan maka, pengurus dan anggota BKM/LKM terlebih dahulu harus dipersiapkan dan diperkuat melalui kegiatan pelatihan. Kegiatan ini ditujukan agar pengurus dan anggota BKM/LKM memiliki pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan tahapan kegiatan NUSP-2. Agar pelatihan dapat berjalan secara efektif, maka materi pelatihan pengembangan kapasitas BKM/LKM diupayakan mampu mentransformasi nilai-nilai kemanusiaan sebagai basis perilaku kolektif masyarakat. Dengan demikian tujuan pelatihan BKM/LKM dalam NUSP-2 adalah:

- a. Pengurus dan anggota BKM/LKM memiliki pemahaman, kesadaran dan keyakinan tentang perubahan-perubahan mendasar terhadap penanganan lingkungan permukiman kumuh yang dimulai dengan perubahan perilaku individu masyarakatnya;
- b. Anggota BKM/LKM termotivasi sehingga mau dan mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat dalam pelaksanaan NUSP-2 di Kelurahannya;
- c. Anggota BKM/LKM termotivasi sehingga mau dan mampu untuk membangun kerjasama secara sinergis dalam penanganan lingkungan kumuh di wilayahnya.

4.3.2. Tahap Survey dan Identifikasi

Kegiatan survey dan Identifikasi permasalahan lingkungan permukiman kumuh akan meliputi beberapa kegiatan berikut:

1) Pelatihan (*On the Job Training / OJT*) kepada Tim SKS

Agar kegiatan Survey Kampung Sendiri (SKS) dapat terlaksana dengan baik, maka tim SKS akan diberikan pelatihan singkat dalam bentuk pelatihan terapan (OJT) oleh Pendamping Masyarakat dibantu oleh Koordinator Kota, dengan tujuan agar:

- a. Tim SKS memahami substansi kegiatan SKS;
- b. Tim SKS memahami maksud, tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan SKS;
- c. Tim SKS memahami bagaimana membangun dan mengatur kerja sama (*team work building*) di lapangan;
- d. Tim SKS memahami langkah-langkah dan prosedur kegiatan survey dan pemetaan di lapangan;
- e. Tim SKS mampu dan paham tentang proses penyusunan laporan dan mempresentasikan hasil SKS.

2) Pelaksanaan Survey Kampung Sendiri (SKS)

Kegiatan Survey Kampung Sendiri diorientasikan pada perubahan perilaku masyarakat agar lebih mampu dan mandiri serta mengerti tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya penanganan lingkungan permukiman kumuh di wilayahnya. SKS bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat untuk mengenali permasalahan serta memahami potensi yang dimilikinya, sehingga secara bersama-sama memiliki kesadaran



untuk memecahkan permasalahan permukiman kumuh dengan segenap potensi yang ada. SKS ditempatkan sebagai pendorong “perubahan/transformasi sosial” agar masyarakat mampu menganalisis lingkungannya sendiri, kemudian memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaannya serta mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kegiatan SKS dilaksanakan oleh tim SKS yang telah dibentuk pada Musyawarah Kelurahan I dan telah mengikuti pelatihan atau OJT oleh Pendamping Masyarakat (CA) dan dibantu Kader Masyarakat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan SKS adalah:

- a. Tersedianya peta wilayah dan peta sebaran kawasan kumuh di tingkat kelurahan;
- b. Tersedianya data jumlah penduduk dan luas wilayah kumuh di tingkat kelurahan;
- c. Tersedianya data dan informasi tentang permasalahan lingkungan permukiman yang ada (peta genangan air, peta lingkungan rawan sanitasi dan rawan air bersih, tata letak dan kepadatan bangunan, sebaran jumlah rumah kumuh)
- d. Data masyarakat/keluarga miskin di setiap kelurahan (dirinci per RT/RW/Lokasi kumuh), sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh masyarakat di tingkat kelurahan.

3) Kaji-Ulang PJM Pronangkis dan Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Sebelum dilakukan proses penyusunan dokumen Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh (RAPL/NUAP), maka terlebih dahulu akan dilakukan pengkajian terhadap Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) yang telah disusun oleh BKM/LKM melalui kegiatan PNPM Perkotaan serta peta rawan sanitasi dan peta rawan air bersih hasil SKS. Kaji-ulang terhadap dokumen-dokumen tersebut ditujukan untuk mendapatkan informasi penting dalam proses penyusunan RAPL/NUAP.

4) Rembug Khusus Perempuan II

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Musyawarah Kelurahan II, BKM/LKM didampingi CA dan Kader Masyarakat akan memfasilitasi kegiatan Rembug Khusus Perempuan II yang ditujukan untuk:

- a. Menjaring aspirasi dan usulan kelompok perempuan terhadap rencana kegiatan perbaikan lingkungan permukiman kumuh di wilayahnya;
- b. Penyepakatan rencana partisipasi kelompok perempuan dalam kegiatan pemabangunan infrastruktur dasar permukiman di tingkat kelurahan.

4.3.3. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKM/LKM, yang pada intinya ditujukan untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (*Neighborhood Upgrading Action Plan/NUAP*) secara partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan usulan pembangunan.

1) Musyawarah Kelurahan II

Musyawarah Kelurahan II merupakan forum musyawarah warga tingkat Kelurahan yang ditujukan untuk membahas hasil kegiatan Survey Kampung Sendiri (SKS) dan aspirasi serta usulan kelompok perempuan. Musyawarah Kelurahan diikuti oleh peserta sebanyak 50 orang terdiri dari 35 orang laki-laki (70%) dan 15 orang perempuan (30%), dengan ketentuan sama seperti pada Musyawarah Kelurahan I. Musyawarah Kelurahan II dipimpin



Kepala Kelurahan didampingi Pengurus dan Anggota BKM/LKM dan didukung Koordinator Kota dan Tim CA, dengan agenda sebagai berikut:

- a. Pemaparan dan pembahasan hasil SKS serta aspirasi dan usulan kelompok perempuan terhadap rencana perbaikan lingkungan permukiman kumuh di tingkat kelurahan;
- b. Pemaparan hasil kaji-ulang dokumen PJM Pronangkis Kelurahan;
- c. Pembentukan Tim Perencana dan Pelaksana Pembangunan Infrastruktur (TPPI); dan
- d. Penyepakatan Jadwal dan Rencana Penyusunan RAPL/NUAP.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Musyawarah Kelurahan II adalah:

- a. Terumuskannya daftar permasalahan dan rekomendasi usulan kegiatan peningkatan kualitas pada kawasan/lingkungan kumuh sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- b. Terpilih dan terbentuknya Tim Perencana dan Pelaksana Pembangunan Infrastruktur (TPPI) dibawah koordinasi BKM/LKM.

2) Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan atau RAPL (*Neighborhood Upgrading Action Plan / NUAP*)

Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan (RAPL) atau (*Neighborhood Upgrading Action Plan/NUAP*) harus dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan kelompok perempuan dan warga masyarakat miskin di tingkat kelurahan. Proses penyusunan secara partisipatif tersebut dimaksudkan agar rumusan rencana program dan kegiatan penanganan lingkungan kumuh telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan kelompok perempuan dan warga masyarakat miskin yang bermukim di lingkungan kumuh sasaran.

Proses penyusunan NUAP secara partisipatif juga dimaksudkan untuk memberdayakan dan memastikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanganan lingkungan permukiman kumuh di wilayah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta sesuai dengan kondisi isik lingkungan setempat.

Usulan rencana perbaikan lingkungan permukiman kumuh tersebut disusun untuk jangka menengah (3-5 tahun) akan dikaji-ulang setiap awal tahun melalui forum rembug warga agar masyarakat dapat mengevaluasi serta melakukan perbaikan terhadap rencana program dan kegiatan yang telah disusun. Hasil yang diharapkan dari proses penyusunan NUAP adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya rencana perbaikan lingkungan permukiman kumuh atau *Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP)*;
- b. Terumuskannya rencana pembiayaan kegiatan pembangunan infrastruktur selama jangka menengah (3-5 tahun);
- c. Terumuskannya rencana kontribusi masyarakat serta partisipasi kelompok perempuan dan warga miskin;
- d. Terumuskannya rencana kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (O&M) infrastruktur yang akan dibangun.



3) Verifikasi dan Konsolidasi RAPL/NUAP

Kegiatan verifikasi dan konsolidasi terhadap dokumen RAPL/NUAP dilakukan oleh LCO melalui forum lokakarya di tingkat kabupaten/kota. Hal ini dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan seluruh usulan dan rencana perbaikan lingkungan kumuh yang telah disusun oleh masyarakat (BKM/LKM) pada masing-masing kelurahan sasaran selaras dengan usulan dan rencana penanganan kumuh yang disusun oleh Pokja SIAP di tingkat kabupaten/ kota.

Proses konsolidasi dan integrasi di tingkat kabupaten/kota diharapkan menghasilkan kesepakatan diantara para piha untuk melaksanakan program dan kegiatan perbaikan kawasan permukiman kumuh secara menyeluruh dan bertahap, sesuai dengan: i) kebutuhan masyarakat; ii) skala prioritas penanganan; iii) kondisi fisik lingkungan; iv) alokasi dana yang ada; v) kelayakan teknis dan kontribusi serta tingkat partisipasi masyarakat.

Hasil yang diharapkan dari proses verifikasi dan konsolidasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai acuan BKM untuk melakukan revisi/perbaikan terhadap dokumen RAPL/NUAP sesuai dengan skala prioritas dan alokasi dana yang telah disepakati dengan LCO NUSP-2.

Besaran alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka perbaikan kawasan permukiman kumuh terdiri dari: i) alokasi dana BLM untuk perbaikan kawasan permukiman kumuh skala lingkungan masing-masing kelurahan sasaran; dan ii) besaran alokasi pembangunan infrastruktur untuk perbaikan kawasan permukiman kumuh skala kot (skala kawasan).

4) Revisi Dokumen RAPL/NUAP

Revisi dan penyempurnaan terhadap dokumen NUAP dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan konsolidasi di tingkat kabupaten/kota. Hasil revisi terhadap dokumen NUAP tersebut untuk selanjutnya akan digunakan sebagai acuan di dalam proses penyusunan program dan kegiatan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) atau *Community Action Plan* (CAP). Hasil revisi dokumen RAPL/NUAP selanjutnya dimintakan persetujuan LCO Kabupaten/Kota sebagai salah satu syarat pencairan dana BLM.

5) Musyawarah Kelurahan III

Kegiatan Musyawarah Kelurahan III merupakan forum rembug warga masyarakat kelurahan yang ditujukan untuk membahas hasil revisi dokumen Rencana Aksi Perbaikan Lingkungan atau *Neighborhood Upgrading Action Plan* (RAPL/NUAP) yang telah disusun oleh BKM/LKM dan disetujui oleh LCO. Musyawarah Kelurahan III dipimpin oleh Kepala Kelurahan dan diikuti 50 peserta, dengan ketentuan yang sama seperti pada musyawarah kelurahan sebelumnya. Agenda Musyawarah Kelurahan III antara lain adalah:

- Pemaparan hasil revisi NUAP yang telah disetujui LCO;
- Penyepakatan rencana kegiatan prioritas tahunan;
- Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Infrastruktur (KPP).



- d. Penyesepakatan terhadap jadwal kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai alokasi dana yang telah ditetapkan.

6) Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat/ *Community Action Plan* (RKM/CAP)

Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Masyarakat/ *Community Action Plan* (RKM/CAP) dilakukan oleh BKM/LKM melalui TPPI bersama-sama dengan KPP didampingi oleh *Community Advisor* dan Kader Masyarakat. Pelibatan KPP dalam proses penyusunan RKM dimaksudkan agar KPP sejak awal telah terlibat dalam proses perencanaan agar KPP dapat lebih memahami rancangan desain infrastruktur yang akan dibangun berikut tata cara pengoperasian dan pemeliharaannya. Di samping itu, di dalam RKM juga akan disusun Rencana Kegiatan O&P yang membutuhkan masukan dari KPP agar sesuai dengan kemampuan masyarakat. Rancangan desain infrastruktur harus mempertimbangkan aspek kemudahan operasi dan pemeliharaan, jenis dan spesifikasi teknis konstruksi yang akan dibangun harus sederhana dan mampu dilaksanakan masyarakat, aspek ketersediaan tenaga kerja, bahan/ material dan peralatan yang dibutuhkan, serta sesuai dengan alokasi dana dan besaran kontribusi masyarakat. Hal lain yang harus dilakukan di dalam penyusunan RKM adalah survey harga satuan yang akan digunakan dalam penyusunan RAB. Daftar harga tersebut tidak dijadikan lampiran dalam RKM, namun tetap harus diarsipkan.

Hasil yang diharapkan dari proses penyusunan RKM adalah:

- a. Tersusunnya dokumen RKM sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur di tingkat kelurahan;
- b. Tersusunnya dokumen DED dan RAB;
- c. Tersusunnya jadwal pelaksanaan kegiatan fisik;
- d. Tersusunnya rencana penggunaan dana untuk pekerjaan fisik;
- e. Tersusunnya rencana pengadaan barang dan jasa masyarakat;
- f. Tersusunnya rencana mobilisasi kontribusi masyarakat, baik dalam bentuk *in-kind* maupun *in-cash*;
- g. Rencana pemanfaatan dan pemeliharaan (O&P) infrastruktur.

7) Verifikasi Usulan RKM/CAP

Verifikasi terhadap dokumen RKM/CAP dilakukan oleh LCO dalam rangka untuk memastikan kesesuaian rencana pembangunan yang disusun dengan dokumen NUAP dan alokasi dana yang ada, serta penilaian kelayakan aspek teknis dan pembiayaan kegiatan, serta jadwal pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam proses verifikasi, LCO dan satker NUSP-2 kabupaten/kota didampingi karkor dan pendamping masyarakat (CA).

8) Revisi dan Finalisasi RKM/CAP

Berdasarkan hasil verifikasi, BKM/LKM akan melakukan koreksi dan revisi dalam rangka finalisasi dokumen RKM/CAP yang telah disusun. Tindak lanjut hasil revisi dan finalisasi RKM/CAP adalah:

- a. Tersedianya dokumen final RKM yang telah diuji LCO dan dapat dijadikan dasar pembuatan kontrak SP3;
- b. Penyampaian dokumen final RKM ke LCO dan Satker NUSP-2;



- c. Penyiapan rekening bank BKM/LKM;
- d. Penyelesaian rencana dan jadwal penandatanganan kontrak SP3 untuk persiapan pelaksanaan kegiatan fisik.

4.3.4. Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Fisik

Pelaksanaan pekerjaan fisik di tingkat kelurahan akan diawali dengan proses penandatanganan kontrak SP3 antara BKM/LKM dengan Satker NUSP-3 Kabupaten/Kota yang dilanjutkan kegiatan Rembug Khusus Perempuan III dan Musyawarah Kelurahan IV. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada lingkungan permukiman kumuh akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1) Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) merupakan legalitas formal dari Pemerintah Daerah bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada lingkungan permukiman kumuh melalui program NUSP-2 akan dilaksanakan langsung oleh masyarakat sesuai dokumen NUAP dan RKM yang telah disusun dan disepakati. Penandatanganan SP3 dilakukan oleh BKM dengan PPK/Satker NUSP-2 dan diketahui LCO serta Kepala Kelurahan Setempat. Tindak lanjut dari penandatanganan SP3 adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya dokumen kontrak SP3 antara BKM/LKM dengan PPK/Satker NUSP-2 kabupaten/kota yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh masyarakat;
- b. Penyiapan kelengkapan dokumen untuk proses pencairan BLM Tahap-I sebesar 40% dari nilai kontrak SP3;
- c. Persiapan pelaksanaan Rembug Khusus Perempuan dan Musyawarah Kelurahan IV.

2) Rembug Khusus Perempuan III

Rembug Khusus Perempuan III pada tahap pelaksanaan pekerjaan fisik dilakukan sebelum kegiatan Musyawarah Kelurahan IV. Kegiatan rembug khusus perempuan pada tahap pelaksanaan fisik bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif perempuan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilingkungannya;
- b. Terjadinya aspirasi dan partisipasi warga perempuan untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan fisik;
- c. Terseleksinya wakil perempuan yang akan terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan fisik, dan pada kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan;
- d. Mendorong partisipasi kaum perempuan untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- e. Menampung usulan kaum perempuan dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan.

3) Musyawarah Kelurahan IV

Musyawarah Kelurahan IV merupakan forum pertemuan warga di tingkat kelurahan yang ditujukan untuk membahas langkah-langkah untuk pelaksanaan pekerjaan fisik pada lingkungan kumuh di masing-masing kelurahan. Musyawarah Kelurahan IV dipimpin oleh Kepala Kelurahan dan diikuti oleh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat yang bermukim di lokasi kegiatan proyek, dengan ketentuan jumlah peserta sama dengan musyawarah kelurahan sebelumnya.



Agenda Musyawarah Kelurahan IV adalah:

- a. Penyepakatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan fisik termasuk rencana pengadaan tenaga kerja, rencana pengadaan bahan, dan rencana penggunaan dana BLM Tahap-I;
- b. Penyepakatan rencana penyiapan dan pembersihan lahan serta pengukuran di masing-masing lokasi proyek;
- c. Terbentuknya panitia pengadaan barang dan jasa;
- d. Terbentuknya panitia pengawas pelaksanaan pembangunan; dan
- e. Penyepakatan usulan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi anggota Tim Pelaksana Pembangunan Infrastruktur (TPPI).

4) Pelatihan dan Penguatan BKM

Pelatihan penguatan BKM/LKM pada tahap II ini akan dilaksanakan oleh Koordinator Kota (*City Coordinator*) dan difasilitasi oleh Tenaga Ahli RMC. Pelatihan penguatan BKM/LKM II bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota BKM, khususnya TPPI terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan fisik, yang meliputi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan pekerjaan fisik (Kurva-S), survey harga, proses pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja;
- b. Pengelolaan penggunaan dana BLM;
- c. Pengendalian dan pengawasan pekerjaan fisik;
- d. Pelaporan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan.

5) Pelaksanaan Pekerjaan Fisik

Pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur lingkungan permukiman kumuh dilakukan oleh BKM/LKM melalui TPPI mengacu pada dokumen Kontrak SP3 yang telah disetujui oleh PPK/Satker NUSP-2 Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan infrastruktur antara lain meliputi kegiatan:

- a. Pencairan dana BLM untuk pembangunan infrastruktur;
- b. Persiapan pelaksanaan pekerjaan fisik (pembersihan lahan, pengukuran tapak, pengadaan bahan, mobilisasi tenaga kerja);
- c. Pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan.

4.3.5. Tahap Operasi dan Pemeliharaan

Tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur diawali dengan Musyawarah Kelurahan ke-V setelah pembangunan infrastruktur dinyatakan selesai. Terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan BKM/LKM pada tahap ini, antara lain:

1) Musyawarah Kelurahan V

Musyawarah Kelurahan V merupakan forum pertanggungjawaban KM-TPPI terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada Musyawarah Kelurahan sebelumnya. Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan V dipimpin oleh Kepala Kelurahan dengan agenda sebagai berikut:

- a. Pembahasan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BLM untuk pelaksanaan pekerjaan fisik;
- b. Pembahasan laporan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur;



- c. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) yang dilengkapi dengan berbagai dokumen pendukung;
- d. Penyerahan seluruh dokumen dan laporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh TPPI kepada BKM/LKM;
- e. Persiapan serah terima hasil pembangunan dari BKM kepada Satker/PPK NUSP-2 Kabupaten/Kota;
- f. Pembahasan rencana dan usulan pelatihan bagi KPP.

2) Serah Terima Hasil Pekerjaan

Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dan dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat teknis sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satker/PPK dan LCO. Beberapa dokumen yang harus dipersiapkan sebagai persyaratan serah terima hasil pekerjaan adalah:

a. Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)

Setelah selesai melaksanakan pembangunan infrastruktur, maka TPPI harus menyusun Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) ditandatangani dan disetujui oleh BKM, diketahui oleh CA, yang menyatakan bahwa seluruh jenis pembangunan infrastruktur telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap diperiksa Satker/PPK NUSP-2 Kabupaten/Kota. Kondisi 100% dinyatakan tercapai jika hasil pemeriksaan terhadap kuantitas dan kualitas infrastruktur terbangun telah memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kontrak SP3. Pemeriksaan terhadap hasil pembangunan infrastruktur dilakukan bersama-sama oleh satker/PPK NUSP-2 Kabupaten/Kota, Pemerintah Kelurahan, BKM dan CA.

Pada saat LP2K disetujui dan ditandatangani oleh BKM, seluruh dokumen administrasi dan pertanggungjawaban sudah harus dilengkapi oleh TPPI. Lembar LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan kepada Satker/PPK NUSP-2 Kabupaten/Kota dengan tembusan ke CA untuk ditindaklanjuti berupa pemeriksaandi lapangan. Dokumen pendukung LP2K meliputi:

- i. Berita Acara Perubahan Volume/Jenis Pekerjaan;
- ii. Realisasi Volume dan Biaya Kegiatan;
- iii. Gambar Purna Laksana (*as Built Drawing*); dan
- iv. Foto-foto pelaksanaan kegiatan 0%, 50%, 100%.

b. Berita Acara Perubahan Pekerjaan

Pada akhir kegiatan pembangunan infrastruktur sebelum serah terima hasil pekerjaan, BKM/LKM harus melakukan perhitungan ulang terhadap volume dan jenis pekerjaan di lapangan. Hasil dari perhitungan ulang tersebut dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Pekerjaan, yang dilampiri dengan data dan informasi tentang perubahan volume maupun jenis pekerjaan yang merupakan perbandingan antara RAB dan realisasi pekerjaan di lapangan. Penyusunan Berita Acara Perubahan Pekerjaan dapat dilakukan pada setiap bulan sebelum pencairan BLM tahap berikutnya berdasarkan hasil pengukuran bersama (*joint survey*) oleh BKM/LKM dan TPPI bersama-sama dengan CA.



c. **Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB)**

Dalam hal ini BKM membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya berikut rekapitulasinya untuk dimintakan persetujuan Satker/PPK NUSP-2 dan LCO. Hal ini sebagai bentuk penjelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan serta penggunaan dana BLM. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) dibuat sesuai dengan kondisi pada saat LP2K dibuat. Hal-hal yang harus dicatat meliputi harga satuan, volume, jumlah HOK, realisasi penggunaan dana BLM untuk setiap item/pos kegiatan.

Cacatan RKB harus berdasar kepada kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan pelaporan harian. Pada prinsipnya pembuatan RKB merangkum seluruh cacatan penggunaan dana dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik yang dibuat selama masa konstruksi. Gambar-gambar yang dilampirkan dalam RKB meliputi gambar denah atau *lay out*, peta situasi, detail konstruksi dan lain-lain. Jika terjadi perubahan pada infrastruktur terbangun, maka harus dilakukan perubahan pada gambar kerja dan harus dituangkan dalam berita acara revisi.

d. **Gambar Purna Laksana (*As Built Drawing*)**

Hasil perhitungan ulang berdasarkan pengukuran lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Pekerjaan dilakukan penggambaran ulang sesuai dengan kondisi riil di lapangan terutama yang terkait dengan penyesuaian jenis pekerjaan dan dimensi sesuai dengan volume akhir pekerjaan di lapangan.

e. **Foto-foto kemajuan pelaksanaan kegiatan**

Sebagai gambaran informasi hasil pekerjaan pembangunan di lapangan, maka dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus dilakukan pada setiap jenis item pekerjaan masing-masing pada kondisi 0%, 50% dan 100%. Dokumentasi ini merupakan bagian dari kelengkapan dokumen Laporan Akhir.

3) **Pelatihan KPP**

Pelatihan kepada KPP ditujukan untuk memberi pemahaman tentang aspek-aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan komitmen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Hasil yang diharapkan dari kegiatan pelatihan ini adalah agar seluruh anggota KPP memahami aspek-aspek berikut:

- a. Kelembagaan KPP merupakan representasi masyarakat di dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur;
- b. Pengorganisasian masyarakat dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan keberlanjutan infrastruktur;
- c. Penguasaan teknik dasar pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun;
- d. Pelaksanaan rencana kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur secara partisipatif;
- e. Penggalan sumber-sumber pendanaan untuk pemeliharaan secara swadaya maupun bekerjasama dengan kelompok peduli.

4) **Serah Terima Infrastruktur**

Kegiatan Serah Terima Infrastruktur adalah penyerahan infrastruktur yang telah dibangun dari pemerintah kepada pemerintah kelurahan untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat melalui KPP. Selanjutnya KPP segera mempersiapkan pelaksanaan dari



rencana kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur untuk kepentingan warga masyarakat penerima manfaat.

5) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur merupakan tanggung jawab KPP. Hal tersebut dimaksudkan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat terjaga keberlangsungannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan KPP adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah Swadaya Pemeliharaan. KPP sebagai organisasi masyarakat ditingkat RT/RW, harus diposisikan sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur pada lingkungan pemukiman;
- b. Penyusunan rencana kerja KPP. Rencana Kerja O&P pada dasarnya mencakup seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur, yang secara umum memuat pokok-poko rencana sebagai berikut:
 - i. Pemetaan infrastruktur terbangun dan rencana pemanfaatan
 - ii. Analisis kebutuhan pembiayaan untuk pemeliharaan
 - iii. Penggalan sumber-sumber pembiayaan kegiatan
 - iv. Rencana Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan
 - v. Penyusunan RAB dan Jadwal Perbaikan
 - vi. Penyusunan rencana pengembangan
 - vii. Penyusunan RAB dan Jadwal Pelaksanaan
 - viii. Rapat-rapat berkala
 - ix. Pelaporan